



**PENGADILAN
TINGGI
YOGYAKARTA**

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2024

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA



<https://www.pt-yogyakarta.go.id>



Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.
Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul
D.I. Yogyakarta

KATA PENGANTAR

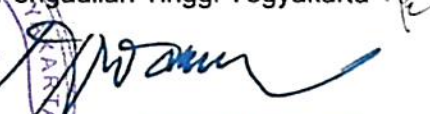


Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan berkah dan rahmatnya sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2024 ini dapat kami sajikan. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 143/KMA/SK/VII/2007 tentang Memberlakukan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan) serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 4506/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 Tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024.

Laporan ini menguraikan secara deskriptif tentang pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2024 yang meliputi tugas pokok dan tugas penunjang yaitu bidang teknis yustisial, administrasi kepaniteraan, kesekretariatan, bidang pengawasan serta bidang pembangunan sarana prasarana fisik, pengembangan Teknologi Informasi dan Perbaikan Sistem dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kepercayaan publik terhadap Lembaga Peradilan terwujud.

Hal tersebut selaras dengan tujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan mempercepat tercapainya Visi Mahkamah Agung RI.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini disajikan dengan harapan dapat memberikan manfaat dan informasi serta sebagai bahan evaluasi yang berguna bagi seluruh badan peradilan di Indonesia khususnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka mewujudkan lembaga Peradilan Yang Agung.

Yogyakarta, 3 Januari 2025
Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

SETYAWAN HARTONO, S.H., M.H.



KELUARGA BESAR PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KEADAAN PERKARA.....	7
A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum di Wilayah D.I. Yogyakarta	7
1. Keadaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama.....	13
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding.....	16
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	18
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	20
B. Penyelesaian Perkara	21
1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus.....	21
2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu	24
3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan PK	26
4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi.....	29
5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi	29
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)	30
1. Posbakum (Pos Bantuan Hukum)	30
2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu	31
3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	31
BAB III KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/ GOLONGAN/ PENDIDIKAN	33
A. Mutasi	35
B. Promosi.....	35
C. Pensiun.....	35
D. Diklat.....	36
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI	37
A. Pengelolaan Keuangan.....	37
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	45
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	68
BAB V PENINGKATAN LAYANAN PUBLIK	81
A. Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (Ampuh).....	81
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	95
C. Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	101
D. Inovasi Pelayanan Publik.....	103



BAB VI PENGAWASAN	122
A. Internal	122
B. Evaluasi	138
BAB VII PENUTUP	140
A. Kesimpulan.....	140
B. Rekomendasi.....	141





PENDAHULUAN

BAB I

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu Lembaga Negara yang melaksanakan pilot project reformasi birokrasi sejak tahun 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menyusun program dan kebijakan serta mengimplementasikan secara terus menerus pelaksanaan reformasi birokrasi secara utuh. Kebijakan ini sebagaimana tertuang dalam dokumen Perencanaan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia, yang dinamakan Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035 yang merupakan penyempurnaan dari Cetak Biru yang diterbitkan tahun 2003, guna lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh. Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya, termasuk Pengadilan Tinggi Yogyakarta serta Pengadilan Negeri di bawahnya senantiasa berupaya membangun citra positif peradilan melalui berbagai kebijakan pembaruan untuk mewujudkan Pengadilan Yang Agung (*Court of Excellence*).

Beberapa kebijakan yang dilakukan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan dan mewujudkan Pengadilan yang Agung (*Court of Excellent*) diantaranya adalah dikeluarkannya Maklumat Ketua Mahkamah Agung serta dilakukannya Akreditasi Penjaminan Mutu dan Lomba Inovasi Pelayanan Publik antar satuan kerja di seluruh Pengadilan di Indonesia. Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan suatu bentuk komitmen Mahkamah Agung, khususnya Badan Peradilan Umum dalam memberikan pelayanan baik kepada pencari keadilan maupun masyarakat pada umumnya.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum telah membentuk Tim Akreditasi Internal dengan Surat Keputusan Nomor: 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia. Berdasarkan asesmen Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, program Akreditasi Penjaminan Mutu yang sudah berjalan sejak tahun 2014 perlu ditingkatkan sistem dan pelaksanaannya. Untuk itu perlu dibuat program lanjutan yang berkesinambungan dan dirumuskan menjadi sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh

(AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum dengan Surat Keputusan Nomor : 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara, dan manajemen pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum. Dengan tujuan yang sama, berbagai Regulasi juga telah dikeluarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mengatur secara teknis, antara lain SK KMA Nomor: 2-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan dan SK KMA Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya dan PERMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui program-program yang mendukung pencapaian tujuan organisasi pastinya sedikit banyak menghadapi kendala/rintangan yang harus dihadapi. Terdapat beberapa masalah yang menyerpa dan mendapatkan perhatian publik yang cukup luas sejak tahun 2010 (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional / RPJMN). Dalam upaya untuk menyelesaikan dan mencegah berbagai kejadian yang menurunkan wibawa Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya, maka Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI No. 01/MAKLUMAT/KMA/IX/2017 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Salah satu kegiatan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk melaksanakan core bisnis peradilan yaitu dengan melakukan peradilan elektronik.

Peradilan elektronik adalah solusi untuk mengikuti era modernisasi. Dengan sistem persidangan secara virtual dapat meminimalisasi pertemuan fisik antara aparatur peradilan dan para pencari keadilan. Selain itu, peradilan elektronik menawarkan proses yang lebih cepat, mudah dan murah dengan waktu penyelesaian yang lebih terukur, hal ini dilakukan sesuai dengan beberapa regulasi yang telah diterbitkan Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung pertama kali menghadirkan layanan peradilan elektronik pada tahun 2018 yang diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2018. Layanan elektronik tersebut meliputi pendaftaran, pembayaran dan pemanggilan pihak secara elektronik. Setahun berikutnya, Mahkamah Agung menggenapkan layanan elektronik tersebut dengan menghadirkan sistem persidangan elektronik yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019. Bahkan, dari Perma ini juga lahir layanan upaya hukum banding secara elektronik. Mahkamah Agung kembali memperkuat layanan pengadilan elektronik dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sejak Perma Nomor 1 Tahun 2019 dikeluarkan (SK KPT Nomor W13.U/107/SK/KPT/V/2019) dan terakhir kali diperbaharui dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 22/KPT.W13-U/SK.KP3.4.2/I/2024. Dengan dikeluarkan Perma Nomor 7 Tahun 2022, Satgas SIPP Pengadilan Tinggi Yogyakarta secara aktif mensosialisasikan serta secara rutin memonitoring implementasi pelaksanaan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tersebut, baik di tingkat banding ataupun tingkat pertama / Pengadilan Negeri dibawahnya.

Pada tahun 2024, Pengadilan Tinggi Yogyakarta sesuai dengan pedoman telah melakukan Pengawasan Daerah pada Pengadilan Negeri se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang dilaksanakan pada bulan Mei dan November 2024. Hal tersebut merupakan sebagian dari penerapan Kebijakan dan Regulasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung RI untuk dilaksanakan Pengadilan Tinggi Yogyakarta serta Pengadilan Negeri dibawahnya yang semata-mata untuk mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan dan mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung (*Court of Excellence*).

Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempunyai tugas pokok untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara perdata, perkara pidana, perkara pidana anak dan perkara tipikor di tingkat banding serta mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya. Selain tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempunyai fungsi sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan di wilayah hukumnya, melakukan pembinaan dan konsultasi terhadap penyelenggaraan peradilan di wilayah hukumnya, menyusun

laporan hasil pengawasan, menyusun laporan perkara, menyusun statistik perkara serta mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik dari semua pengadilan negeri di wilayah hukumnya. Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta meliputi:

1. Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA
2. Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA
3. Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB
4. Pengadilan Negeri Wates Kelas IB
5. Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II

Pengadilan Tinggi Yogyakarta menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang merupakan kompilasi dari pelaksanaan kegiatan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024 sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat terutama bagi stakeholder yang telah memberikan perhatian kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini merupakan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan wewenang dan tugas Pengadilan Tinggi Yogyakarta serta sebagai bahan refleksi bagi kinerja seluruh komponen Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang terlibat dalam pemberian dukungan teknis dan administrasi. Selain itu Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini sebagai bekal untuk memproyeksikan perencanaan pada tahun-tahun berikutnya demi terwujudnya visi dan misi Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

B. Sejarah Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Sebelum Pengadilan Tinggi Yogyakarta dibentuk adalah merupakan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang, namun setelah terbit Undang Undang Nomor 7 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, maka Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang meliputi wilayah hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan operasionalnya.

Satuan kerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta diresmikan oleh Menteri Kehakiman RI pada tanggal 7 Mei 1981 di Gedung Agung Yogyakarta dengan dihadiri Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Bambang Surono, SH., dan Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Suparno, BA.

Di dalam operasionalnya, Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengalami beberapa perpindahan tempat, pada awal berdirinya Pengadilan Tinggi Yogyakarta beralamat di Jl. Trikora No. 1980 Yogyakarta pada tanggal 29 Juli tahun 1980 dengan Ketua Pengadilan Tinggi pertama kali yaitu Bapak Surono S.H. kemudian

pada tanggal 27 Mei 1986 kantor Pengadilan Tinggi Yogyakarta dipindah ke Jl. Prof. DR. Soepomo No.10 Yogyakarta. Pada saat gempa mengguncang Yogyakarta, tanggal 27 Mei 2007 kantor Pengadilan Tinggi Yogyakarta rusak parah untuk sementara kantor Pengadilan Tinggi Yogyakarta menumpang di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang beralamatkan di Jl. Kapas No. 10 Yogyakarta. Pada tanggal 1 Juli 2010, Pengadilan Tinggi Yogyakarta menempati gedung baru untuk melaksanakan semua Tugas Pokok dan Fungsinya yang beralamatkan di Lingkar Selatan, Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta.

Berdasarkan Keputusan Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor : 166/KEP/2017 Tentang Penamaan Jalan Arteri (Ring Road) Yogyakarta, Alamat Pengadilan Tinggi Yogyakarta berubah menjadi Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., telah diresmikan oleh Gubernur D.I. Yogyakarta tanggal 10 Oktober 2017 dan telah dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung RI, Ketua Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta.

C. Visi, Misi Dan Tujuan

Visi Pengadilan Tinggi Yogyakarta

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA YANG AGUNG”

Misi Pengadilan Tinggi Yogyakarta

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Tujuan Pengadilan Tinggi Yogyakarta

1. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
2. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
3. Meningkatkan sistem pelayanan yang meliputi jenis dan bentuk yang dibutuhkan dan kepuasan pengguna terpenuhi.
4. Mengembangkan sistem self asesment secara periodik dan berjenjang.

D. Program Kerja

Pengadilan Tinggi Yogyakarta menetapkan program kerja yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dan didukung dengan ketersediaan anggaran dalam DIPA Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Program tersebut selanjutnya dirinci dalam bentuk kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang lebih rinci pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Adapun program kerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

E. Rencana Strategis

Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah membuat sasaran strategis yang menjadi prioritas rencana strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta 2020-2024 dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan Pengadilan Tinggi Yogyakarta di atas serta untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan dihadapi ke depan. Adapun sasaran strategis yang ditetapkan antara lain:

1. Peningkatan penyelesaian perkara.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan (*Access To Justice*).
4. Peningkatan kualitas pengawasan.
5. Peningkatan pelayanan informasi publik.
6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
7. Peningkatan Sarana dan Prasarana.
8. Peningkatan kualitas perencanaan.
9. Peningkatan layanan umum dan rumah tangga.
10. Peningkatan layanan kepegawaian.
11. Peningkatan pengelolaan keuangan.
12. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi melalui pengembangan teknologi informasi.



KEADAAN PERKARA

BAB II

A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum di Wilayah D.I. Yogyakarta

Gambaran umum penanganan perkara peradilan umum di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

No	Pengadilan	Sisa 2023	Masuk 2024	Beban Perkara	Cabut	Putus	Sisa 2024
1	PT Yogyakarta	9	293	302	0	289	13
2	PN Yogyakarta	192	20.674	20.866	36	20.712	154
3	PN Sleman	308	29.586	29.894	82	29.574	323
4	PN Wates	482	14.447	14.531	6	14.469	55
5	PN Bantul	138	30.269	30.407	12	30.278	136
6	PN Wonosari	53	6670	6723	0	6684	39
Jumlah		1182	101939	102723	136	102006	720

Tabel 2.1 : Keadaan perkara peradilan umum di Wilayah D.I. Yogyakarta tahun 2024

Keadaan Perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Keadaan perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2024, yang menunjukkan kinerja penanganan perkara adalah sebagaimana tampak pada Tabel 2.2 di bawah ini. Perkara tersebut terdiri atas perkara perdata, perkara pidana, perkara pidana anak dan perkara pidana khusus Tipikor.

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2023	Masuk Tahun 2024	Beban 2024	Putus Tahun 2024	Sisa Tahun 2024
1	Perkara Perdata	7	131	138	133	5
2	Perkara Pidana Biasa	2	150	152	144	8
3	Perkara Pidana Anak	0	2	2	2	0
4	Perkara TIPIKOR	0	10	10	10	0
Jumlah		9	293	302	289	13

Tabel 2.2 : Keadaan perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2024



Grafik 2.1 : Keadaan perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2024

a. Keadaan Perkara Pidana Biasa

Keadaan Perkara Pidana Biasa di Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai berikut :

1. Sisa Tahun 2023 : 2 perkara
2. Masuk Tahun 2024 : 150 perkara
3. Putus Tahun 2024 : 144 perkara
4. Sisa akhir Tahun 2024 : 8 perkara

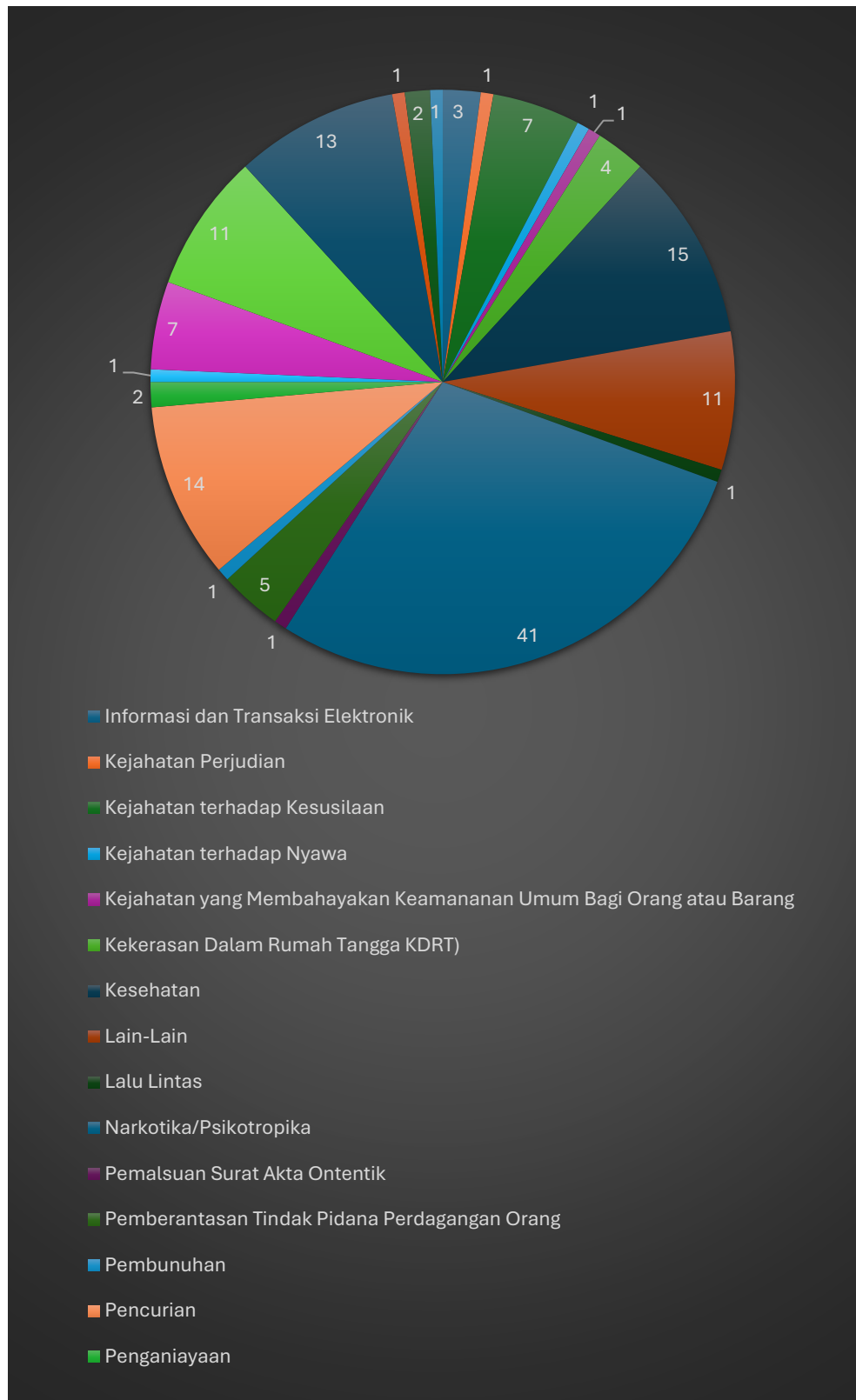
Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Biasa

1. Putus kurang dari 1 bulan : 144 perkara
2. Putus 1 s/d 2 bulan : - perkara
3. Putus diatas 2 bulan s/d 3 bulan : - perkara

Isi amar putusan perkara pidana biasa

1. Memperkuat : 99 perkara
2. Membatalkan : 5 perkara
3. Memperbaiki : 40 perkara
4. Mengubah : - perkara
5. Dicarut : - perkara

Keadaan Perkara Pidana Biasa berdasarkan klasifikasi perkara:



Grafik 2.2. : Klasifikasi jumlah perkara pidana biasa di Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2024

b. Keadaan Perkara Pidana Anak

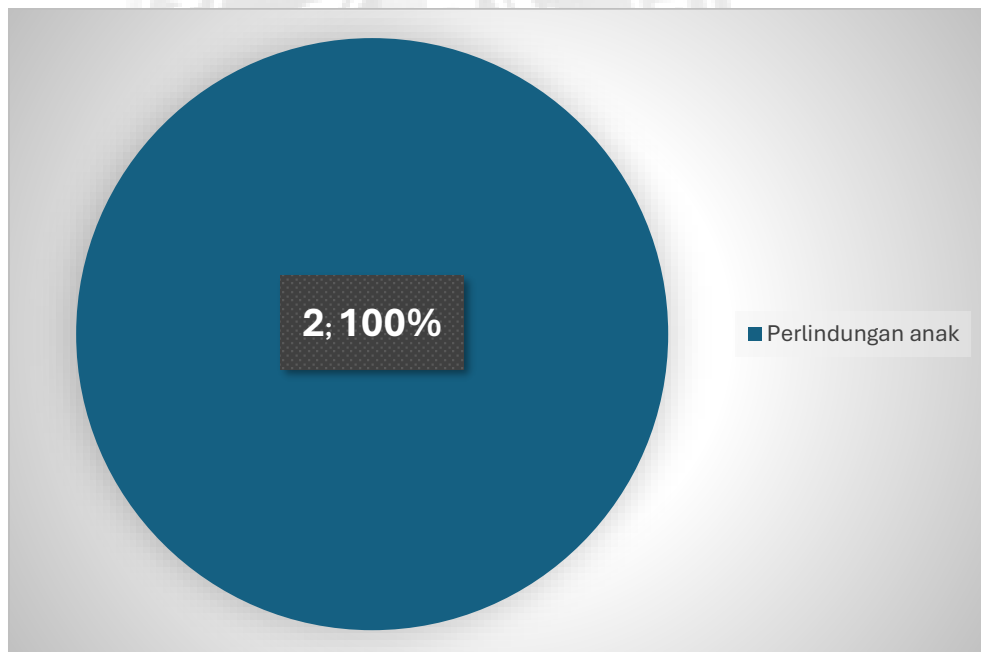
1. Sisa Tahun 2023 : - perkara
2. Masuk Tahun 2024 : 2 perkara
3. Putus Tahun 2024 : 2 perkara
4. Sisa akhir Tahun 2024 : - perkara

Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Anak

- Putus kurang dari 1 bulan : 2 perkara

Isi Amar putusan akhir Perkara Pidana Anak

- Memperkuat : 1 perkara
- Membatalkan : - perkara
- Memperbaiki : 1 perkara
- Mengubah : - perkara

Keadaan Perkara Pidana Anak Berdasarkan Klasifikasi Perkara :

Grafik 2.3 : Jumlah perkara pidana anak berdasarkan klasifikasi perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2024

c. Keadaan Perkara Perdata

1. Sisa perkara tahun 2023 : 7 perkara
2. Perkara masuk tahun 2024 : 131 perkara
3. Perkara putus tahun 2024 : 133 perkara
4. Sisa tahun 2024 : 5 perkara

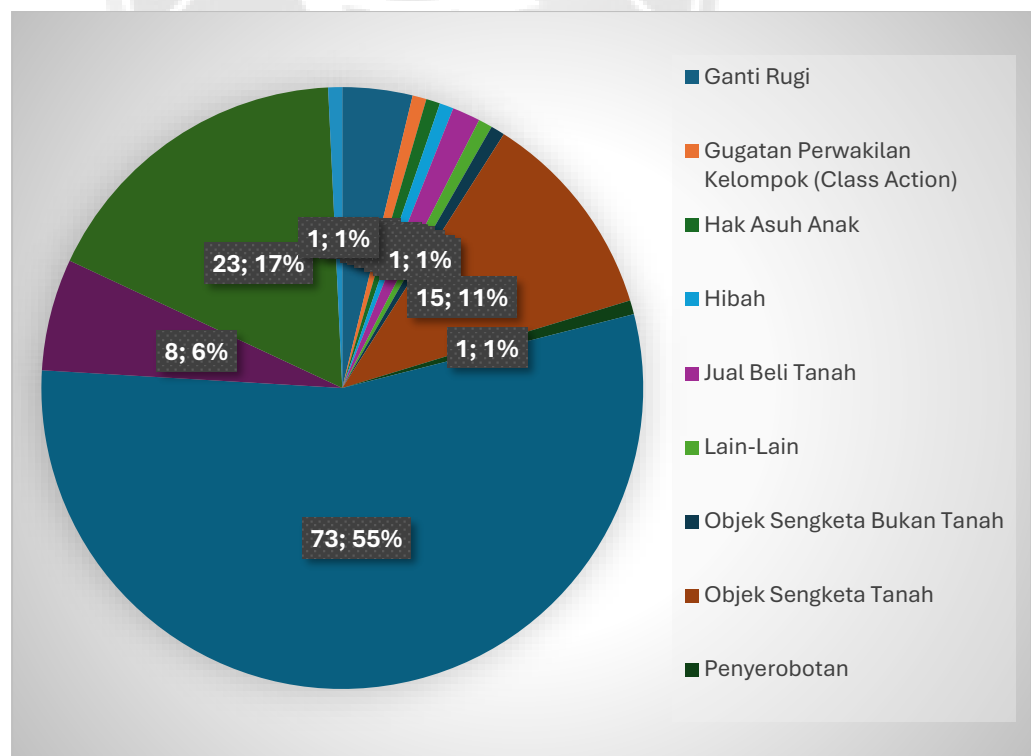
Waktu Penyelesaian Perkara Perdata

1. Putus kurang dari 1 bulan : 132 perkara
2. Putus 1 s/d 2 bulan : - perkara
3. Putus diatas 2 bulan s/d 3 bulan : 1 perkara

Isi amar putusan perkara perdata

1. menguatkan : 91 perkara
2. Membatalkan : 21 perkara
3. Memperbaiki : 18 perkara
4. Tidak Dapat Diterima : 1 perkara
5. Dicabut : - perkara

Keadaan Perkara Perdata Berdasarkan Klasifikasi Perkara :



Grafik 2.4 : Jumlah Perkara perdata berdasarkan Klasifikasi Perkara di Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2024

d. Keadaan Perkara TIPIKOR

1. Sisa Perkara Tahun 2023 : - Perkara
2. Perkara Masuk Tahun 2024 : 10 Perkara
3. Perkara Putus Tahun 2024 : 10 Perkara
4. Sisa Perkara Tahun 2024 : - Perkara

Keadaan Perkara Perdata Berdasarkan Klasifikasi Perkara :

Waktu Penyelesaian TIPIKOR

1. Putus kurang dari 1 bulan : 10 perkara
2. Putus 1 s/d 2 bulan : - perkara
3. Putus diatas 2 bulan s/d 3 bulan : - perkara

Isi amar putusan perkara TIPIKOR

1. menguatkan : 4 perkara
2. Membatalkan : 1 perkara
3. Memperbaiki : 5 perkara
4. Tidak Dapat Diterima : - perkara
5. Dicabut : - perkara



Grafik 2.5 : Klasifikasi perkara Tipikor di Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2024

1. Keadaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama

No	Pengadilan	Sisa 2023	Masuk 2024	Beban Perkara	Cabut	Putus	Sisa 2024
1	PN Yogyakarta	192	20.674	20.866	36	20.712	154
2	PN Sleman	308	29.586	29.894	82	29.574	323
3	PN Wates	482	14.447	14.531	6	14.469	55
4	PN Bantul	138	30.269	30.407	12	30.278	136
5	PN Wonosari	53	6.670	6723	0	6.684	39
Jumlah		1.173	101.646	102.421	136	101.717	707

Tabel 2.3 :
Keadaan perkara di Pengadilan Tingkat Pertama se D.I. Yogyakarta tahun 2024

Dari tabel diatas diketahui bahwa keseluruhan perkara yang diterima pengadilan tingkat pertama di seluruh wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2024 sebanyak 101.646 perkara, kemudian sisa perkara tahun 2023 sebanyak 1.173 perkara, sehingga beban penanganan perkara pada tahun 2024 sebanyak 102.421 perkara.

Perkara yang diputus tahun 2024 sebanyak 101.717 perkara dan sebanyak 136 perkara dicabut oleh para pihak sehingga sisa perkara pada akhir Desember 2024 sebanyak 707 perkara. Jumlah sisa perkara pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan sisa perkara pada tahun 2023 menurun sebanyak 466 perkara. Rincian keadaan perkara tingkat pertama di lingkungan peradilan umum sebagaimana penjelasan dibawah ini :

a. Perkara Perdata

Pengadilan/Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Beban 2024	Cabut 2024	Putus 2024	Sisa 2024
Pengadilan Negeri Yogyakarta						
Perdata Gugatan	54	173	227	13	172	55
Perdata Permohonan	47	593	640	21	636	2
Gugatan Sederhana	0	28	28	0	27	1
Perlawanan/Derden Verzet	3	7	10	0	5	5
PHI	13	34	47	2	27	20
Jumlah	117	835	952	36	867	83
Pengadilan Negeri Sleman						
Perdata Gugatan	112	296	410	29	285	126

Pengadilan/Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Beban 2024	Cabut 2024	Putus 2024	Sisa 2024
Perdata Permohonan	62	1029	1091	53	1044	46
Gugatan Sederhana	3	45	48	1	47	0
Perlawanan/Derden Verzet	0	5	5	0	0	5
Perdata Konsinyasi	2	6	8	0	7	1
Jumlah	179	1381	1562	83	1383	178
Pengadilan Negeri Wates						
Perdata Gugatan	11	31	42	1	30	11
Perdata Permohonan	21	594	615	1	600	14
Gugatan Sederhana	1	44	45	0	44	1
Perlawanan/Derden Verzet	0	0	0	0	0	0
PHI	0	0	0	0	0	0
Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
Eksekusi	9	7	16	4	3	9
Perdata Bantahan	0	1	1	0	0	0
Jumlah	42	677	719	6	677	35
Pengadilan Negeri Bantul						
Perdata Gugatan	47	134	181	6	149	26
Perdata Permohonan	5	330	335	6	320	16
Gugatan Sederhana	4	35	39	0	38	1
Perlawanan/Derden Verzet	3	4	7	0	6	1
PHI	0	0	0	0	0	0
Jumlah	59	503	562	12	513	44
Pengadilan Negeri Wonosari						
Perdata Permohonan	20	435	455	0	446	9
Perdata Gugatan	9	50	59	0	52	7
Gugatan Sederhana	2	44	46	0	46	0
Perlawanan/Bantahan	0	1	1	0	1	0
Jumlah	31	530	561	0	545	16

Tabel 2.4 : Keadaan Perkara Perdata Tingkat Pertama Tahun 2024

b. Perkara Pidana

Pengadilan/Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Beban 2024	Cabut 2024	Putus 2024	Sisa 2024
Pengadilan Negeri Yogyakarta						
Pidana Biasa	68	380	448	0	385	63
Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
Pidana Cepat	0	95	95	0	95	0
Lalu lintas	0	19333	19333	0	19333	0
Pidana Anak	2	12	14	0	11	3



Pengadilan/Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Beban 2024	Cabut 2024	Putus 2024	Sisa 2024
Pidana Praperadilan	0	2	2	0	2	0
Tindak Pidana Korupsi	5	17	22	0	19	3
Jumlah	75	19.839	19.914	0	19.845	69
Pengadilan Negeri Sleman						
Pidana Biasa	121	720	841	0	711	130
Pidana Singkat	0	7	7	0	7	0
Pidana Cepat	0	208	208	0	208	0
Lalu lintas	0	7218	7218	0	7218	0
Pidana Anak	5	38	43	0	34	9
Praperadilan	3	14	17	0	15	2
Jumlah	129	8205	8334	0	8193	141
Pengadilan Negeri Wates						
Pidana Biasa	42	201	243	0	223	20
Pidana Singkat	0	16	16	0	16	0
Pidana Cepat	0	30	30	0	30	0
Lalu lintas	0	13516	13516	0	13516	0
Tindak Pidana Korupsi	0	0	0	0	0	0
Pidana Anak	0	6	6	0	6	0
Pidana Praperadilan	0	1	1	0	1	0
Jumlah	42	13.770	13.812	0	13.792	20
Pengadilan Negeri Bantul						
Pidana Biasa	69	429	498	0	428	76
Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
Pidana Cepat	0	24	24	0	24	0
Lalu lintas	0	29283	29283	0	29283	0
Tindak Pidana Korupsi	0	0	0	0	0	0
Pidana Anak	4	27	31	0	27	4
Pidana Praperadilan	0	3	3	0	3	0
Jumlah	73	29.766	29.839	0	29.765	80
Pengadilan Negeri Wonosari						
Pidana Biasa	21	145	166	0	144	22
Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
Pidana Cepat	0	18	18	0	18	0
Lalu lintas	0	5971	5971	0	5971	0
Pidana Anak	1	4	5	0	4	1
Pidana Praperadilan	0	2	2	0	2	0
Jumlah	22	6.140	6.162	0	6.139	23

Tabel 2.5. : Keadaan Perkara Pidana Tingkat Pertama Tahun 2024

c. Statistik Aktivasi E-Court Pengadilan Negeri

Pengadilan	Jumlah Terdaftar	SKUM (Rp)	Gugatan	Permohonan	Bantahan	Gugatan Sederhana	Total
PN Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
PN Sleman	-	-	-	-	-	-	-
PN Wates	670	-	31	594	1	44	670
PN Bantul	503	188.892.850	134	330	-	35	499
PN Wonosari	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	961	106.749.000	162	712	4	45	923

Tabel 2.6.: Statistik Aktivasi E-Court Pengadilan Negeri se Wil D.I. Yogyakarta Tahun 2024

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

a. Perkara Perdata

Pengadilan/Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban 2024	Cabut 2024	Putus 2024	Sisa 2024
Pengadilan Negeri Yogyakarta						
Perdata Gugatan	29	19	48	0	44	4
Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
Perlawanan/Derden Verzet	2	0	2	0	2	0
Jumlah	31	19	50	0	46	4
Pengadilan Negeri Sleman						
Perdata Gugatan	11	51	62	2	44	16
Perlawanan (Derden Verzet)	0	2	2	0	2	0
Jumlah	11	53	64	2	46	16
Pengadilan Negeri Wates						
Perdata Gugatan	-	3	3	-	3	-
Perdata Permohonan	-	-	-	-	-	-
Perdata Sederhana	-	-	-	-	-	-
Perlawanan (Derden Verzet)	-	-	-	-	-	-
PHI	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	3	3	-	3	-
Pengadilan Negeri Bantul						
Perdata Gugatan	4	35	39	0	33	9
Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
Perlawanan/Derden Verzet	0	0	0	0	0	0
PHI	0	0	0	0	0	0
Jumlah	4	35	39	0	33	9
Pengadilan Negeri Wonosari						

Pengadilan/Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban 2024	Cabut 2024	Putus 2024	Sisa 2024
Perdata Gugatan	1	1	2	-	2	0
Perlawanan (Derden Verzet)	2	0	2	-	2	0
Jumlah	3	1	4	-	4	0

Tabel 2.7 : Keadaan Perkara Perdata Banding Tahun 2024

b. Perkara Pidana

Pengadilan/Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban 2024	Cabut 2024	Putus 2024	Sisa 2024
Pengadilan Negeri Yogyakarta						
Pidana Biasa	5	47	52	1	44	7
Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
Lalu Lintas	0	0	0	0	0	0
Pidana Anak	0	1	1	1	0	0
Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
Tindak Pidana Korupsi	2	11	13	1	12	0
Jumlah	7	58	65	3	56	7
Pengadilan Negeri Sleman						
Pidana Biasa	52	57	109	3	51	55
Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
Lalu Lintas	0	0	0	0	0	0
Pidana Anak	0	1	1	0	1	0
Jumlah	52	58	110	3	52	55
Pengadilan Negeri Wates						
Pidana Biasa	2	24	26	2	21	3
Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
Lalu Lintas	0	0	0	0	0	0
Tindak Pidana Korupsi	0	0	0	0	0	0
Pidana Anak	0	0	0	0	0	0
Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
Jumlah	2	24	26	2	21	3
Pengadilan Negeri Bantul						
Pidana Biasa	3	22	25	0	18	7
Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
Lalu lintas	0	0	0	0	0	0
Tindak Pidana Korupsi	0	0	0	0	0	0
Pidana Anak	0	0	0	0	0	0
Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
Jumlah	4	22	26	0	18	15

Pengadilan/Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban 2024	Cabut 2024	Putus 2024	Sisa 2024
Pengadilan Negeri Wonosari						
Pidana Biasa	0	10	10	0	10	0
Pidana Anak	0	1	1	0	1	0
Jumlah	0	11	11	0	11	0

Tabel 2.8 : Keadaan Perkara Pidana Banding Tahun 2024

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

a. Perkara Perdata

Pengadilan/Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban 2024	Cabut 2024	Putus 2024	Sisa 2024
Pengadilan Negeri Yogyakarta						
Perdata Gugatan	25	21	46	0	24	22
Perdata Permohonan	1	0	1	0	1	0
Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
Perlawanan (Derden Verzet)	1	1	2	0	1	0
PHI	8	16	24	0	21	3
Jumlah	35	38	73	0	47	26
Pengadilan Negeri Sleman						
Perdata Gugatan	23	26	49	2	23	24
Perlawanan (Derden Verzet)	1	1	2	0	1	1
Perdata Permohonan	2	0	2	0	0	2
Jumlah	26	27	53	2	24	27
Pengadilan Negeri Wates						
Perdata Gugatan	0	1	1	0	0	1
Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
Perlawanan (Derden Verzet)	0	0	0	0	0	0
PHI	0	0	0	0	0	0
Perdata Bantahan	0	1	1	0	0	1
Jumlah	0	2	2	0	0	2
Pengadilan Negeri Bantul						
Perdata Gugatan	8	22	30	1	11	20
Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
Perlawanan/Derden Verzet	0	0	0	0	0	0
PHI	0	0	0	0	0	0
Jumlah	8	22	30	1	11	20
Pengadilan Negeri Wonosari						
Perdata Gugatan	2	2	4	0	3	1
Perlawanan (Derden Verzet)	0	1	1	0	0	1
Jumlah	2	3	5	0	3	2

Tabel 2.9 : Keadaan Perkara Perdata Kasasi Tahun 2024

b. Perkara Pidana

Pengadilan/Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban 2024	Cabut 2024	Putus 2024	Sisa 2024
Pengadilan Negeri Yogyakarta						
Pidana Biasa	5	25	30	0	14	17
Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
Lalu Lintas	0	0	0	0	0	0
Pidana Anak	0	1	1	1	0	0
Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
Tindak Pidana Korupsi	0	0	0	0	0	0
Jumlah	5	26	31	1	14	17
Pengadilan Negeri Sleman						
Pidana Biasa	50	29	79	0	33	46
Pidana Anak	2	0	2	0	2	0
Jumlah	52	29	81	0	35	46
Pengadilan Negeri Wates						
Pidana Biasa	0	17	17	2	8	7
Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
Lalu Lintas	0	0	0	0	0	0
Tindak Pidana Korupsi	0	0	0	0	0	0
Pidana Anak	0	0	0	0	0	0
Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	17	17	2	8	7
Pengadilan Negeri Bantul						
Pidana Biasa	5	6	11	0	8	3
Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
Lalu lintas	0	0	0	0	0	0
Tindak Pidana Korupsi	0	0	0	0	0	0
Pidana Anak	0	0	0	0	0	0
Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
Jumlah	5	6	11	0	8	3
Pengadilan Negeri Wonosari						
Pidana Biasa	0	4	4		3	1
Pidana Anak	0	1	1		1	0
Jumlah	0	5	5		4	1

Tabel 2.10 : Keadaan Perkara Pidana Kasasi Tahun 2024

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

a. Perkara Perdata

Pengadilan/Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban 2024	Cabut 2024	Putus 2024	Sisa 2024
Pengadilan Negeri Yogyakarta						
Perdata Gugatan	4	4	8	0	5	3
Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
Perlawanan/Derden Verzet	0	0	0	0	0	0
Jumlah	4	4	8	0	5	3
Pengadilan Negeri Sleman						
Perdata Gugatan	2	5	7	1	5	1
Jumlah	2	5	7	1	5	1
Pengadilan Negeri Wates						
Perdata Gugatan	0	0	0	0	0	0
Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
Perlawanan/Derden Verzet	0	0	0	0	0	0
PHI	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0
Pengadilan Negeri Bantul						
Perdata Gugatan	3	2	5	0	3	2
Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
Perlawanan/Derden Verzet	0	0	0	0	0	0
PHI	0	0	0	0	0	0
Jumlah	3	2	5	0	3	2
Pengadilan Negeri Wonosari						
Perdata Gugatan	0	1	1	0	0	1
Jumlah	0	1	1	0	0	1

Tabel 2.11 : Keadaan Perkara Perdata Peninjauan Kembali Tahun 2024

b. Perkara Pidana

Pengadilan/Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban 2024	Cabut 2024	Putus 2024	Sisa 2024
Pengadilan Negeri Yogyakarta						
Pidana Biasa	0	1	1	0	1	0
Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
Lalu Lintas	0	0	0	0	0	0
Pidana Anak	0	0	0	0	0	0

Pengadilan/Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban 2024	Cabut 2024	Putus 2024	Sisa 2024
Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
Tindak Pidana Korupsi	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	1	1	0	1	0
Pengadilan Negeri Sleman						
Pidana Biasa	2	4	6	0	3	3
Jumlah	2	4	6	0	3	3
Pengadilan Negeri Wates						
Pidana Biasa	0	2	2	0	1	1
Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
Lalu lintas	0	0	0	0	0	0
Tindak Pidana Korupsi	0	0	0	0	0	0
Pidana Anak	0	0	0	0	0	0
Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	2	2	0	1	1
Pengadilan Negeri Bantul						
Pidana Biasa	2	0	2	0	2	0
Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
Lalu lintas	0	0	0	0	0	0
Tindak Pidana Korupsi	0	0	0	0	0	0
Pidana Anak	0	0	0	0	0	0
Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
Jumlah	2	0	2	0	2	0
Pengadilan Negeri Wonosari						
Pidana Biasa	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0

Tabel 2.12 : Keadaan Perkara Pidana Peninjauan Kembali Tahun 2024

B. Penyelesaian Perkara

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus oleh Pengadilan Negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah jumlah Sisa Perkara Tahun 2023 yang diputus pada tahun 2024

a) Perkara Perdata

Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2023	Sisa 2023 di Cabut 2024	Sisa Perkara Yang Diputus 2024	Sisa Perkara 2024
Pengadilan Negeri Yogyakarta				
Perdata Gugatan	54	13	41	0

Perdata Permohonan	47	21	26	0
Perdata Gugatan Sederhana	0	0	0	0
Perlawanan/bantahan	3	0	3	0
Konsinyasi	0	0	0	0
Eksekusi	10	0	0	10
PHI	13	2	11	0
Jumlah	127	36	81	10
Pengadilan Negeri Sleman				
Perdata Gugatan	112	14	100	0
Perdata Permohonan	62	7	55	0
Perdata Gugatan Sederhana	3	1	2	0
Perlawanan/bantahan	0	0	0	0
Konsinyasi	2	0	2	0
Eksekusi	13	6	0	7
Jumlah	192	28	159	7
Pengadilan Negeri Wates				
Perdata Gugatan	11	0	11	0
Perdata Permohonan	21	0	21	0
Perdata Gugatan Sederhana	1	0	1	0
Perlawanan/bantahan	0	0	0	0
Konsinyasi	0	0	0	0
Eksekusi	9	0	0	9
Jumlah	42	0	33	9
Pengadilan Negeri Bantul				
Perdata Gugatan	47	0	34	0
Perdata Permohonan	5	0	16	0
Perdata Gugatan Sederhana	0	0	0	0
Perlawanan/bantahan	3	0	3	0
Konsinyasi	0	0	0	0
Eksekusi	41	6	3	32
Jumlah	96	6	56	32
Pengadilan Negeri Wonosari				
Perdata Gugatan	9	0	9	0
Perdata Permohonan	20	20	0	0
Perdata Gugatan Sederhana	2	0	2	0
Perlawanan/bantahan	0	0	0	0
Konsinyasi	0	0	0	0
Eksekusi	17	1	14	2
Jumlah	48	21	25	2

Tabel 2.13 : Jumlah Sisa Perkara Perdata Tahun 2023 Yang Diputus Tahun 2024

b) Perkara Pidana

Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2023	Sisa 2023 di Cabut 2024	Sisa Perkara Yang Diputus 2024	Sisa Perkara 2024
Pengadilan Negeri Yogyakarta				
Pidana Biasa	68	0	68	0
Pidana Singkat	0	0	0	0
Pidana Cepat	0	0	0	0
Lalu Lintas	0	0	0	0
Pidana Anak	2	0	2	0
Praperadilan	0	0	0	0
Tipikor	5	0	5	0
Jumlah	75	0	75	0
Pengadilan Negeri Sleman				
Pidana Biasa	121	0	121	0
Pidana Singkat	0	0	0	0
Pidana Cepat	0	0	0	0
Lalu Lintas	0	0	0	0
Pidana Anak	5	0	5	0
Praperadilan	3	0	3	0
Jumlah	129	0	129	0
Pengadilan Negeri Wates				
Pidana Biasa	42	0	42	0
Pidana Singkat	0	0	0	0
Pidana Cepat	0	0	0	0
Lalu Lintas	0	0	0	0
Pidana Anak	0	0	0	0
Praperadilan	0	0	0	0
Jumlah	42	0	42	0
Pengadilan Negeri Bantul				
Pidana Biasa	69	0	69	0
Pidana Singkat	0	0	0	0
Pidana Cepat	0	0	0	0
Pidana Anak	4	0	4	0
Lalu Lintas	0	0	0	0
Praperadilan	0	0	0	0
Jumlah	73	0	73	0
Pengadilan Negeri Wonosari				
Pidana Biasa	21	0	21	0
Pidana Singkat	0	0	0	0
Pidana Cepat	0	0	0	0
Pidana Anak	1	0	1	0
Lalu Lintas	0	0	0	0
Praperadilan	0	0	0	0
Jumlah	22	0	22	0

Tabel 2.14 : Jumlah Sisa Perkara Pidana Tahun 2023 Yang Diputus Tahun 2024

2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Perkara Yang Diputus Tepat Waktu menurut SEMA No. 2 Tahun 2014 adalah penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Adapun jumlah perkara yang diputus tepat waktu tahun 2024 pada Pengadilan Negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah sebagai berikut :

a) Perkara Perdata

Jenis Perkara	Perkara Yg Ditangani		Jumlah Putusan	Putusan Tepat Waktu	Putusan terlambat
	Sisa 2023	Masuk 2024			
Pengadilan Negeri Yogyakarta					
Perdata Gugatan	54	173	172	115	57
Perdata Permohonan	47	593	636	633	3
Perdata Gugatan Sederhana	0	28	27	18	9
PHI	13	34	27	27	0
Perlawanan / Bantahan	3	7	5	3	2
Jumlah	117	835	867	796	71
Pengadilan Negeri Sleman					
Perdata Gugatan	112	296	285	256	29
Perdata Permohonan	62	1029	1044	1042	2
Perdata Gugatan Sederhana	3	45	45	45	3
Perlawanan / Bantahan	0	5	5	5	0
	174	1375	1379	1348	31
Pengadilan Negeri Wates					
Perdata Gugatan	11	31	31	27	4
Perdata Permohonan	21	594	601	601	0
Perdata Gugatan Sederhana	1	44	44	44	0
Perlawanan / Bantahan	0	0	0	0	0
Konsinyasi	0	0	0	0	0
Jumlah	33	669	676	672	4
Pengadilan Negeri Bantul					
Perdata Gugatan	47	134	102	87	15
Perdata Permohonan	5	330	326	326	0
Perdata Gugatan Sederhana	0	35	35	35	0
Perlawanan / Bantahan	0	0	0	0	0

Konsinyasi	0	0	0	0	0
Jumlah	52	499	463	448	15
Pengadilan Negeri Wonosari					
Perdata Gugatan	9	50	52	52	0
Perdata Permohonan	20	435	446	446	0
Perdata Gugatan Sederhana	2	44	46	46	0
Perlawanan / Bantahan	0	1	1	1	0
Jumlah	31	530	545	545	0

Tabel 2.15 : Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2024

b) Perkara Pidana

Jenis Perkara	Perkara Yg Ditangani		Jumlah Putusan	Putusan Tepat Waktu	Putusan terlambat
	Sisa 2023	Masuk 2024			
Pengadilan Negeri Yogyakarta					
Pidana Biasa	68	380	385	385	0
Pidana Singkat	0	0	0	0	0
Pidana Tipiring / Cepat	0	95	95	95	0
Pidana Lalu-Lintas	0	19.333	19.333	19.333	0
Tipikor	5	17	19	0	19
Pidana Anak	2	12	11	11	0
Pidana Praperadilan	0	2	2	2	0
Jumlah	75	19.839	19.845	19.826	19
Pengadilan Negeri Sleman					
Pidana Biasa	121	720	711	711	0
Pidana Singkat	0	7	7	7	0
Pidana Tipiring / Cepat	0	208	208	208	0
Pidana Lalu-Lintas	0	27.218	27.218	27.218	0
Pidana Anak	5	38	33	33	0
Pidana Praperadilan	3	14	15	15	0
Jumlah	130	28.205	28.192	28.192	0
Pengadilan Negeri Wates					
Pidana Biasa	42	201	223	223	0
Pidana Singkat	0	16	16	16	0
Pidana Tipiring / Cepat	0	30	30	30	0
Pidana Lalu-Lintas	0	13.516	13.516	13.516	0
Pidana Anak	0	6	6	6	0
Pidana Praperadilan	0	1	1	1	0
Jumlah	42	13.770	13.792	13.792	0

Pengadilan Negeri Bantul					
Pidana Biasa	69	429	428	428	0
Pidana Singkat	0	0	0	0	0
Pidana Tipiring / Cepat	0	24	24	24	0
Pidana Lalu-Lintas	0	29.283	29.283	29.283	0
Pidana Anak	4	27	27	27	0
Pidana Praperadilan	0	3	3	3	0
Jumlah	76	29.766	29.765	29.765	0
Pengadilan Negeri Wonosari					
Pidana Biasa	21	145	144	144	0
Pidana Singkat	0	0	0	0	0
Pidana Tipiring / Cepat	0	18	18	18	0
Pidana Lalu-Lintas	0	5.971	5.971	5.971	0
Pidana Anak	1	4	4	4	0
Pidana Praperadilan	0	2	2	2	0
Jumlah	22	6.140	6.139	6.139	0

Tabel 2.16 : Perkara Pidana Tingkat Pertama Yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2024

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan PK

Akseptabilitas putusan pengadilan adalah penerimaan pihak berperkara terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap kasus hukum atau sengketa yang dihadapinya. Akseptabilitas ditunjukkan dengan tidak dilakukannya upaya hukum terhadap putusan tersebut.

a) Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama

Berikut adalah jumlah perkara pada Pengadilan Negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2024

Jenis Perkara	Sisa Putusan PN 2023 Belum BHT	Putusan PN 2024 Contentius	Mengajukan Banding	Tidak Mengajukan Banding
Pengadilan Negeri Yogyakarta				
Perkara Perdata	0	840	63	777
Perkara Pidana	0	19.815	44	19.771
Perkara Anak	0	11	0	11
Perkara Tipikor	0	19	13	6
Jumlah	0	20.685	120	20.565

Pengadilan Negeri Sleman				
Perkara Perdata	43	1.498	66	1.475
Perkara Pidana	0	28.159	57	28.102
Perkara Anak	0	33	1	32
Jumlah	43	29.690	124	29.609
Pengadilan Negeri Wates				
Perkara Perdata	1	674	4	671
Perkara Pidana	0	13.786	24	13.762
Perkara Anak	0	6	0	6
Jumlah	1	14.466	28	14.439
Pengadilan Negeri Bantul				
Perkara Perdata	62	513	35	540
Perkara Pidana	69	29.735	22	29.782
Perkara Anak	7	27	0	34
Jumlah	138	30.275	57	30.356
Pengadilan Negeri Wonosari				
Perkara Perdata	0	53	1	52
Perkara Pidana	0	144	10	134
Perkara Anak	0	4	1	3
Jumlah	0	201	12	189

Tabel 2.17 : Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2024

b) Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Banding

Berikut adalah jumlah perkara pada Pengadilan Negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2024.

Jenis Perkara	Sisa Putusan Banding 2023 Belum BHT	Putusan Banding 2024	Mengajukan Kasasi	Tidak Mengajukan Kasasi
Pengadilan Negeri Yogyakarta				
Perkara Perdata	0	46	33	13
Perkara PHI	0	27	15	12
Perkara Pidana	0	44	18	26
Perkara Tipikor	0	12	8	4
Jumlah	0	129	74	55
Pengadilan Negeri Sleman				
Perkara Perdata	16	48	28	26
Perkara Pidana	1	51	26	25
Jumlah	17	99	54	51
Pengadilan Negeri Wates				
Perkara Perdata	2	0	2	0

Perkara Pidana	0	26	17	9
Jumlah	2	26	19	9
Pengadilan Negeri Bantul				
Perkara Perdata	4	33	6	31
Perkara Pidana	4	22	6	20
Jumlah	8	55	12	51
Pengadilan Negeri Wonosari				
Perkara Perdata	1	1	2	0
Perkara Pidana	0	11	5	6
Jumlah	1	12	7	6

Tabel 2.18 : Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2024

c) Akseptabilitas Putusan Kasasi

Berikut adalah jumlah perkara pada Pengadilan Negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2024

Jenis Perkara	Putusan PN 2024 Yang Telah BHT	Putusan Banding 2024 Telah BHT	Putusan Kasasi Tahun 2024	Permohonan PK Tahun 2024	Tidak Mengajukan PK
Pengadilan Negeri Yogyakarta					
Perkara Perdata	840	46	26	8	832
Perkara Pidana	19.826	44	14	1	19.825
Perkara Tipikor	19	12	8	0	19
Jumlah	20.685	102	48	9	20.685
Pengadilan Negeri Sleman					
Perkara Perdata	145	26	17	4	141
Perkara Pidana	28.189	58	29	4	28.185
Jumlah	28.334	84	46	8	28.326
Pengadilan Negeri Wates					
Perkara Perdata	673	2	0	0	673
Perkara Pidana	223	2	8	2	221
Jumlah	896	4	8	2	894
Pengadilan Negeri Bantul					
Perkara Perdata	231	33	11	2	229
Perkara Pidana	29.765	18	11	6	29.759
Jumlah	29.996	51	22	8	29.988
Pengadilan Negeri Wonosari					
Perkara Perdata	507	4	4	1	506
Perkara Pidana	160	7	4	0	160
Jumlah	667	11	8	1	606

Tabel 2.19: Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali Tahun 2024

4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi

Berikut adalah jumlah perkara perdata pada Pengadilan Negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang berhasil di mediasi pada tahun 2024.

Pengadilan Negeri	Jumlah Perkara Mediasi	Status			
		Berhasil	Tidak Berhasil	Proses Mediasi	Tidak dapat dilaksanakan
PN Yogyakarta	103	12	82	8	1
PN Sleman	182	11	163	8	0
PN Wates	11	1	10	0	0
PN Bantul	96	7	73	13	3
PN Wonosari	25	6	18	1	0
Jumlah	417	37	346	30	4

Tabel 2.20 : Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi Tahun 2024

5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

Berikut adalah jumlah perkara anak pada Pengadilan Negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang berhasil melalui diversi pada tahun 2024.

No	Pengadilan Negeri	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Status		
				Berhasil	Tidak Berhasil	Dalam Proses
1	Pengadilan Negeri Yogyakarta	12	6	5	1	0
2	Pengadilan Negeri Sleman	38	19	16	0	3
3	Pengadilan Negeri Wates	6	1	1	0	0
4	Pengadilan Negeri Bantul	27	5	4	1	0
5	Pengadilan Negeri Wonosari	5	1	1	0	0
Jumlah		88	32	27	2	3

Tabel 2.21 : Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi Tahun 2024

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

1. Posbakum (Pos Bantuan Hukum)

Satuan Kerja	Organisasi Pemberi Layanan	Jumlah Layanan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
PN Yogyakarta	RBH AFTA	1191	44.000.000	44.000.000	0
PN Sleman	Yayasan Bijak Aryasatya Gantari	2002	36.000.000	36.000.000	0
PN Bantul	LBH Sejati	267	36.000.000	36.000.000	0
PN Wates	Adikarta Law Firm	360	36.000.000	35.200.000	800.000
PN Wonosari	LBH Al Kautsar	295	44.000.000	44.000.000	0
Jumlah		4415	196.000.000	195.200.000	800.000

Tabel 2.22 : Statistik Posbakum

Pengadilan Negeri se Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun 2024

Pos Bantuan Hukum merupakan layanan yang dibentuk oleh setiap Pengadilan Tingkat Pertama untuk memberikan layanan hukum berupa Informasi, Konsultasi, dan Advis Hukum yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu. Lembaga Bantuan Hukum sebelumnya telah mengadakan MoU (*Memorandum of Understanding*) ini mengirimkan dan menempatkan personilnya untuk melakukan piket pelayanan di ruang yang telah disediakan oleh Pengadilan Negeri.

Menurut SEMA Nomor: 10 Tahun 2010, Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Umum diartikan sebagai ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum.

Ruang Posbakum digunakan untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat. Posbakum diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak tahu mengenai masalah hukum dan tidak mampu membayar pengacara untuk menyelesaikan persoalan hukum mereka.

Kegiatan yang telah dilaksanakan:

1. Konsultasi
2. Pembuatan Dokumen Hukum
3. Pendampingan persidangan

Kendala yang dihadapi :

1. Resiko Penyalahgunaan wewenang (sebagai lapak menjual jasa)
2. Resiko terhadap penyuaipan

Langkah antisipasi dan penyelesaian :

1. Pembuatan Pakta Integritas semua petugas posbakum
2. *Voice Warning System* anti penyuaipan dan anti gratifikasi
3. Banner / Informasi Mekanisme Pengaduan
4. Monitoring tiap bulan oleh hakim pengawas

2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu

Sidang Keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan. Sidang keliling ini dimaksudkan untuk memberikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil yang menghadapi masalah ongkos transportasi dari dan ke pengadilan.

Pada tahun 2024 yang melaksanakan sidang keliling yaitu di Pengadilan Negeri Sleman sebanyak 11 persidangan, Pengadilan Negeri Wates sebanyak 2 persidangan, dan di Pengadilan Negeri Wonosari sebanyak 7 persidangan.

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Satuan Kerja	Jumlah Perkara	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
PN Yogyakarta	7	2.010.000	585.000	1.425.000
PN Sleman	4	2.100.000	280.000	1.820.000
PN Bantul	2	2.010.000	850.000	1.160.000
PN Wates	2	2.732.000	1.540.000	1.192.000
PN Wonosari	34	3.350.000	3.350.000	0
Jumlah	49	12.202.000	6.605.000	5.597.000

**Tabel 2.23 : Statistik Prodeo Pengadilan Negeri
pada Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun 2024**

Prodeo adalah proses berperkara di Pengadilan secara Cuma-Cuma atau gratis. Pada tahun 2024 seluruh Pengadilan se Wilayah D.I. Yogyakarta mendapatkan alokasi anggaran untuk menangani perkara prodeo.

Bahwa dalam tahun 2024 masih adanya Pengadilan Negeri se-Wilayah D.I.Yogyakarta yang mendapatkan alokasi anggaran untuk menangani perkara prodeo, akan tetapi realisasi anggaran tersebut tidak dapat terserap secara maksimal (anggaran habis) dikarenakan sebagian besar karakter masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri se Wilayah D.I.Yogyakarta masih mampu untuk menanggung biaya panjar perkara.



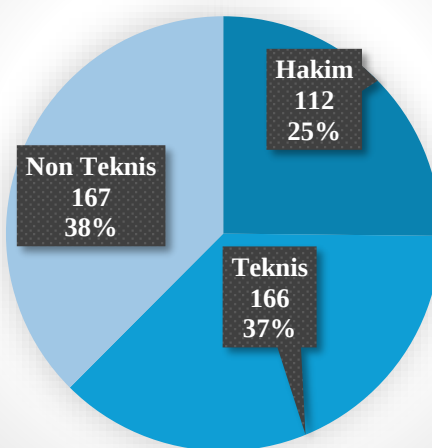


SUMBER DAYA MANUSIA

BAB III

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur yang menentukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan. Dengan beban kerja yang ada dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik dari segi jumlah, pendidikan dan kompetensi. Adapun keadaan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Grafik 3.1 : Rekapitulasi Jumlah Sumber Daya Manusia pada Peradilan Umum di Wilayah DI. Yogyakarta

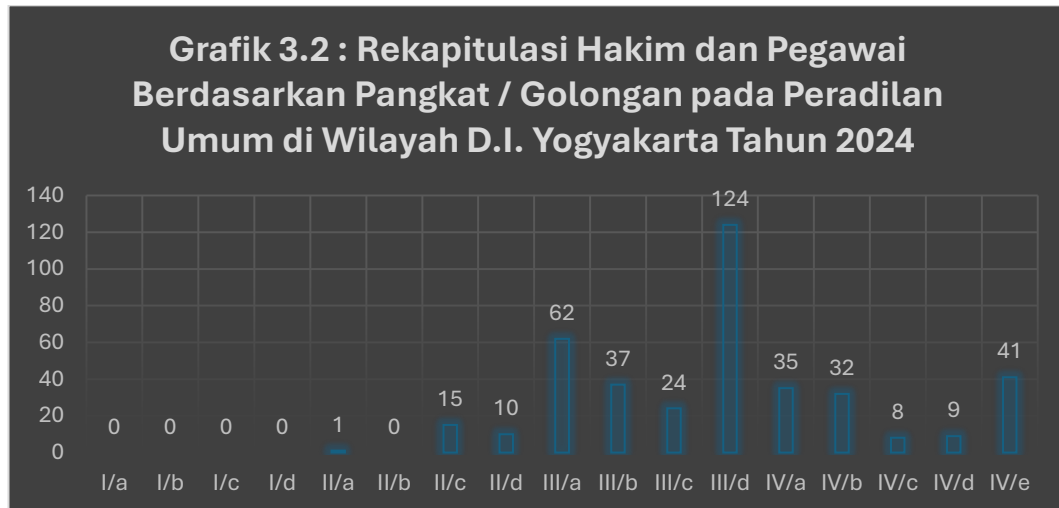


Dari grafik diatas dapat digambarkan bahwa keadaan Sumber Daya Manusia secara keseluruhan pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta secara terperinci adalah sebagai berikut:

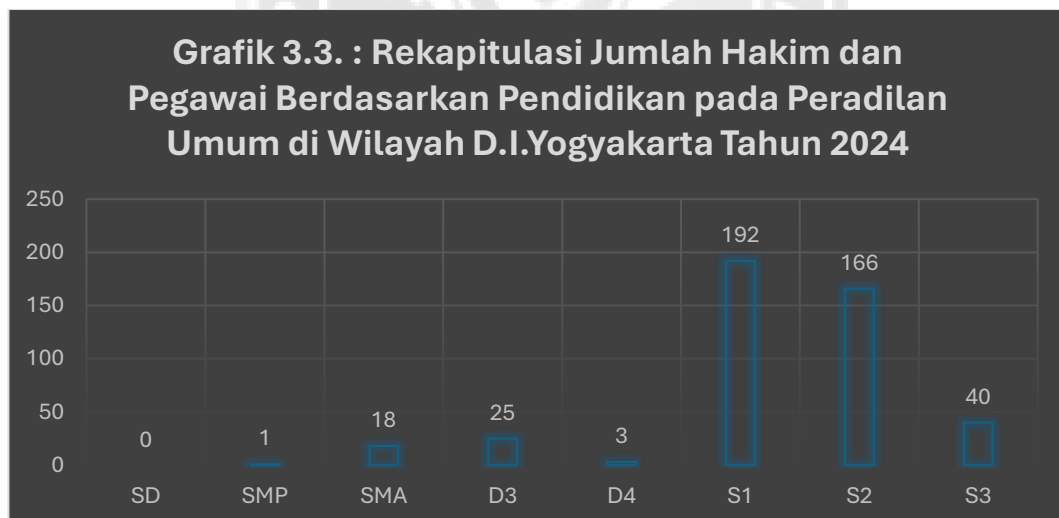
No	Satuan Kerja	Tipe/ Kelas	Hakim						Teknis					Non Teknis					Jumlah
			Ketua	Wakil Ketua	Hakim	Hakim Ad Hoc Tipikor	Hakim Ad Hoc PHI	Hakim Yustisial	Panitera	Panitera Muda	Panitera Pengganti	Jurusita	Jurusita Pengganti	Sekretaris	Ka Bag	Ka Sub Bag	Fungsional	Pelaksana	
1	PT Yogyakarta	B	1	1	37	3	0	5	0	4	27	0	0	1	2	4	10	23	118
2	PN Yogyakarta	IA	1	1	20	2	4	0	1	5	27	6	5	1	0	3	2	23	101
3	PN Sleman	IA	1	1	13	0	0	0	1	3	19	5	4	1	0	3	4	21	76
4	PN Bantul	IB	1	1	7				1	3	15	4	3	1		3	4	22	65
5	PN Wates	IB	1	1	5	0	0	0	1	2	6	4	5	1	0	3	2	19	50
6	PN Wonosari	II	1	1	4	0	0	0	1	2	9	1	2	1	0	3	2	8	35
Jumlah			6	6	86	5	4	5	5	19	103	20	19	6	2	19	24	116	445

Tabel 3.1:
Rekapitulasi Jumlah Sumber Daya Manusia pada Peradilan Umum di Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun 2024

Secara lebih terperinci, keadaan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta berdasarkan Pangkat / Golongan dan Pendidikan adalah sebagai berikut :



Grafik 3.2 : Rekapitulasi Hakim dan Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan pada Peradilan Umum di Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun 2024



Grafik 3.3.: Rekapitulasi Jumlah Hakim dan Pegawai Berdasarkan Pendidikan pada Peradilan Umum di Wilayah D.I.Yogyakarta Tahun 2024

A. Mutasi

Rekapitulasi mutasi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Satuan Kerja	Tipe/ Kelas	Mutasi Masuk				Mutasi Keluar			
			Hakim	Teknis	Non Teknis	Jumlah	Hakim	Teknis	Non Teknis	Jumlah
1	PT Yogyakarta	B	18	13	3	34	1	0	0	1
2	PN Yogyakarta	IA	14	7	12	33	7	4	2	13
3	PN Sleman	IA	0	2	15	17	5	2	3	10
4	PN Bantul	IB	5	3	14	22	3	5	3	11
5	PN Wates	IB	3	7	13	23	4	8	4	16
6	PN Wonosari	II	4	2	1	7	4	3	1	8
Jumlah			44	34	58	136	24	22	13	59

Tabel 3.2 : Rekapitulasi Mutasi Hakim dan Pegawai Tahun 2024

B. Promosi

Rekapitulasi promosi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Satuan Kerja	Tipe/ Kelas	Promosi Sebagai								Jumlah	
			Ketua	Wakil Ketua	Panitera	Sekretaris	Ka Bag	PanMud	Ka Sub Bag	PP		JF
1	PT Yogyakarta	B	1	0	1	2	0	0	0	1	0	5
2	PN Yogyakarta	IA	0	4	0	0	0	1	2	0	1	8
3	PN Sleman	IA	0	1	0	1	0	2	1	0	1	6
4	PN Bantul	IB	1	1	1	1		2	1		1	8
5	PN Wates	IB	1	1	1	0	0	2	0	2	0	7
6	PN Wonosari	II	1	1	0	0	0	3	0	0	3	8
Jumlah			4	8	3	4	0	10	4	3	6	42

Tabel 3.3 : Rekapitulasi Promosi Hakim dan Pegawai Tahun 2024

C. Pensiun

Rekapitulasi pensiun Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Satuan Kerja	Tipe/ Kelas	Batas Usia Pensiun	Meninggal	Pensiun Dini	Jumlah
1	PT Yogyakarta	B	22	2	0	24
2	PN Yogyakarta	IA	4	0	0	4
3	PN Sleman	IA	2	0	0	2
4	PN Bantul	IB	1	0	0	1
5	PN Wates	IB	1	2	0	3
6	PN Wonosari	II	4	0	0	4
Jumlah			34	4	0	38

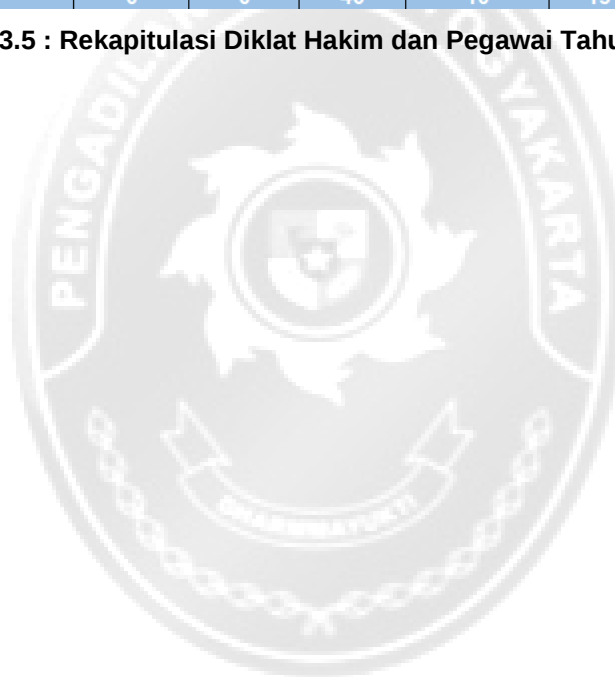
Tabel 3.4 : Rekapitulasi Pensiun Hakim dan Pegawai Tahun 2024

D. Diklat

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I.Yogyakarta Tahun 2024 terdiri dari diklat yang dilaksanakan secara daring maupun secara langsung. Adapun rekapitulasinya adalah sebagai berikut:

No	Satuan Kerja	Tipe/ Kelas	Jenis Diklat						Jumlah
			Diklat PKA	Diklat PKP	Diklat Teknis	Diklat Fungsional	Diklat Pra Jabatan	Diklat Lain- Lain	
1	PT Yogyakarta	B	0	0	2	1	2	5	10
2	PN Yogyakarta	IA	0	0	14	6	3	74	97
3	PN Sleman	IA	0	0	7	3	4	14	28
4	PN Bantul	IB	0	0	14	0	2	8	24
5	PN Wates	IB	0	0	5	0	3	8	16
6	PN Wonoasari	II	0	0	4	0	1	5	10
Jumlah			0	0	46	10	15	114	185

Tabel 3.5 : Rekapitulasi Diklat Hakim dan Pegawai Tahun 2024





PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA

BAB IV

A. Pengelolaan Keuangan

Anggaran Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2024 tertuang dalam dua Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 yaitu sebagai berikut:

- DIPA Badan Urusan Administrasi (01) dengan nomor SP DIPA-005.01.2.400342/2024 dengan program kerja yaitu dukungan manajemen.**

Pada tahun 2024 Pengadilan Tinggi Yogyakarta mendapat alokasi anggaran sebesar Rp37.234.233.000 (tiga puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). DIPA BUA terdiri atas belanja pegawai dan belanja barang. Nilai pagu belanja pegawai tahun 2024 sebesar Rp34.225.003.000 yang dipergunakan untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai dengan nilai realisasi sebesar Rp34.128.189.593. Sedangkan nilai pagu belanja barang untuk tahun 2024 sebesar Rp3.009.230.000 yang digunakan untuk membiayai operasional kantor dan telah terealisasi sebesar Rp2.965.127.740. Pada tahun 2024, realisasi DIPA BUA mencapai 99,62% dengan rincian sebagai berikut:

JENIS BELANJA	TAHUN 2024			TAHUN 2023			PERUBAHAN REALISASI
	PAGU DIPA	REALISASI		PAGU DIPA	REALISASI		
	Rp	Rp	%	Rp	Rp	%	
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA							
Belanja Pegawai	34.225.003.000	34.128.189.593	99,72	29.214.768.000	29.189.463.556	99,91	(0,20)
Belanja Barang	3.009.230.000	2.965.127.740	98,53	2.936.691.000	2.927.621.962	99,69	(1,16)
Belanja Modal	-	-	-	537.800.000	537.490.000	99,94	(99,94)
Jumlah DIPA BUA	37.234.233.000	37.093.317.333	99,62	32.689.259.000	32.654.575.518	99,89	(0,27)

Tabel 4.1 Realisasi Anggaran DIPA BUA PT Yogyakarta

Tahun Anggaran 2024 dan 2023

- DIPA Ditjen Badan Peradilan Umum (03) dengan nomor SP DIPA-005.03.2.400343/2024 dengan satu program kerja yaitu Penegakan dan Pelayanan Hukum**

Pada tahun 2024 Pengadilan Tinggi Yogyakarta mendapat alokasi anggaran sebesar Rp162.560.000 (seratus enam puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). Pada tahun 2024, realisasi DIPA Badilum mencapai 99,08% dengan rincian sebagai berikut:



JENIS BELANJA	TAHUN 2024			TAHUN 2023			PERUBAHAN REALISASI
	PAGU DIPA	REALISASI		PAGU DIPA	REALISASI		
	Rp	Rp	%	Rp	Rp	%	
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA							
Belanja Barang	162.560.000	161.066.050	99,08	172.560.000	170.922.775	99,05	0,03
Jumlah DIPA Badilum	162.560.000	161.066.050	99,08	172.560.000	170.922.775	99,05	0,03

**Tabel 4.2 Realisasi Anggaran DIPA Badilum PT Yogyakarta
Tahun Anggaran 2024 dan 2023**

Anggaran tersebut digunakan untuk pembinaan teknis dan administrasi terhadap satuan kerja dibawah Pengadilan Tinggi Yogyakarta serta untuk percepatan penyelesaian perkara.

Sebagai tingkat banding, Pengadilan Tinggi Yogyakarta memiliki lima satker dibawahnya. Berikut merupakan rekapitulasi pengelolaan keuangan pada masing-masing satuan kerja:

a. Pengadilan Negeri Yogyakarta

JENIS BELANJA	TAHUN 2024			TAHUN 2023			PERUBAHAN REALISASI
	PAGU DIPA	REALISASI		PAGU DIPA	REALISASI		
	Rp	Rp	%	Rp	Rp	%	
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA							
Bel. Pegawai	14.398.428.000	14.177.747.841	98,47	13.107.245.000	12.953.210.699	98,82	(0,36)
Bel. Barang Operasional	2.697.737.000	2.684.865.130	99,52	2.601.132.000	2.583.020.315	99,30	0,22
Bel. Barang Non Operasional	-	-	-	6.963.000	6.820.000	97,95	(97,95)
Bel. Modal	351.950.000	351.948.000	100,00	15.000.000	15.000.000	100,00	(0,00)
Jumlah DIPA BUA	17.448.115.000	17.214.560.971	98,66	15.730.340.000	15.558.051.014	98,90	(0,24)

JENIS BELANJA	TAHUN 2024				TAHUN 2023				PERUBAHAN REALISASI		
	PAGU DIPA		REALISASI		PAGU DIPA		REALISASI				
	Rp		Rp	%	Rp		Rp	%			
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA											
Bel. Barang		297.423.000		292.128.000	98,22		290.176.000		286.529.240	98,74	(0,52)
Jumlah DIPA Badilum		297.423.000		292.128.000	98,22		290.176.000		286.529.240	98,74	(0,52)

b. Pengadilan Negeri Sleman

JENIS BELANJA	TAHUN 2024			TAHUN 2023			PERUBAHAN REALISASI
	PAGU DIPA	REALISASI		PAGU DIPA	REALISASI		
	Rp	Rp	%	Rp	Rp	%	
PENGADILAN NEGERI SLEMAN							
Bel. Pegawai	11.870.259.000	11.665.650.829	98,28	12.632.144.000	12.344.048.018	97,72	0,56
Bel. Barang Operasional	1.765.992.000	1.765.532.160	99,97	1.689.108.000	1.673.893.203	99,10	0,87
Bel. Barang Non Operasional	-	-	-	6.963.000	5.982.000	85,91	(85,91)
Bel. Modal	-	-	-	455.700.000	452.581.356	99,32	(99,32)
Jumlah DIPA BUA	13.636.251.000	13.431.182.989	98,50	14.783.915.000	14.476.504.577	97,92	0,58

JENIS BELANJA	TAHUN 2024			TAHUN 2023			PERUBAHAN REALISASI
	PAGU DIPA	REALISASI		PAGU DIPA	REALISASI		
	Rp	Rp	%	Rp	Rp	%	
PENGADILAN NEGERI SLEMAN							
Bel. Barang	317.010.000	314.468.548	99,20	310.200.000	309.574.425	99,80	(0,60)
Jumlah DIPA Badilum	317.010.000	314.468.548	99,20	310.200.000	309.574.425	99,80	(0,60)



c. Pengadilan Negeri Bantul

JENIS BELANJA	TAHUN 2024			TAHUN 2023			PERUBAHAN REALISASI
	PAGU DIPA	REALISASI		PAGU DIPA	REALISASI		
	Rp	Rp	%	Rp	Rp	%	
PENGADILAN NEGERI BANTUL							
Bel. Pegawai	6.086.987.000	6.034.908.723	99,14	5.448.991.000	5.349.065.553	98,17	0,98
Bel. Barang Operasional	1.263.230.000	1.251.472.795	99,07	1.299.114.000	1.298.434.311	99,95	(0,88)
Bel. Barang Non Operasional	-	-	-	11.605.000	11.605.000	100,00	(100,00)
Bel. Modal	49.000.000	48.853.290	99,70	28.000.000	28.000.000	100,00	(0,30)
Jumlah DIPA BUA	7.399.217.000	7.335.234.808	99,14	6.787.710.000	6.687.104.864	98,52	0,62

JENIS BELANJA	TAHUN 2024			TAHUN 2023			PERUBAHAN REALISASI
	PAGU DIPA	REALISASI		PAGU DIPA	REALISASI		
	Rp	Rp	%	Rp	Rp	%	
PENGADILAN NEGERI BANTUL							
Bel. Barang	139.510.000	137.669.200	98,68	132.700.000	132.601.460	99,93	(1,25)
Jumlah DIPA Badilum	139.510.000	137.669.200	98,68	132.700.000	132.601.460	99,93	(1,25)

d. Pengadilan Negeri Wates

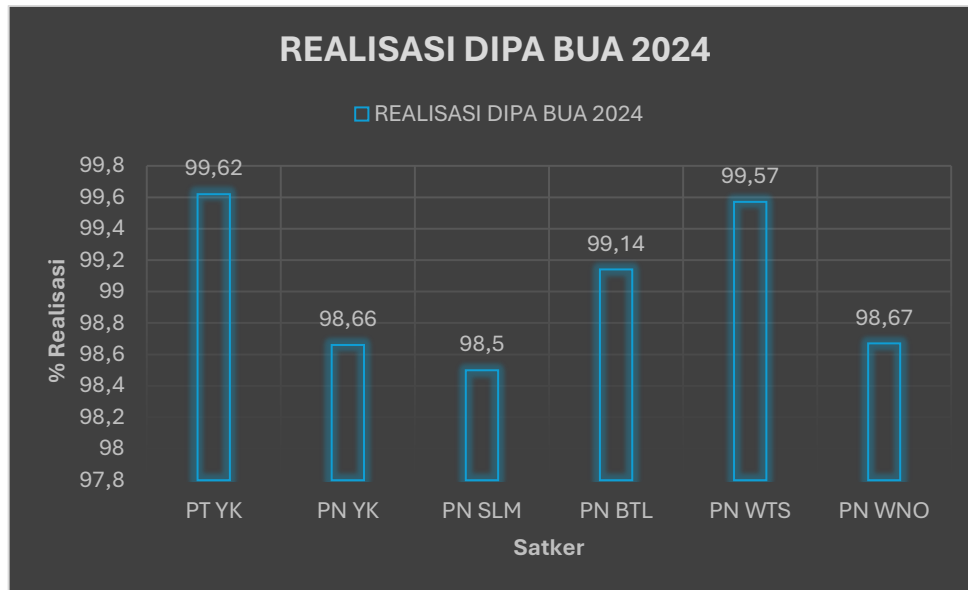
JENIS BELANJA	TAHUN 2024			TAHUN 2023			PERUBAHAN REALISASI
	PAGU DIPA	REALISASI		PAGU DIPA	REALISASI		
	Rp	Rp	%	Rp	Rp	%	
PENGADILAN NEGERI WATES							
Bel. Pegawai	5.657.155.000	5.631.284.454	99,54	4.985.394.000	4.932.917.765	98,95	0,60
Bel. Barang Operasional	1.162.528.000	1.158.696.791	99,67	1.123.411.000	1.122.805.978	99,95	(0,28)
Bel. Barang Non Operasional	-	-	-	9.284.000	9.283.120	99,99	(99,99)
Bel. Modal	145.000.000	145.000.000	0,00	-	-	-	0,00
Jumlah DIPA BUA	6.964.683.000	6.934.981.245	99,57	6.118.089.000	6.065.006.863	99,13	0,44

JENIS BELANJA	TAHUN 2024			TAHUN 2023			PERUBAHAN REALISASI
	PAGU DIPA	REALISASI		PAGU DIPA	REALISASI		
	Rp	Rp	%	Rp	Rp	%	
PENGADILAN NEGERI WATES							
Bel. Barang	121.532.000	119.437.500	98,28	114.000.000	111.804.200	98,07	0,20
Jumlah DIPA Badilum	121.532.000	119.437.500	98,28	114.000.000	111.804.200	98,07	0,20

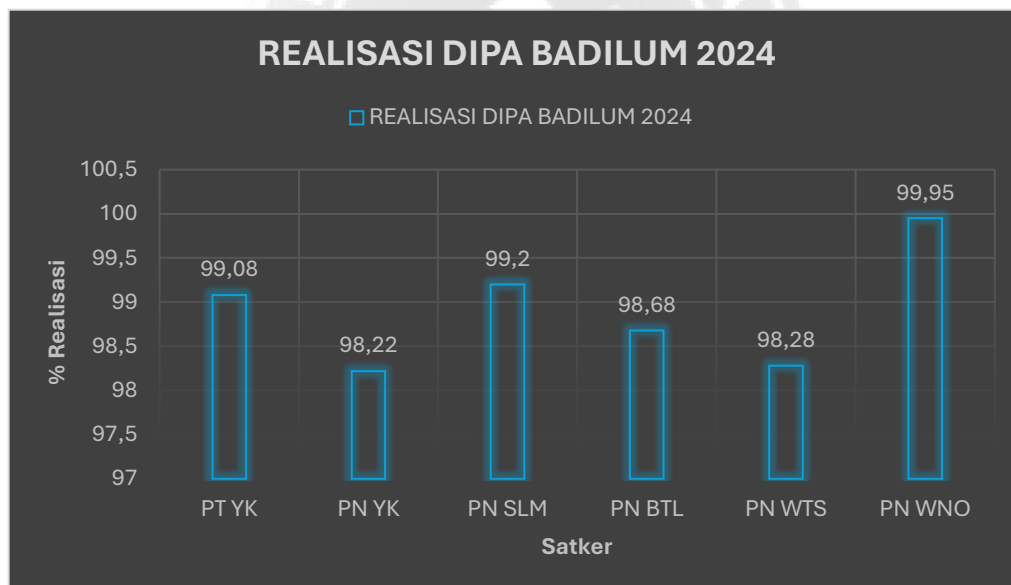
e. Pengadilan Negeri Wonosari

JENIS BELANJA	TAHUN 2024			TAHUN 2023			PERUBAHAN REALISASI
	PAGU DIPA	REALISASI		PAGU DIPA	REALISASI		
	Rp	Rp	%	Rp	Rp	%	
PENGADILAN NEGERI WONOSARI							
Bel. Pegawai	3.702.364.000	3.637.587.952	98,25	3.745.113.000	3.627.331.866	96,86	1,40
Bel. Barang Operasional	1.219.495.000	1.218.963.078	99,96	1.230.379.000	1.226.425.492	99,68	0,28
Bel. Barang Non Operasional	-	-	-	4.642.000	4.642.000	100,00	(100,00)
Bel. Modal	-	-	-	110.000.000	109.404.700	99,46	(99,46)
Jumlah DIPA BUA	4.921.859.000	4.856.551.030	98,67	5.090.134.000	4.967.804.058	97,60	1,08

JENIS BELANJA	TAHUN 2024				TAHUN 2023				PERUBAHAN REALISASI
	PAGU DIPA	REALISASI			PAGU DIPA	REALISASI			
	Rp	Rp	%		Rp	Rp	%		
PENGADILAN NEGERI WONOSARI									
Bel. Barang	108.421.000	108.371.345	99,95		101.886.000	101.466.225	99,59		0,37
Jumlah DIPA Badilum	108.421.000	108.371.345	99,95		101.886.000	101.466.225	99,59		0,37



Grafik 4.1 Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA BUA Tahun 2024 pada Satuan Kerja Wilayah Yogyakarta



Grafik 4.2 Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA Badilum Tahun 2024 pada Satuan Kerja Wilayah Yogyakarta

3. Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

1. DIPA Badan Urusan Administrasi (01) dengan nomor SP DIPA-005.01.2.400342/2024 dengan program kerja yaitu dukungan manajemen. Realisasi target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2024 yaitu sebesar Rp30.680.000 (tiga puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan target sebesar Rp22.876.000 (dua puluh dua juta delapan ratus

tujuh puluh enam ribu rupiah). realisasi DIPA BUA mencapai 134,12% dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis PNB	Tahun 2024			Tahun 2023		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	7.377.000	-	-	-	-
2	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	22.876.000	23.303.800	101,87	22.431.000	13.269.075	59,16
3	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-	-	243.950	-
4	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-	-	1.620.000	-
TOTAL		22.876.000	30.680.800	134,12	22.431.000	13.269.075	59,16

**Tabel 4.3 Realisasi Target PNB DIPA BUA PT Yogyakarta
Tahun Anggaran 2024 dan 2023**

- DIPA Ditjen Badan Peradilan Umum (03) dengan nomor SP DIPA-005.03.2.400343/2024 dengan satu program kerja yaitu Penegakan dan Pelayanan Hukum. Realisasi target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2024 yaitu sebesar Rp3.160.000 (tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan target sebesar Rp3.630.000 (tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah). realisasi DIPA BADILUM mencapai 87,05% dengan rincian sebagai berikut:

NO	Jenis PNB	Tahun 2024			Tahun 2023		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	3.630.000	3.160.000	87,05	3.000.000	3.110.000	103,67
TOTAL		3.630.000	3.160.000	87,05	3.000.000	3.110.000	103,67

**Tabel 4.4 Realisasi Target PNB DIPA BADILUM PT Yogyakarta
Tahun Anggaran 2024 dan 2023**

Berikut ini merupakan rekapitulasi pengelolaan PNB pada masing-masing satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta:



1. Pengadilan Negeri Yogyakarta

Target PNBPDIPA BUA

NO	DIPA SATKER	Tahun 2024			Tahun 2023		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	19.970.000	64.913.000	325,05	39.006.000	26.520.000	67,99
TOTAL		19.970.000	64.913.000	325,05	132.220.000	26.520.000	20,06

Target PNBPDIPA BADILUM

NO	DIPA SATKER	Tahun 2024			Tahun 2023		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	90.000	160.000	177,78	-	5.030.000	-
2	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	7.000.000	10.880.000	155,43	7.630.000	2.880.000	37,75
3	Pendapatan Ongkos Perkara	23.700.000	28.390.000	119,79	19.785.000	30.625.000	154,79
4	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	64.477.000	80.352.500	124,62	65.799.000	75.285.700	114,42
TOTAL		95.267.000	119.782.500	125,73	93.214.000	113.820.700	122,11

2. Pengadilan Negeri Sleman

Target PNBPDIPA BUA

NO	DIPA SATKER	Tahun 2024			Tahun 2023		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	16.816.000	33.016.400	196,34	25.114.000	30.724.320	122,34
2	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	185.000	-	-	-	-
TOTAL		16.816.000	33.201.400	197,44	25.114.000	30.724.320	122,34

Target PNBPDIPA BADILUM

NO	DIPA SATKER	Tahun 2024			Tahun 2023		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	490.000	460.000	93,88	780.000	340.000	100,00
2	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	13.070.000	16.620.000	127,16	12.310.000	17.240.000	140,05
3	Pendapatan Ongkos Perkara	38.055.000	47.110.000	123,79	33.060.000	53.825.000	162,81
4	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	162.896.000	119.212.700	73,18	135.654.000	146.356.450	107,89
TOTAL		231.511.000	183.402.700	85,50	181.804.000	217.761.450	119,78



3. Pengadilan Negeri Bantul

Target PNBPD DIPA BUA							
NO	DIPA SATKER	Tahun 2024			Tahun 2023		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		15.099.999	-			-
2	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	8.140.000	8.006.600	98,36	5.729.000	5.733.906	100,09
3	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	111.000	-		84	-
TOTAL		8.140.000	23.217.599	285,23	5.729.000	5.733.990	100,09
Target PNBPD DIPA BADILUM							
NO	DIPA SATKER	Tahun 2024			Tahun 2023		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	100.000	120.000	120,00	110.000	110.000	100,00
2	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	4.340.000	1.430.000	32,95	4.690.000	2.690.000	57,36
3	Pendapatan Ongkos Perkara	11.235.000	19.620.000	174,63	13.745.000	11.645.000	84,72
4	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	36.358.000	52.236.000	143,67	33.604.000	39.550.000	117,69
TOTAL		52.033.000	73.406.000	141,08	52.149.000	53.995.000	103,54

4. Pengadilan Negeri Wates

Target PNBPD DIPA BUA

NO	DIPA SATKER	Tahun 2024			Tahun 2023		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	20.235.000	14.326.636	70,80	33.317.000	34.681.296	104,09
TOTAL		20.235.000	14.326.636	70,80	33.317.000	34.681.296	104,09

Target PNBPD DIPA BADILUM

NO	DIPA SATKER	Tahun 2024			Tahun 2023		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	50.000	40.000	80,00	10.000	20.000	100,00
2	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	4.300.000	5.870.000	136,51	1.100.000	3.920.000	356,36
3	Pendapatan Ongkos Perkara	13.815.000	20.440.000	147,96	5.825.000	16.695.000	286,61
4	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	15.749.000	26.823.500	170,32	12.322.000	26.683.500	216,55
TOTAL		33.914.000	53.173.500	156,79	135.654.000	47.318.500	34,88

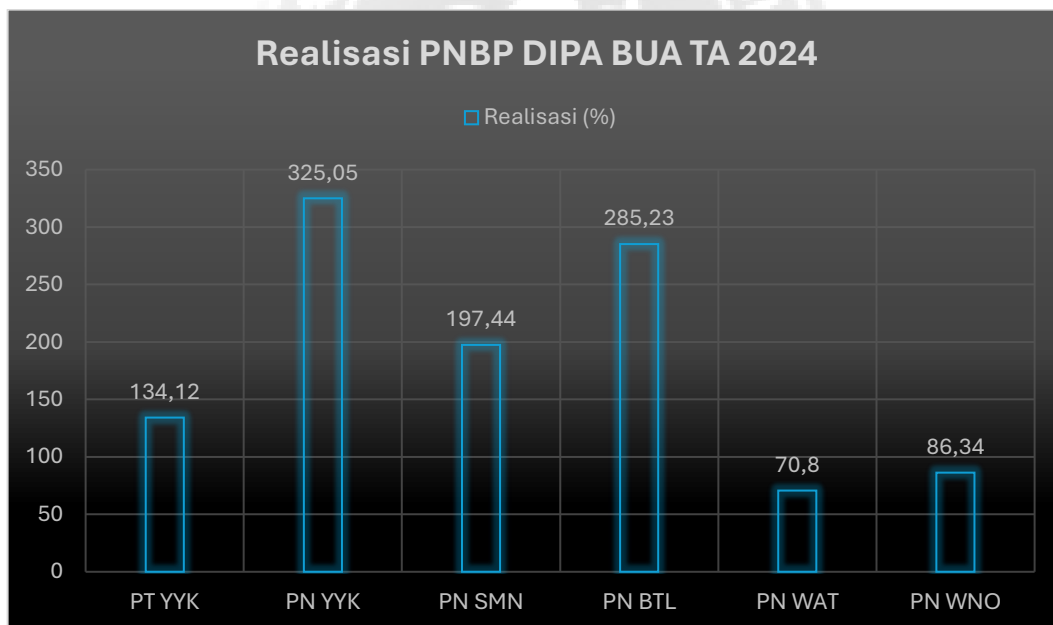
5. Pengadilan Negeri Wonosari

Target PNBP DIPA BUA

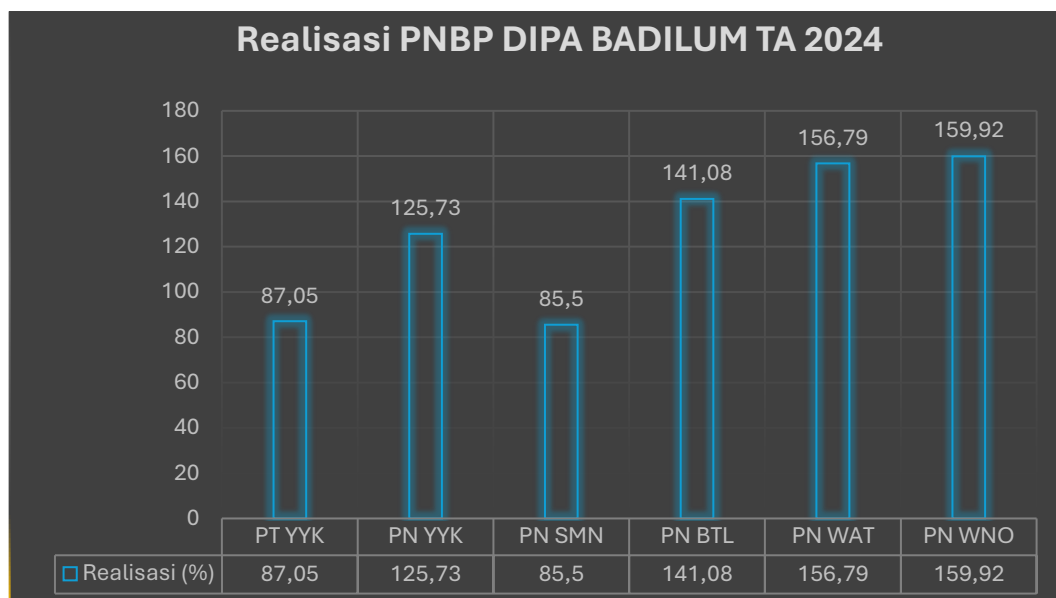
NO	DIPA SATKER	Tahun 2024			Tahun 2023		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	8.270.000	7.139.910	86,34	6.816.000	6.692.930	98,19
TOTAL		8.270.000	7.139.910	86,34	6.816.000	6.692.930	98,19

Target PNBP DIPA BADILUM

NO	DIPA SATKER	Tahun 2024			Tahun 2023		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	540.000	5.400.000	1000	1.700.000	2.570.000	151,18
3	Pendapatan Ongkos Perkara	9.970.000	15.225.000	152,71	9.655.000	10.625.000	110,05
4	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	19.163.000	26.829.100	140,00	34.805.000	27.294.048	78,42
TOTAL		29.673.000	47.454.100	159,92	46.160.000	40.489.048	87,71



Grafik 4.2
Perbandingan Realisasi PNBP DIPA BUA
Tahun 2024 pada Satuan Kerja Wilayah Yogyakarta



**Grafik 4.3 Perbandingan Realisasi PNPB DIPA BADILUM Tahun 2024
pada Satuan Kerja Wilayah Yogyakarta**

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Sarana dan Prasarana Tanah, Gedung Dan Kendaraan

a. Keadaan Sarana dan Prasarana Tanah, Gedung dan Kendaraan

Seluruh pengadilan di wilayah D.I. Yogyakarta menempati tanah dan bangunan sendiri dimana status kepemilikan sudah atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dibawah ini adalah daftar luas tanah dan bangunan gedung pengadilan di Wilayah DI. Yogyakarta :

1. Tanah dan Bangunan Gedung

No	Satker	Luas Tanah (m ²)	Bangunan (m ²)	Peruntukan	Pemegang Hak Atas Tanah
1	PT Yogyakarta	5.086	2.623	Gedung Kantor	Pemerintah RI Cq. MA RI
			545	Gedung Kantor, Perpustakaan dan Arsip	
2	PN Yogyakarta	7.385	3.610	Gedung Kantor	Pemerintah RI Cq. MA RI
		3.163	1.900	Gedung Tipikor dan PHI	Pemerintah RI Cq. MA RI
3	PN Sleman	2.730	3.195	Gedung Kantor	Pemerintah RI Cq. MA RI
4	PN Bantul	2.759	2.284	Gedung Kantor	Pemerintah RI Cq. MA RI

No	Satker	Luas Tanah (m ²)	Bangunan (m ²)	Peruntukan	Pemegang Hak Atas Tanah
5	PN Wates	2.850	2.264	Gedung Kantor	Pemerintah RI Cq. MA RI
6	PN Wonosari	2.891	2.290	Gedung Kantor	Pemerintah RI Cq. MA RI

Tabel 4.13 : Daftar Tanah dan Bangunan Gedung Tahun 2024

2. Rumah Negara

No	Satker	Jumlah	Kondisi			Pemegang Hak Atas Tanah
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat	
1	PT Yogyakarta	10	8	2	-	Pemerintah RI Cq. MA RI
		4	4	-	-	Sultan Ground
2	PN Yogyakarta	19	8	11	-	Pemerintah RI Cq. MA RI
3	PN Sleman	12	11	0	1	Pemerintah RI Cq. MA RI
4	PN Bantul	8	6	2	-	Pemerintah RI Cq. MA RI
5	PN Wates	8	8	-	-	Pemerintah RI Cq. MA RI
6	PN Wonosari	10	10	-	-	Pemerintah RI Cq. MA RI

Tabel 4.14 : Daftar Rumah Negara Tahun 2024

3. Kendaraan Dinas Roda 2

No	Satker	Merk	Type	Jumlah	Kondisi
1	PT Yogyakarta	Honda	Supra100	4	Baik
		Honda	Supra 125	4	Baik
		Honda	GLIII	3	Baik
		Honda	NF125	1	Baik
2	PN Yogyakarta	Honda	Supra 125	3	Baik
		Honda	Honda GL. III Sport	1	Rusak Berat
		Honda	Honda Supra Fit X	1	Baik
		Honda	Honda Supra Fit	4	Baik
		Honda	Honda GP III Mega Pro	2	Baik
		Honda	Honda NF 100 D	1	Rusak Berat
3	PN Sleman	Honda	Vario	1	Baik
4	PN Bantul	Honda	Supra X125	6	Baik
		Honda	Mega Pro	2	Baik

No	Satker	Merk	Type	Jumlah	Kondisi
5	PN Wates	Honda	GL	1	Rusak Ringan
		Honda	NF100	2	Baik
		Honda	GL Pro III	2	Baik
		Honda	NF 125 SD	1	Baik
		Suzuki	Smash	4	Baik
		Honda	Supra 125	2	Baik
		Honda	Revo	3	Baik
		Kawasaki	KLX BF	2	Baik
		Honda	CBR 150	2	Baik
		Honda	Vario 110	2	Baik
6	PN Wonosari	Honda	GLP III	5	Rusak Berat
		Honda	Supra X125	2	Rusak Ringan

Tabel 4.15 : Daftar Kendaraan Roda 2 Tahun 2024

4. Kendaraan Dinas Roda 4

No	Satker	Merk	Type	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	PT Yogyakarta	Toyota	Altis	1	Baik	
		Toyota	Vios	1	Baik	
		Toyota	Innova	1	Baik	
		Toyota	Camry	1	Baik	Sewa
		Toyota	Pajero	1	Baik	Sewa
		Toyota	Hiace	1	Baik	Sewa
		Toyota	Innova Zenix	3	Baik	Sewa
		Mitsubishi	Xpander	1	Baik	Sewa
2	PN Yogyakarta	Toyota	Altis	1	Baik	Sewa MA
		Toyota	Altis	1	Rusak Berat	
		Toyota	Vios	2	Baik	
		Toyota	Innova G	1	Baik	
		Toyota	Innova V	1	Baik	
		Toyota	Kijang KF 40	1	Rusak berat	
3	PN Sleman	Toyota	Innova	2	Baik	
		Toyota	Innova	1	Baik	Pinjam Pakai dari Pemda Sleman
4	PN Wates	Toyota	Innova	1	Baik	

No	Satker	Merk	Type	Jumlah	Kondisi	Keterangan
		Toyota	Kijang LX	1	Rusak Ringan	
		Isuzu	Panther	1	Baik	
		Toyota	Kijang Innova Venturer 2.0 A/T	1	Baik	
		Toyota	All New Rush TRD A/T	1	Baik	
		Toyota	Zenix	1	Baik	Sewa
5	PN Bantul	Toyota	Innova	2	Baik	
		Toyota	Avanza	1	Baik	
		Toyota	Altis	1	Baik	
		Toyota	Zenix	1	Baik	Sewa
6	PN Wonosari	Toyota	Innova	3	Baik	1 unit Pinjam Pakai dari Pemda
		Toyota	Avanza	1	Baik	

Tabel 4.16 : Daftar Kendaraan Dinas Roda 4 Tahun 2024

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung

No	Satker	Jenis Pengadaan
1	PT Yogyakarta	-
2	PN Yogyakarta	-
3	PN Sleman	-
4	PN Bantul	-
5	PN Wates	-
6	PN Wonosari	-

Tabel 4.17 : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Tahun 2024

c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung

No	Satker	Jenis pemeliharaan	Keterangan
1.	PT Yogyakarta	1. Pemeliharaan Ruang Sidang Utama 2. Pemeliharaan Dag Genset 3. Pemeliharaan Kamar Mandi Sekretaris 4. Pemeliharaan Ruang Tamu Terbuka 5. Pemeliharaan Toilet Pegawai Lantai 1 6. Pemeliharaan Selasar Toilet Pegawai Lantai 1 7. Pemeliharaan Tritisan Belakang Kantor 8. Pemeliharaan Kanopi Belakang Sekretaris 9. Pemeliharaan Rumah Dinas	
2	PN Yogyakarta	1. Pemeliharaan Karpas Ruang Ketua 2. Perbaikan Keramik Ruang Sidang Kartika 3. Perbaikan Toilet Ruang Wakil Ketua 4. Perbaikan Wastafel PTSP 5. Pemasangan ACP dan Nama Akrilik 6. Pemeliharaan Roller Blind Ruang Ketua, Ruang Sub Bagian Kepegawaian Ortala, Ruang Sidang, Wakil Ketua, Panitera 7. Perbaikan Wastafel dan Ruang Alat Disabilitas 8. Pemeliharaan Wallpaper PTSP Gedung Tipikor 9. Pemeliharaan Backdrop PTSP Gedung Tipikor 10. Pemeliharaan Meja PTSP 11. Pemeliharaan Pintu Penutup Tangga dan Kamar Mandi Ketua 12. Pemeliharaan Gedung Tipikor 13. Pemeliharaan Wallpaper Ruang Sidang 14. Pemeliharaan Lapangan Tennis 15. Pemeliharaan Rumah Dinas	
3	PN Sleman	1. Pemeliharaan Saluran air hujan / gorong-gorong 2. Pemeliharaan area drop off 3. Pemeliharaan Pos Jaga 4. Pemeliharaan Ruang tamu pimpinan dan ruang jaksa 5. Pemeliharaan Gudang Gedung Pengadilan Anak 6. pengecatan dinding gedung anak 7. pengecatan paving blok halaman depan gedung 8. Pemeliharaan kanopi area pintu masuk pengunjung samping dan area parkir karyawan 9. Perbaikan keramik area <i>drop zone</i> dan area ruang tamu pimpinan lantai 2 10. Perbaikan pintu masuk utama 11. Pemeliharaan taman depan kantor 12. Pemeliharaan Rumah dinas ketua dan hakim (pengecatan, perbaikan atap, perbaikan kerusakan) 13. Perbaikan AC ruang-ruang sidang, ruang-ruang kerja 14. Perbaikan CCTV 15. Penggantian lampu-lampu penerangan yang mati 16. Pemeliharaan wallpaper ruang sidang dan ruang kerja	Baik
4	PN Bantul	1. Renovasi Atap Kanopi Gedung	

No	Satker	Jenis pemeliharaan	Keterangan
		2. Renovasi Sarana Prasarana Pendukung Disabilitas dan Ruang Kesehatan 3. Renovasi Ramp dan Guiding Block Jalur Disabilitas 4. Pemeliharaan Ruang Kerja 5. Pemasangan Teralis Jendela 6. Renovasi Ruang Sidang Utama 7. Renovasi Identitas Nama Kantor dan Pengecatan Pagar 8. Pengecatan Gedung 9. Pemeliharaan Elektrikal Gedung 10. Perbaikan CCTV	
5	PN Wates	1. Pemeliharaan rutin sarana prasarana ruangan kerja 2. Perawatan rutin kendaraan bermotor	
6	PN Wonosari	1. Perbaikan atap tempat parkir. 2. Perbaikan rolling door ruang arsip umum. 3. Perbaikan bebaturn dan pasang keramik gedung sisi belakang. 4. Pemasangan wallpaper ruang wakil. 6. pemasangan partisi sekat ruang arsip dan perpus. 7. Pengecatan gedung dan pagar kantor. 8. Pemeliharaan rumah dinas. 9. Perbaikan rak arsip perkara	

Tabel 4.18 : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Tahun 2024

d. Penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung

No	Satker	Tanggal	Jenis Barang	Keterangan
1	PT Yogyakarta	-	-	-
2	PN Yogyakarta	-	-	-
3	PN Sleman	-	-	-
4	PN Bantul	5 April 2024	Meubelair	272 item
5	PN Wates	-	-	-
6	PN Wonosari	-	-	-

Tabel 4.19 : Penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung Tahun 2024

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Hal-hal yang dapat menunjang dalam pelaksanaan tugas Pengadilan antara lain adanya sarana dan prasarana fasilitas penunjang yang memadai. Dalam hal ini sarana dan prasarana fasilitas Gedung pada Wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Keadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

No	Nama Barang	Jumlah Sarana dan Prasarana					
		PT Yogyakarta	PN Yogyakarta	PN Sleman	PN Bantul	PN Wates	PN Wonosari
1	Komputer	62	118	68	59	78	52
2	Laptop	27	83	27	31	26	26
3	Infokus/LCD	5	2	5	2	6	2
4	PABX	1	2	1	1	1	3
5	Mesin Ketik	3	10	3	-	1	9
6	Mesin Stensil	1	-	1	-	-	1
7	Mesin Fotokopi	1	2	1	-	1	1
8	AC	66	65	54	28	46	27
9	Faximile	4	5	1	1	1	3
10	Brankas	3	5	4	3	1	2
11	Sound system	8	8	4	2	3	3
12	Mesin Absensi	2	3	2	2	2	2
13	Tabung Pemadam Api	20	1	-	-	5	10
14	CCTV	32	5	2	9	9	2
15	UPS	49	8	12	6	8	10
16	Genset	1	2	1	2	1	1
17	Handy Cam	1	-	1	-	-	-
18	Pesawat telepon	35	2	15	3	2	13
19	Printer	30	49	47	29	50	35
20	Scanner	8	17	11	6	10	4
21	Server	3	3	3	3	3	3
22	Lemari Kayu	26	55	49	34	32	28
23	Lemari Besi	67	25	10	2	6	25
24	Filling Kabinet Kayu	4	-	2	1	-	-
25	Filling Kabinet Besi	45	19	24	27	4	3
26	Buffet	4	8	-	2	-	-
27	Rak	5	67	36	52	17	21
28	Meja Kerja Kayu	134	153	250	125	94	147
29	Kursi Kayu	33	54	128	54	29	48
30	Kursi Besi Metal	300	374	298	225	178	207
31	Sice	29	17	23	11	14	16

No	Nama Barang	Jumlah Sarana dan Prasarana					
		PT Yogyakarta	PN Yogyakarta	PN Sleman	PN Bantul	PN Wates	PN Wonosari
32	Bangku Panjang Kayu	3	60	67	26	21	25
33	Meja Rapat	22	3	1	2	5	-
34	Meja Komputer	23	8	6	5	20	9
35	Meja Resepsionis	2	5	2	1	1	1
37	Kamera	4	2	1	1	1	1
38	HT	5	4	6	-	-	4
39	Sekat	-	7	10	3	3	3
40	Meja Sidang	-	-	6	4	-	3
41	Kursi Hakim	-	-	20	12	-	7
42	Meja Telepon	-	3	10	-	-	2
43	Mesin Hitung	-	1	5	-	-	4
44	Kipas Angin	-	15	33	15	-	10
45	Televisi	6	24	1	3	4	14
46	RIG	1	-	-	-	-	-
47	Kulkas	1	2	-	-	2	-
48	External Hard Disk	3	-	1	-	-	5
49	Hard Disk	2	-	-	-	-	5
50	Anti Virus	-	-	-	-	1	5
51	Access Point	9	9	2	2	-	13
52	Rak Server	1	1	1	1	1	3
53	Router	1	4	2	2	1	2
54	Air Curtain	-	0	3	-	1	-
55	Switch Hub	3	-	-	1	2	-
56	Videotron	1	-	-	-	-	-

Tabel 4.20 : Keadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Tahun 2024

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

No	Satker	Jenis Pengadaan
1	PT Yogyakarta	- Sewa Mesin 8 Unit Fotocopy untuk PT dan PN se D.I. Yogyakarta - Pakaian Dinas ASN dan PPNPN
2	PN Yogyakarta	- 5 Unit Printer - 5 Unit AC

No	Satker	Jenis Pengadaan
		- 1 Unit Panel ATS Genset - 24 Unit Kursi kayu - 12 Unit Meja Kerja Kayu - 12 Unit Kursi besi/metal
3	PN Sleman	-
4	PN Bantul	- Kursi Roda - Pakaian Dinas ASN dan PPNPN
5	PN Wates	- 5 unit Laptop - 3 unit Personal Computer
6	PN Wonosari	-

Tabel 4.21 : Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Tahun 2024

c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

No	Satker	Jenis Pemeliharaan
1	PT Yogyakarta	1. Pemeliharaan peralatan mesin : - Perawatan kendaraan dinas - Perawatan genset - Perawatan AC, PC, Printer, sound, elektrik, dll 2. Pemeliharaan jaringan : - Jaringan listrik - Jaringan telepon - Jaringan internet
2	PN Yogyakarta	1. Pemeliharaan Inventaris Kantor 2. Perawatan kendaraan dinas 3. Perawatan genset 4. Perawatan AC, PC, Printer, Fotokopi, <i>Sound system</i>, Notebook 5. Pemeliharaan Jaringan Internet: 6. Jaringan CCTV
3	PN Sleman	1. Pemeliharaan peralatan mesin : - Perawatan Kendaraan Dinas - Perawatan Genset - Perawatan AC, - Perawatan Alat Pengolah data (PC, Laptop, Printer, scanner) - Perawatan Sound, Elektrikal, CCTV, dll 2. Pemeliharaan jaringan :

No	Satker	Jenis Pemeliharaan
		- Jaringan Listrik - Jaringan Telepon - Jaringan Internet - CCTV
4	PN Bantul	1. Pemeliharaan Inventaris Kantor 2. Perawatan kendaraan dinas 3. Perawatan genset 4. Perawatan AC, PC, Printer, Fotokopi, Sound system, Notebook 5. Pemeliharaan Jaringan Internet: 6. Jaringan CCTV
5	PN Wates	1. Pemeliharaan peralatan mesin : 1. Perawatan kendaraan dinas 2. Perawatan genset 3. AC, Laptop, PC, Printer, Fotocopy, sound system, elektrik, dll 2. Pemeliharaan jaringan : 1. Jaringan listrik 2. Jaringan telepon 3. Jaringan internet
6	PN Wonosari	1. Pemeliharaan peralatan mesin : - Perawatan kendaraan dinas roda 4 - Perawatan kendaraan dinas roda 2 - Perawatan & BBM Genset 100 KVA (1 unit) - Perawatan AC, Laptop, PC, Printer, Fotocopy, sound system, elektrik, dll 2. Pemeliharaan jaringan : - Jaringan listrik - Jaringan internet

Tabel 3.23 : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Tahun 2024

d. Penghapusan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

No	Satker	Tanggal	Jenis Barang	Keterangan
1	PT Yogyakarta	-	-	-
2	PN Yogyakarta	-	-	-
3	PN Sleman	-	-	-

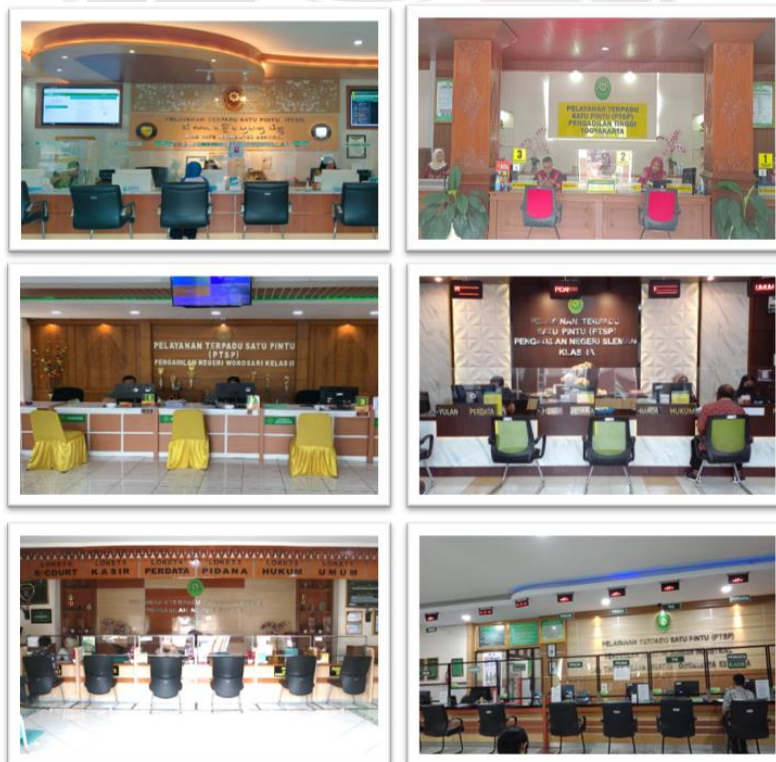
No	Satker	Tanggal	Jenis Barang	Keterangan
4	PN Bantul	-	-	-
5	PN Wates	-	-	-
6	PN Wonosari	-	-	-

Tabel 4.24 : Penghapusan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Tahun 2024

3. Sarana dan Prasarana untuk Meningkatkan Pelayanan Peradilan

Untuk meningkatkan dan melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal di lingkungan peradilan perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang representatif sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang prima dan berkualitas bagi masyarakat pencari keadilan maka upaya yang telah dilakukan meliputi :

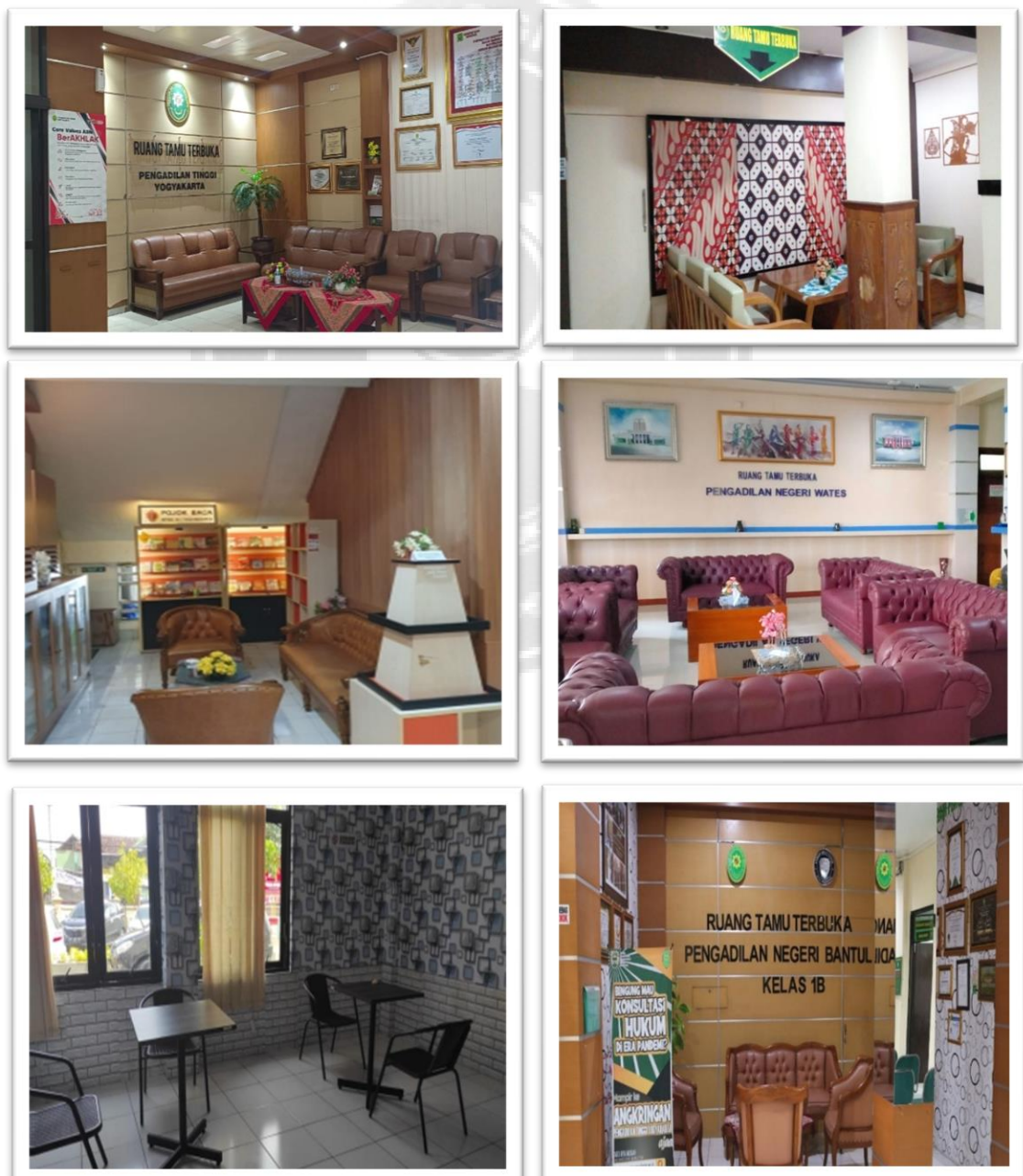
1. Memanfaatkan sarana dan prasarana secara optimal
2. Merawat dan memelihara sarana dan prasarana yang ada dengan prinsip pakai rawat rusak perbaiki
3. Membuat dan/ atau menjaga kebersihan dan keindahan taman di lingkungan kantor sehingga menjadi asri dan hijau
4. Melakukan penataan ruangan kerja yang rapi dan nyaman dengan memperhatikan unsur estetika ruangan.



Gambar 4.7 : Meja layanan di PTSP pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Wilayah Hukum Yogyakarta

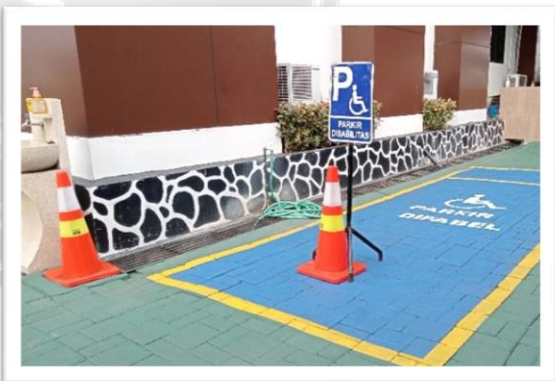
Tujuan penerapan PTSP sendiri tidak lain untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.

Selain itu pada Pengadilan Negeri telah dilakukan Pemisahan ruang pelayanan administrasi (PTSP) dan ruang pelayanan persidangan, dimana telah disediakan ruang tunggu masing-masing sesuai dengan jenis layanannya tujuannya agar Pengunjung dan pencari keadilan merasa nyaman.



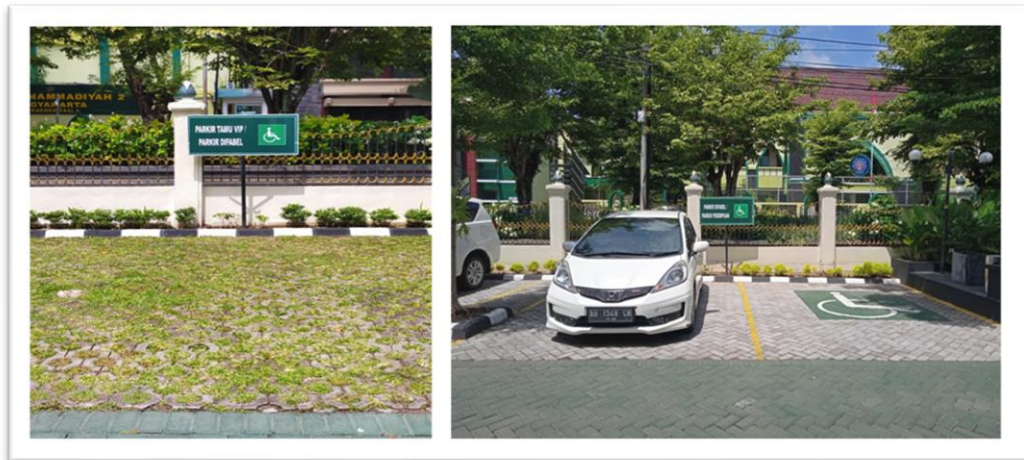


Sarana Prasarana Disabilitas Pengadilan Tinggi Yogyakarta

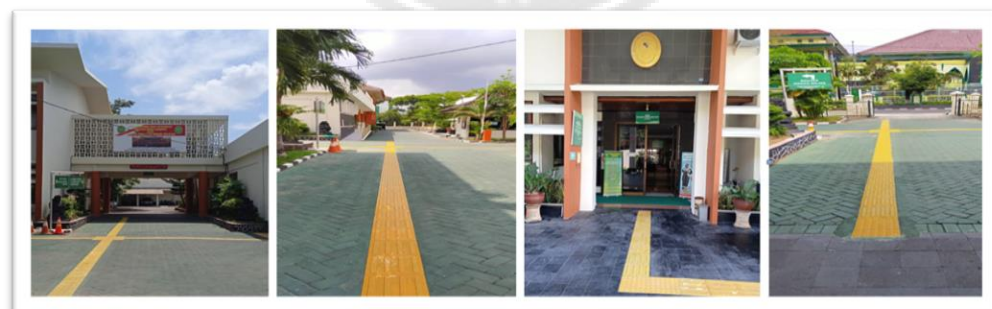


Sarpras Disabilitas PN Yogyakarta

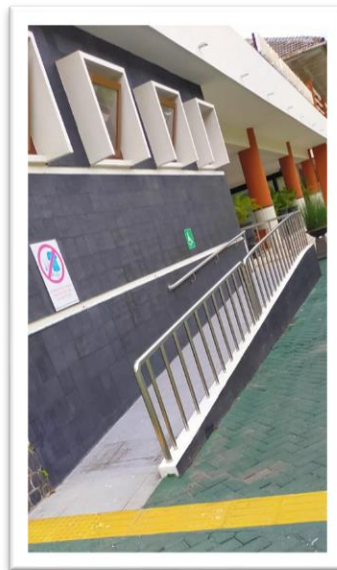
Parkir Khusus Disabilitas



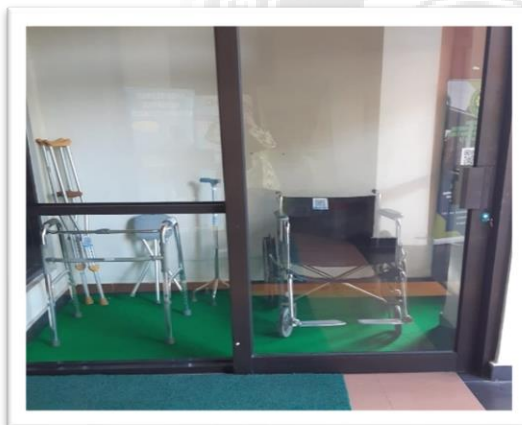
Jalur Guiding Block



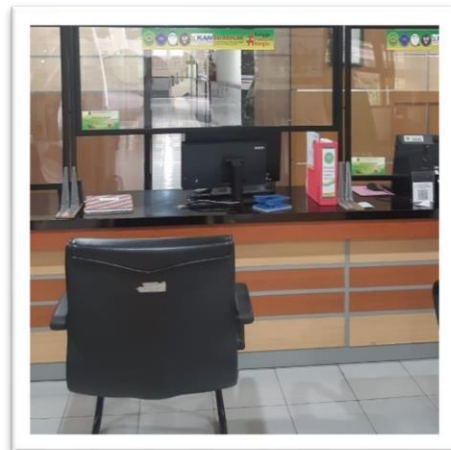
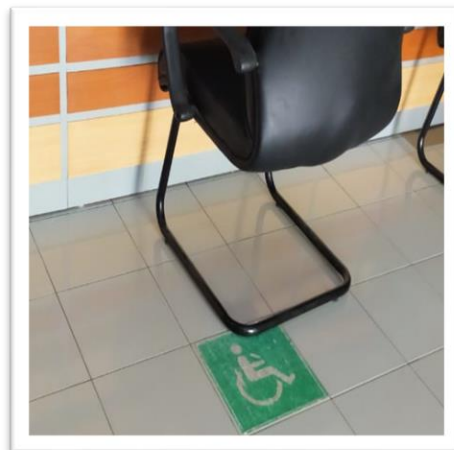
Ramp/ Jalur Landai



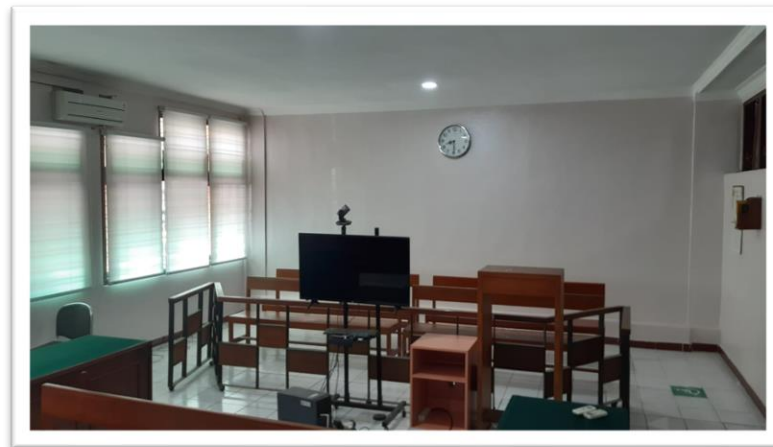
Alat bantu mobilitas/ Kursi tunggu disabilitas



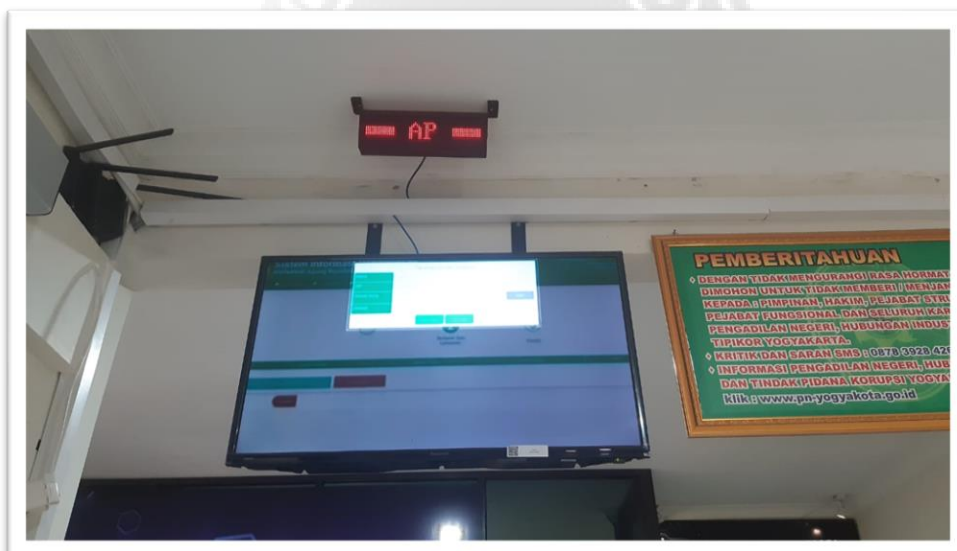
Tempat yang disediakan untuk pengguna disabilitas di PTSP



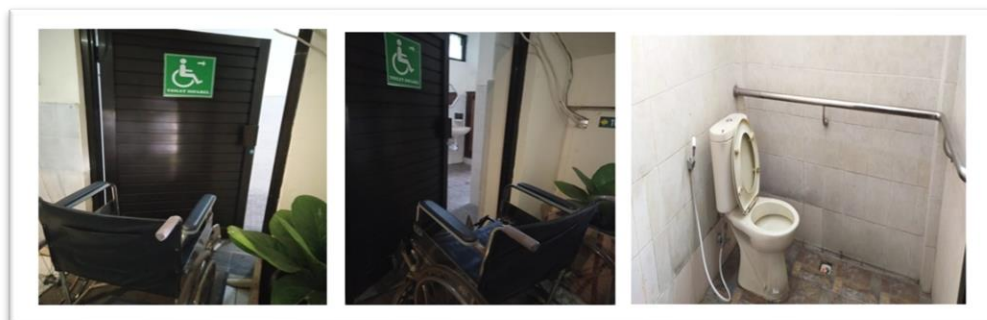
Ruang sidang ramah disabilitas



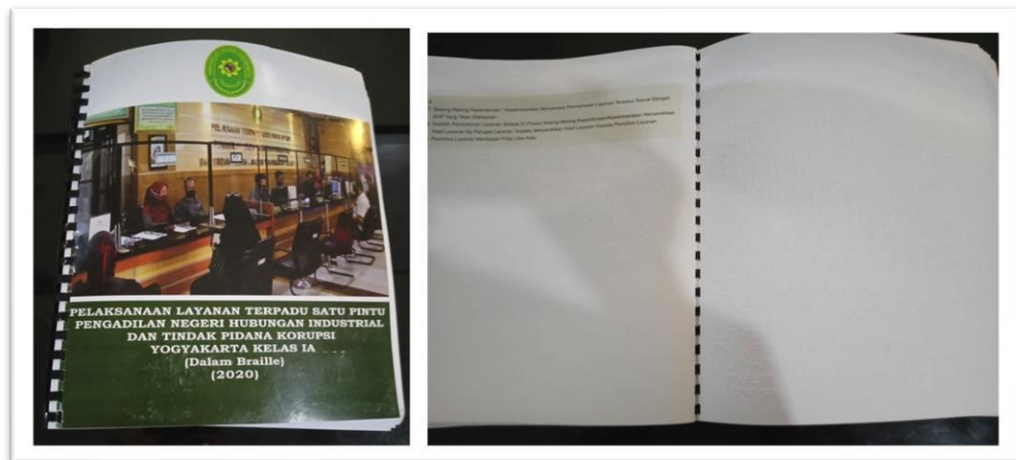
Sudah ada papan informasi visual



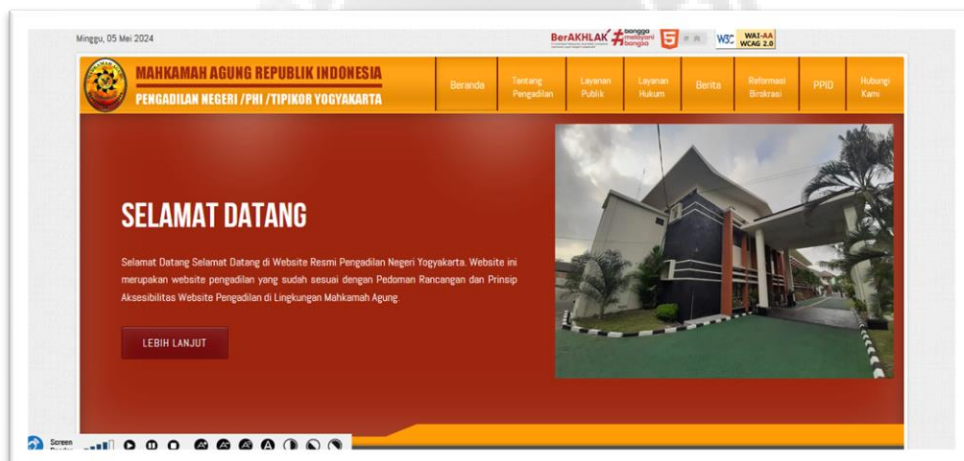
Toilet khusus disabilitas



Media informasi braille



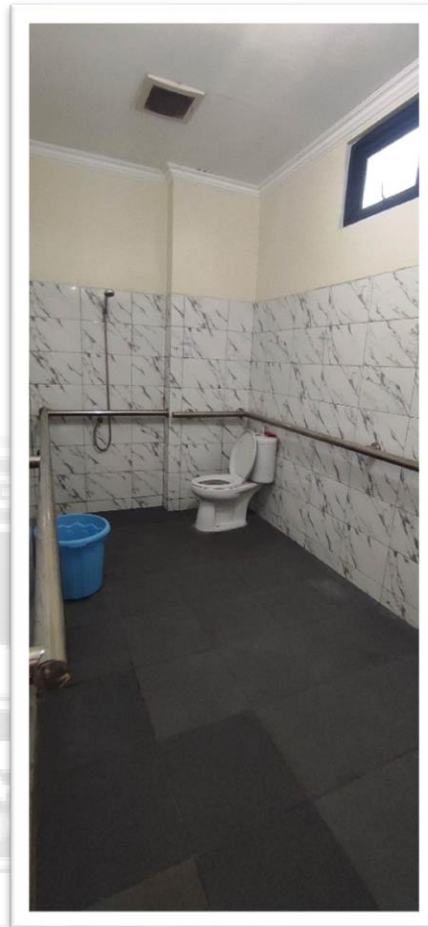
Website pengadilan sudah dilengkapi screen reader



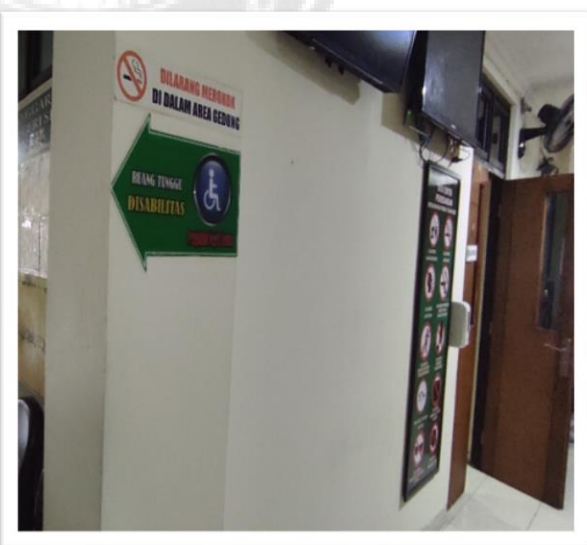
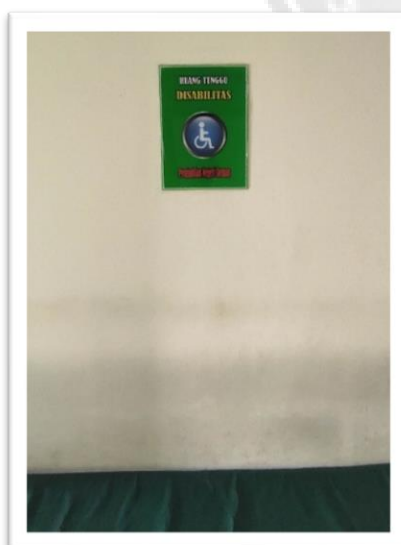
Sarana Prasarana Disabilitas Pn Sleman



Papan nama Braille



Toilet disabilitas



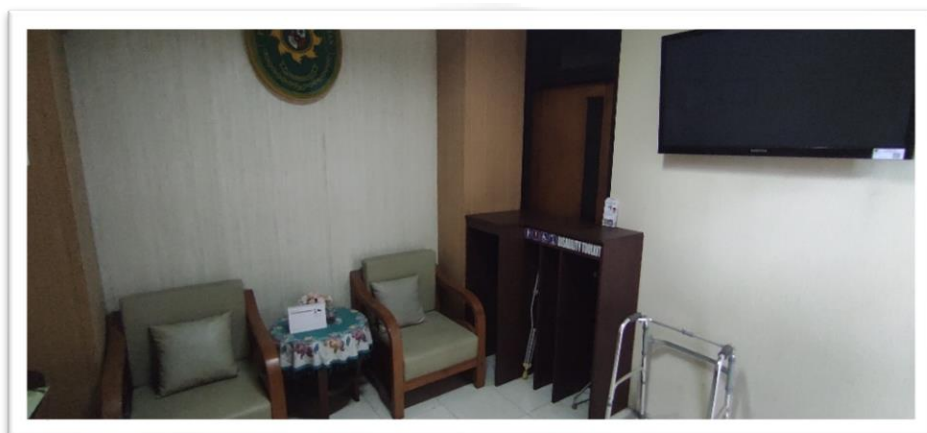
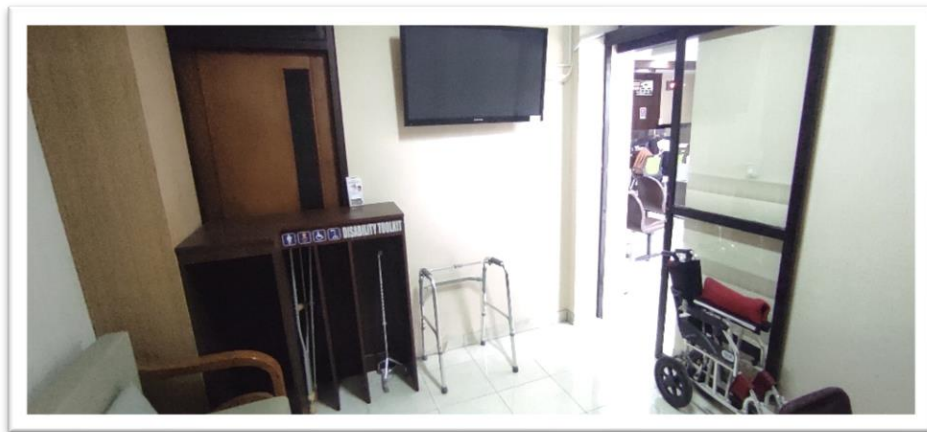
Ruang tunggu Disabilitas



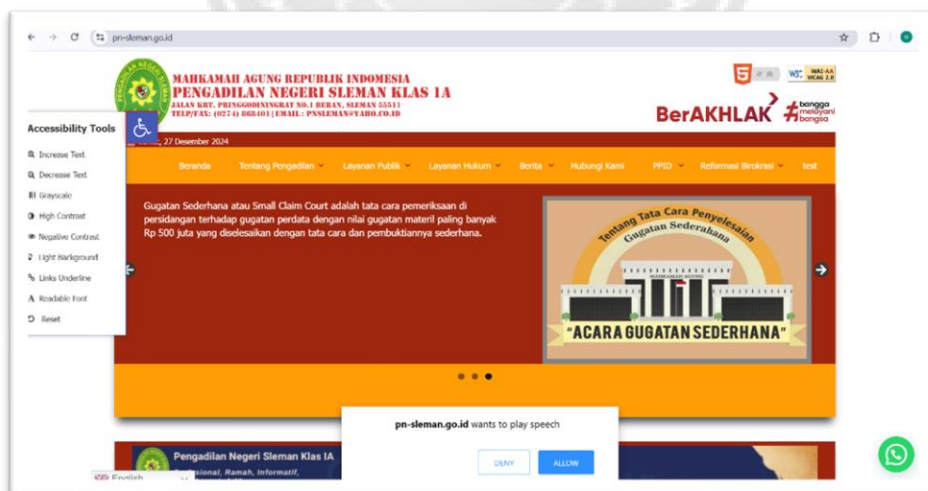
Jalur disabilitas



Parkir disabilitas



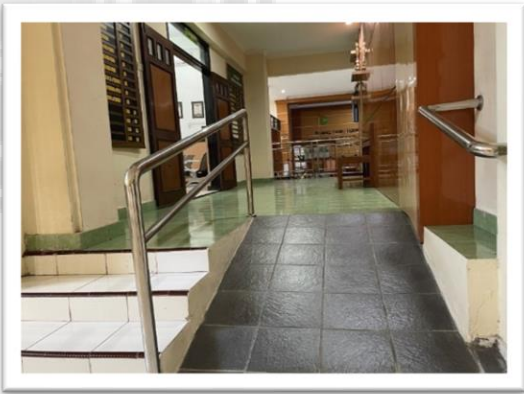
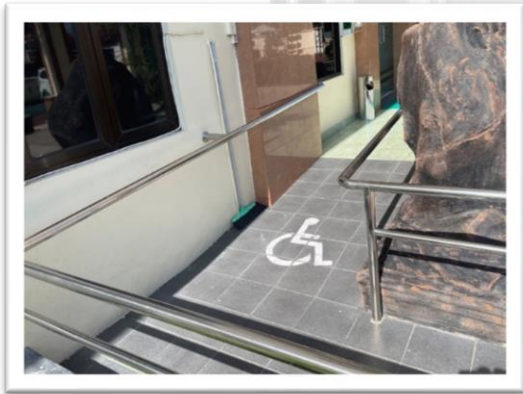
Pojok ramah disabilitas

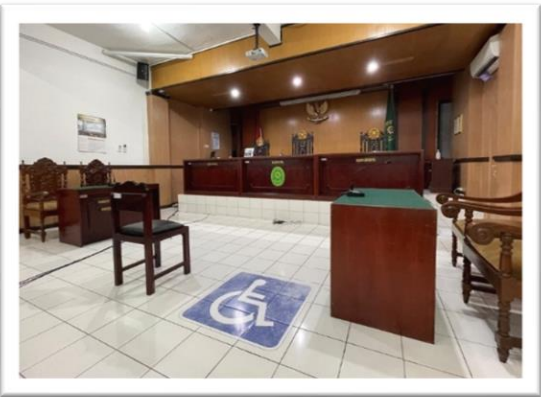
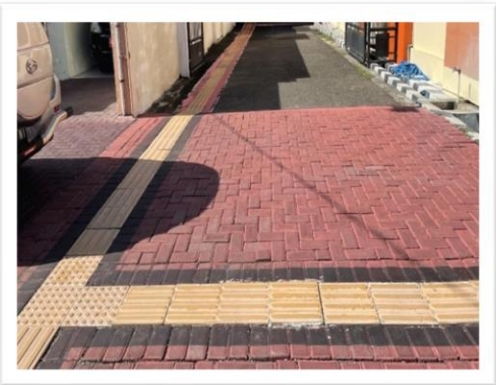


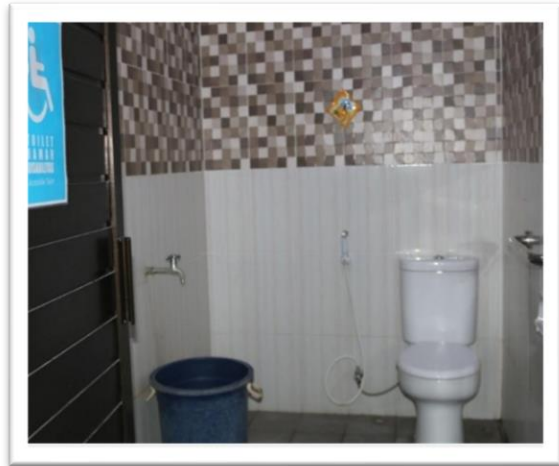
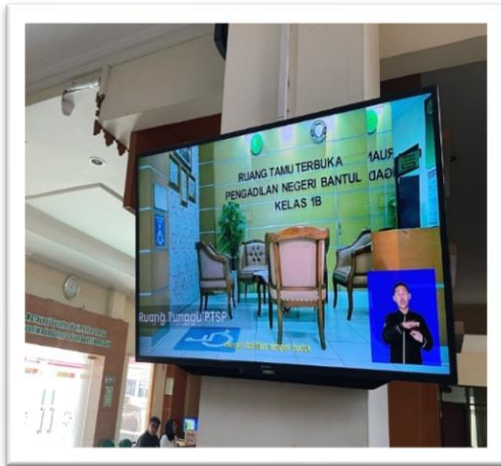
Website ramah disabilitas



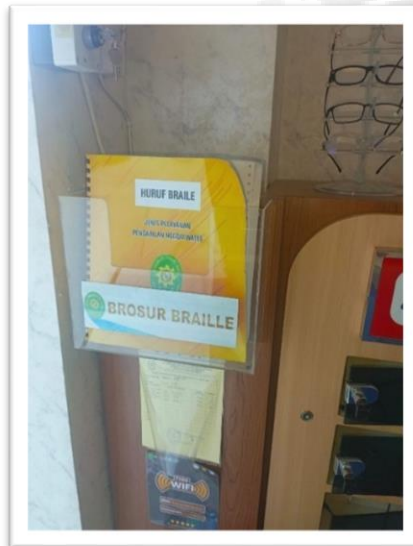
Sarpras Disabilitas PN Bantul



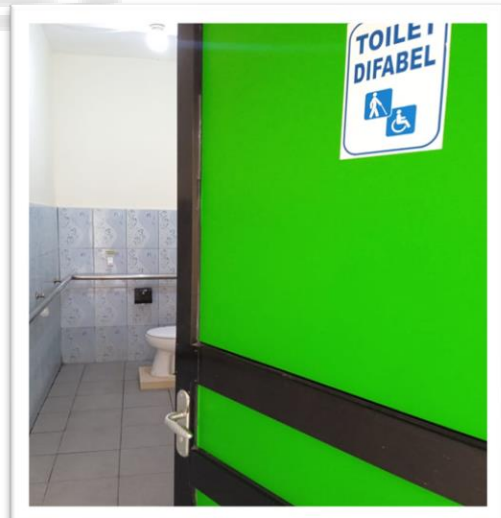
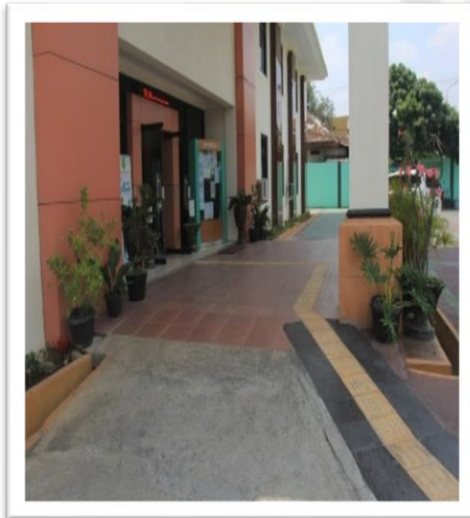




Sarana Disabilitas Pengadilan Negeri Wates



Sarana Disabilitas Pengadilan Negeri Wonosari





C. Pengelolaan Teknologi Informasi

Dalam rangka mendukung administrasi perkara berbasis elektronik khususnya pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan E-Court serta E-Office, dukungan teknologi informasi mutlak dibutuhkan. Pembenahan dan peningkatan teknologi informasi merupakan salah satu prioritas demi terwujudnya keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi Pengadilan yang modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu.

Untuk mewujudkan pelaksanaan administrasi pengelolaan yang tertib, modern dan akuntabel, Mahkamah Agung dan jajaran dibawahnya telah berkomitmen bahwa seluruh Badan Peradilan di Mahkamah Agung akan beralih dari administrasi Pengadilan yang dilakukan secara manual ke administrasi yang berbasis teknologi informasi.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta memiliki komitmen dan kebijakan yang salah satunya adalah dengan pendampingan secara terus menerus baik dari tingkat supervisi, operator maupun user baik ke dalam instansi Pengadilan Tinggi Yogyakarta maupun kepada seluruh Pengadilan Negeri di bawahnya dalam melakukan implementasi terhadap setiap aplikasi yang dilakukan secara rutin.

Keadaan perangkat teknologi informasi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

No	Satuan Kerja	Keadaan Teknologi Informasi dan pendukungnya									
		Internet	Server	PC	Laptop	Printer	Access Point	Router	Switch Hub	LCD Informasi	Kiosk
1	PT Yogyakarta	150 Mbps	4	85	37	20	3	1	4	2	-
2	PN Yogyakarta	180 Mbps	3	118	32	49	9	4	16	5	5
3	PN Sleman	175 Mbps	3	68	27	47	27	2	20	6	3
4	PN Bantul	120 Mbps	2	59	31	25	6	2	1	2	1
5	PN Wates	150 Mbps	3	78	26	50	9	1	10	3	1
6	PN Wonosari	150 Mbps	4	32	17	36	0	2	3	4	1

Tabel 4. 1 Keadaan Teknologi Informasi dan Pendukungnya Tahun 2024



Gambar 4.3.1 Server Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se Wilayah D.I. Yogyakarta

1. Implementasi e-Court

Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta telah melaksanakan E-Court sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Secara garis besar, proses E-Court dimulai pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran elektronik (*e-payment*), pemanggilan (*e-summons*) dan persidangan secara elektronik (*e-litigation*). Dalam implementasinya pada tingkat banding, dilakukan verifikasi terhadap Pengguna Terdaftar yaitu Advokat yang telah melakukan pendaftaran secara mandiri. Adapun jumlah Advokat yang sudah terdaftar dan terverifikasi di E-Court Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah:

No	Akun Advokat	Jumlah
1	Data advokat yang terdaftar di database	1.795
2	Jumlah data advokat yang sudah diverifikasi Pengadilan Tinggi	1.676
3	Jumlah data advokat yang sudah diverifikasi namun Data Masih salah (belum diperbaiki)	119

Tabel 4.4.2

Keadaan Verifikasi Advokat pada aplikasi E-Court Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Data diatas merupakan data keadaan verifikasi Advokat pada aplikasi E-Court Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Data advokat yang ada di aplikasi E-Court sebanyak 1.795 advokat. Data Advokat yang sudah mendaftar akun dan telah terverifikasi sebanyak 1.676 akun dan data yang sudah diverifikasi namun Data Masih salah (belum diperbaiki) sebanyak 119 akun.

Adapun statistik implementasi E-Court pada Pengadilan Negeri se D.I.Yogyakarta adalah sebagai berikut:

No	Satker	Sisa Perkara 2023	Perkara Masuk	Cabut	Putus	Sisa Perkara 2024
1	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	7	130	0	132	5
2	Pengadilan Negeri Yogyakarta	104	801	34	806	65
3	Pengadilan Negeri Sleman	183	1375	7	1374	177

No	Satker	Sisa Perkara 2023	Perkara Masuk	Cabut	Putus	Sisa Perkara 2024
4	Pengadilan Negeri Bantul	59	499	12	496	50
5	Pengadilan Negeri Wates	33	670	2	675	26
6	Pengadilan Negeri Wonosari	31	530	0	545	16
Jumlah		417	4005	55	4028	339

Tabel 4. 4.3 Jumlah Perkara di Wilayah D.I. Yogyakarta yang Daftarkan Melalui e-Court Tahun 2024



Gambar 4.3.1
Pojok e-court corner Pada Peradilan Umum se Wilayah D.I. Yogyakarta

2. Implementasi SIPP

SIPP dari waktu ke waktu terus mengalami pembenahan serta peningkatan fasilitas. Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan seluruh Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta telah menerapkan SIPP, dimana data perkara pada SIPP Tingkat Banding dan SIPP Pengadilan Negeri saling terkoneksi sehingga informasi perkara dapat diakses masyarakat cukup melalui SIPP Pengadilan Negeri, baik itu proses pada tingkat pertama maupun banding. Disamping itu, putusan yang diupload ke SIPP secara otomatis juga terupload ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Secara rutin, database SIPP pada Pengadilan Negeri dilakukan sinkronisasi, baik ke Mahkamah Agung, website masing-masing Pengadilan Negeri juga ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menggunakan SIPP versi 4.1.1, sedangkan pada Pengadilan Negeri menggunakan SIPP versi 5.6.4. Alamat SIPP Web pada Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut:

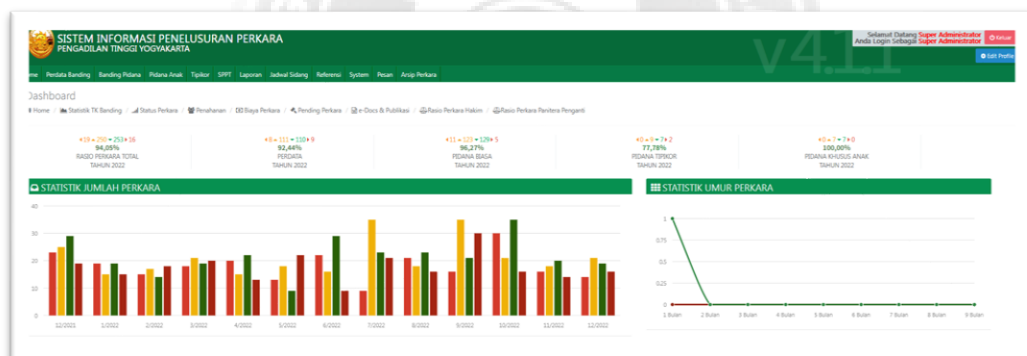
No	Satker	Alamat SIPP	Versi Aplikasi SIPP
1	PT Yogyakarta	sipp-banding.mahkamahagung.go.id	SIPP versi 4.1.1
2	PN Yogyakarta	sipp.pn-yogyakarta.go.id	SIPP versi 5.6.4.
3	PN Sleman	sipp.pn-sleman.go.id	SIPP versi 5.6.4.
4	PN Bantul	sipp.pn-bantul.go.id	SIPP versi 5.6.4.
5	PN Wates	sipp.pn-wates.go.id	SIPP versi 5.6.4.
6	PN Wonosari	sipp.pn-wonosari.go.id	SIPP versi 5.6.4.

Tabel 4.4.3 Alamat SIPP Pengadilan Negeri se Wilayah D.I. Yogyakarta

Sistem Informasi Penelusuran Perkara							
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA							
Beranda Perdata Umum Perdata Khusus Pidana Pidana Khusus Jadwal Sidang Laporan Daftar							
DATA SELURUH PERKARA							
29/12/2021 10:00:48 WIB Pembahasan Data : Jumlah : 29 Dec 2022 10:00:48 WIB, Total : 2 Perkara							
No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Pana Pihak	Status Perkara	Lama Proses	Link
1	129/Pdt.G/2021/PTN.YK	12 Oct 2021	Pencabutan	Penggugat: Disampaikan Tergugat: Disampaikan	Menutup	78 hari	[Detail]
2	29/Pdt.G/2021/PTN.YK	10 Mar 2021	Jual Beli Tanah	Penggugat: 3. JULIA 2. GEMARAH WAHYADHATMUKA Tergugat: 1. TIRYU SUCANTO 2. AGUS ARTADI	Pengiriman Berkas PK	190 hari	[Detail]

Sistem Informasi Penelusuran Perkara							
PENGADILAN NEGERI WATES							
Beranda Perdata Umum Perdata Khusus Pidana Pidana Khusus Jadwal Sidang Laporan Daftar							
DATA SELURUH PERKARA							
30/12/2022 10:00:48 WIB Pembahasan Data : Jumlah : 30 Dec 2022 10:00:48 WIB, Total : 144.000 Perkara							
No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Pana Pihak	Status Perkara	Lama Proses	Link
1	394/Pdt.P/2022/PTN.Wat	30 Dec 2022	Akta Kamatian	Pemohon: MARISDO USOMO ALJEMIRYO	Pendaftaran Perkara	1 hari	[Detail]
2	393/Pdt.P/2022/PTN.Wat	29 Dec 2022	Pembunuhan Ganda Njawa	Pemohon: MULYONHO	Sidang pertama	1 hari	[Detail]
3	393/Pdt.P/2022/PTN.Wat	29 Dec 2022	Akta Kamatian	Pemohon: FATMA TI WAHYUNINGGIH	Sidang pertama	2 hari	[Detail]
4	394/Pdt.P/2022/PTN.Wat	29 Dec 2022	Akta Kamatian	Pemohon: FATMA TI WAHYUNINGGIH	Sidang pertama	2 hari	[Detail]
5	393/Pdt.P/2022/PTN.Wat	29 Dec 2022	Akta Kamatian	Pemohon: MUDJAHHA	Peradilan	4 hari	[Detail]
6	391/Pdt.P/2022/PTN.Wat	23 Dec 2022	Perbaikan Kewajiban Dalam Akta Kamatian	Pemohon:	Peradilan	7 hari	[Detail]

Gambar 4.3.2 Tampilan SIPP Web Pengadilan Negeri



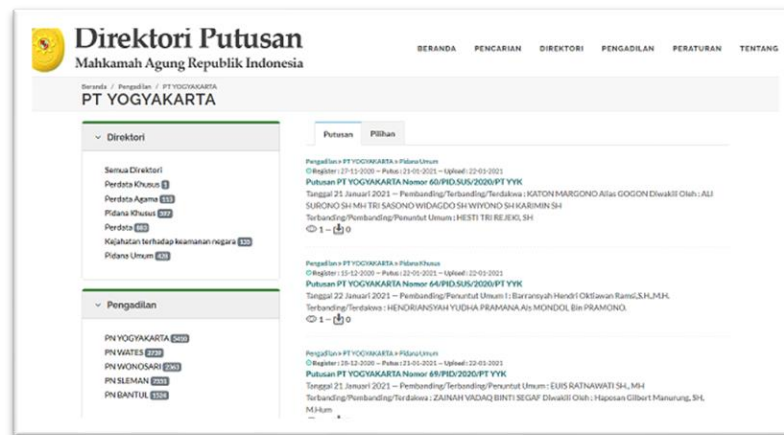
Gambar 4.3.3 Tampilan SIPP Web Pengadilan Tingkat Banding

3. Implementasi Aplikasi Pendukung

a. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Direktori Putusan merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengupload perkara yang menempuh upaya hukum baik banding, kasasi maupun PK dan perkara tingkat pertama yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun setelah implementasi SIPP versi 3.2.0, data putusan merupakan hasil sinkronisasi dari SIPP pengadilan. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI untuk Peradilan Umum Wilayah D.I. Yogyakarta dapat diakses di:

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pt-yogyakarta.html>



Gambar 4.3.4

Tampilan Direktori Putusan Web Pengadilan Tingkat Yogyakarta

Adapun statistik implementasi upload putusan ke direktori putusan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Satker	Register	Putus	Upload
1	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	296	291	293
2	Pengadilan Negeri Yogyakarta	1029	1216	1333
3	Pengadilan Negeri Sleman	2168	2351	2577
4	Pengadilan Negeri Bantul	869	926	923
5	Pengadilan Negeri Wates	876	919	942
6	Pengadilan Negeri Wonosari	661	695	745
J u m l a h		5899	6398	6813

Tabel 4. 5 Jumlah Putusan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang diupload pada Direktori Putusan Tahun 2024

Kolom Register mengindikasikan seluruh perkara yang diupload pada Direktori Putusan yang didaftarkan pada tahun 2024. Kolom Putus mengindikasikan seluruh perkara tahun 2024 dan tahun sebelumnya yang diupload ke Direktori Putusan pada tahun 2024. Kolom Upload mengindikasikan seluruh perkara yang diupload pada tahun 2024 termasuk perkara lampau. Selisih data putus dan upload dikarenakan perbedaan tanggal putus dan upload. Hal ini terjadi karena file putusan perkara tidak muncul pada saat tanggal putusan, sehingga perlu dilakukan upload ulang sesuai petunjuk surat dari BADILUM.

b. Aplikasi e-Berpadu

Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.



Gambar 4. 6 Tampilan Aplikasi e-BERPADU

Adapun statistik implementasi Layanan e-berpadu wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Satker	Layanan e-berpadu							
		Pelimpahan Berkas	Penggeledahan	Penyitaan	Perpanjangan Penahanan	Izin Besuk	Izin Pinjam Pakai Barang Bukti	Diversi	Pembantaran
1	Pengadilan Negeri Yogyakarta	372	782	1985	560	13607	36	21	1
2	Pengadilan Negeri Sleman	765	697	2625	488	9039	60	27	-
3	Pengadilan Negeri Bantul	456	663	2315	366	7383	16	16	1
4	Pengadilan Negeri Wates	223	105	399	63	1201	-	8	-

No	Satker	Layanan e-berpadu							
		Pelimpahan Berkas	Penggeledahan	Penyitaan	Perpanjangan Penahanan	Izin Besuk	Izin Pinjam Pakai Barang Bukti	Diversi	Pembantaran
5	Pengadilan Negeri Wonosari	149	64	376	15	997	-	1	-
Jumlah		1965	2311	7700	1492	3222 7	112	73	2

Tabel 4. 6 Layanan e-berpadu di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2024

c. Aplikasi Eraterang

ERATERANG atau elektronik surat keterangan merupakan produk aplikasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, dan berlaku di semua Pengadilan Negeri / Tingkat Pertama di seluruh Indonesia. Eraterang sebagai media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri yang dapat diakses oleh pemohon dimanapun ia berada (selama ada akses internet via HP/ Gawai dan Komputer/ PC).

Jenis Surat Keterangan yang bisa dilayani melalui aplikasi Eraterang :

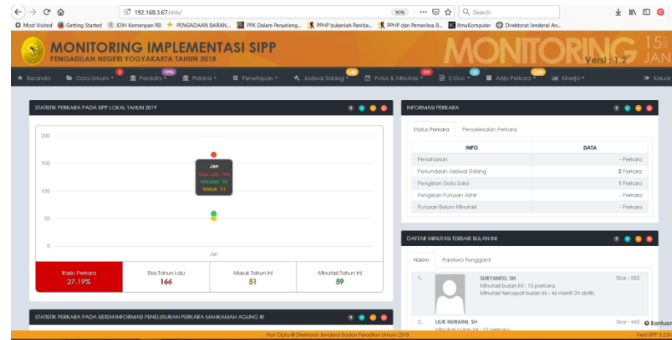
- Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit;
- Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana;
- Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya;
- Surat Keterangan di Pidana karena Kealpaan Ringan atau Alasan Politik;
- Surat Keterangan Tidak memiliki tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara.



Gambar 4.3.5 Tampilan Web Aplikasi Eraterang Peradilan Tingkat Pertama

d. Aplikasi Monitoring SIPP

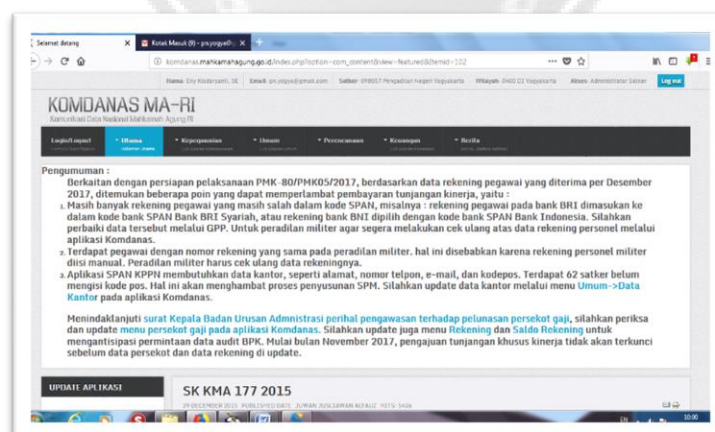
Aplikasi Monitoring adalah sebuah aplikasi turunan dari SIPP yang digunakan untuk memonitoring dan evaluasi implementasi SIPP di pengadilan. Fitur-fitur aplikasi monitoring cukup membantu dalam evaluasi dan pengawasan internal, namun sangat perlu dikembangkan lagi sesuai kebutuhan terhadap informasi pengawasan SIPP.



Gambar 4.3.6
Tampilan Web Aplikasi Monitoring SIPP Peradilan Tingkat Pertama

e. Aplikasi KOMDANAS

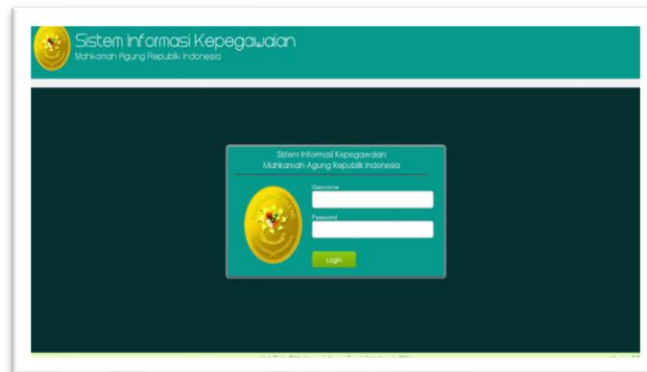
KOMDANAS atau Komunikasi Data Nasional merupakan sebuah sistem aplikasi komputasi terpadu yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan database sentral berisi data-data aset, kepegawaian, keuangan, dan remunerasi. Penggunaan teknologi informasi yang diterapkan dalam bentuk aplikasi KOMDANAS ini akan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung.



Gambar 4.3.7 Tampilan Web Aplikasi Komdanas bagi semua Peradilan

f. Aplikasi SIKEP dan aplikasi kepegawaian dari BKN

Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI.

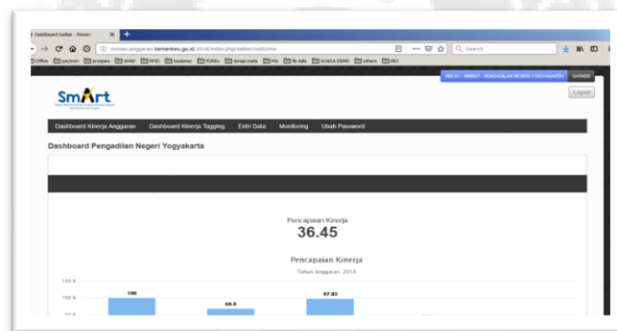


Gambar 4.3.8

Tampilan Web Aplikasi SIKEP bagi semua Peradilan

g. Aplikasi Monev SMART

Sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran.

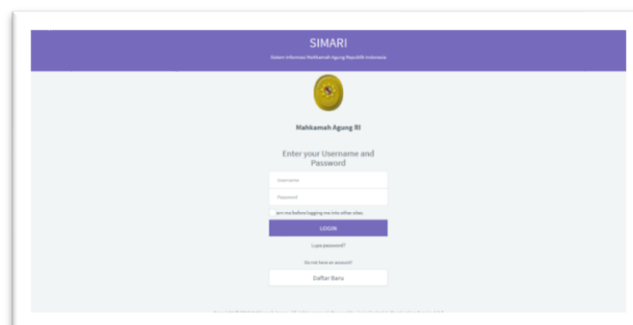


Gambar 4.3.9

Tampilan Web Aplikasi Monev SMART bagi semua Peradilan

h. Aplikasi SIMARI MA RI

Sistem Informasi Mahkamah Agung RI yang terintegrasi, baik dari sistem informasi perkara, sistem informasi keuangan dsb.



Gambar 4.3.10

Tampilan Web Aplikasi SIMARI MA RI bagi semua Peradilan

i. Aplikasi SIMPONI

Sistem informasi penerimaan negara bukan pajak secara on line.



Gambar 4.3.11
Tampilan Web Aplikasi SIMPONI

j. Aplikasi OMSPAN

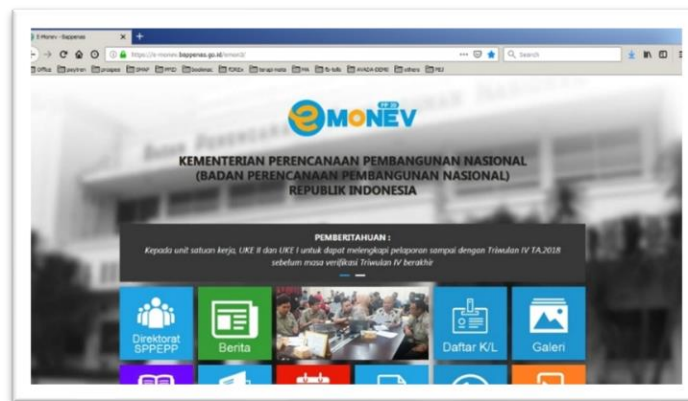
Aplikasi yang digunakan dalam rangka memantau transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran Negara (SPAN) yang menyajikan informasi sesuai kebutuhan / reporting.

ID	Nomor SP2D	Tanggal Faktur SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SP2D	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail	Data SP2D (PDF)
1	1700017010020060	04-01-2018	15-12-2017	0	00010100000000000000	15-12-2017	GTUP NAB	LADNPA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Perantara Untuk Kebutuhan Belanja Modal (belanja Pengadaan dan Penganggunan) TUP Tahun Anggaran 2017 sesuai SPN No. 001/18 tanggal 15-12-2017	Cek Detail	
2	1700017010020065	04-01-2018	15-12-2017	0	00010100000000000000	15-12-2017	GTUP NAB	LADNPA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Perantara Untuk Kebutuhan Belanja Barang (belanja Pengadaan dan Penganggunan) TUP Tahun Anggaran 2017 sesuai SPN No. 001/18 tanggal 15-12-2017	Cek Detail	
3	1700017010020064	04-01-2018	15-12-2017	0	00010100000000000000	15-12-2017	GTUP NAB	LADNPA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Perantara Untuk Kebutuhan Belanja Barang (belanja Pengadaan dan Penganggunan) TUP Tahun Anggaran 2017 sesuai SPN No. 001/18 tanggal 15-12-2017	Cek Detail	
4	1700017010020067	04-01-2018	15-12-2017	0	00010100000000000000	15-12-2017	GTUP NAB	LADNPA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Perantara Untuk Kebutuhan Belanja Barang (belanja Pengadaan dan Penganggunan) TUP Tahun Anggaran 2017 sesuai SPN No. 001/18 tanggal 15-12-2017	Cek Detail	

Gambar 4.3.12 Tampilan Web Aplikasi OMSPAN

k. Aplikasi MONEV BAPPENAS PP. 39

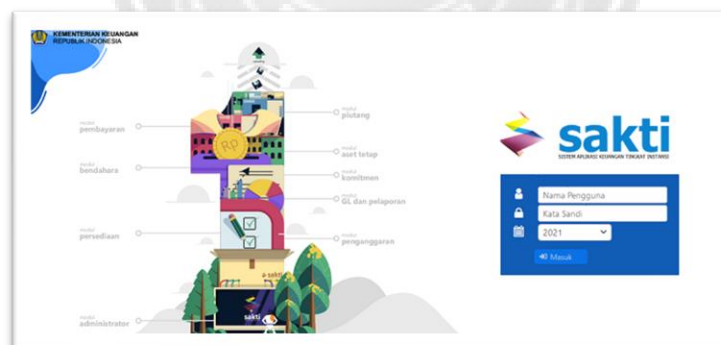
Aplikasi e-Monev Bappenas merupakan aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun berjalan. Aplikasi ini berfungsi sebagai alat pelaporan data realisasi hasil pemantauan yang berjenjang dengan satuan kerja (Satker) sebagai ujung tombak penyedia data realisasi. Level KL/Biro Perencanaan, UKE-I, dan UKE-II dapat memanfaatkan data pemantauan satker di level komponen untuk menetapkan realisasi di level output serta indikator-indikator kinerjanya.



Gambar 4.3.13 Tampilan Web Aplikasi MONEV BAPPENAS PP. 39

I. Aplikasi SAKTI Kemenkeu

Aplikasi SAKTI atau Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi adalah aplikasi yang mengintegrasikan dari berbagai aplikasi yang telah digunakan oleh Satuan Kerja (Satker) dalam pengelolaan anggaran keuangan pemerintah. Saat ini satker menggunakan sekitar 8 (delapan) aplikasi dalam pelaksanaan anggaran. Penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut tidak jarang harus melakukan input data yang sama secara manual dan berulang-ulang. Kondisi ini tidak efektif dan menyita banyak waktu dalam melakukan pekerjaan administratif. Melalui aplikasi SAKTI, aplikasi-aplikasi tersebut akan mengakses database yang sama (single database) sehingga menghindari duplikasi data dan mengurangi pekerjaan administratif.



Gambar 4.3.14 Tampilan Web Aplikasi SAKTI Kemenkeu



PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

BAB V

A. Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (Ampuh)

Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) merupakan program lanjutan dari Akreditasi Penjaminan Mutu yang sudah berjalan sejak tahun 2014. AMPUH merupakan salah satu bentuk pembinaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang memiliki tujuan untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara, dan manajemen pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum. Ruang lingkup program sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) meliputi seluruh penerapan tugas fungsi, kinerja dan pelaksanaan layanan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (Ampuh) pada satuan kerja di lingkungan peradilan umum di wilayah D.I. Yogyakarta mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 Tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) Di Lingkungan Peradilan Umum.

Jika tim penilai memutuskan bahwa nilai akhir satuan kerja sudah memenuhi standar yang telah ditentukan dan tidak ada temuan berupa; berkas hilang, penyalahgunaan keuangan, operasi tangkap tangan dan tindakan pungutan liar (operasi saber pungli), maka terhadap satuan kerja dapat diberikan Sertifikat Mutu Pengadilan Unggul. Predikat sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) adalah Paripurna, Unggul, Utama, Baik, dan Cukup. Peringkat Predikat Paripurna akan diraih setelah satuan kerja yang dinilai meraih predikat Unggul selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1159/DJU/SK/OT.01.3/XII/2024, tanggal 11 Desember 2024, Predikat sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) pada **Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah Unggul dengan nilai AMPUH 2024 sebesar 917,2**. Sedangkan pada satuan kerja di lingkungan peradilan umum di wilayah D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pengadilan	Kelas	Nilai AMPUH 2024	Predikat AMPUH
1.	Pengadilan Negeri Yogyakarta	IA	830,5	Unggul
2.	Pengadilan Negeri Sleman	IA	799,61	Utama
3.	Pengadilan Negeri Wates	IB	800,05	Unggul
4.	Pengadilan Negeri Wonosari	II	779,71	Utama
5.	Pengadilan Negeri Bantul	IB	759,57	Utama

Tabel 5.1 Nilai AMPUH Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Se-DIY



Gambar 5.1 Penyerahan Sertifikat AMPUH Pengadilan Tinggi Yogyakarta



Gambar 5.2 Penyerahan Sertifikat AMPUH Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Disamping itu, masih banyak prestasi dan penghargaan yang diraih oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta serta satuan kerja dibawahnya, dengan uraian sebagai berikut :

1. Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Selama Tahun 2024, Pengadilan Tinggi Yogyakarta berhasil meraih beberapa prestasi dan penghargaan, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Penghargaan atas capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan Nilai Sempurna (100%) pada Semester I Tahun 2024 oleh KPPN Yogyakarta.



Gambar 5.3 Penghargaan IKPA Pengadilan Tinggi Yogyakarta

- b) Penghargaan sebagai Role Model Ketua Pengadilan Tingkat Banding oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.



Gambar 5.4 Penghargaan Role Model Ketua Pengadilan Tingkat Banding

- c) Penghargaan sebagai Role Model Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.



Gambar 5.5 Penghargaan Role Model Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding

2. Pengadilan Negeri Bantul

Selama Tahun 2024, Pengadilan Negeri Sleman berhasil meraih beberapa prestasi dan penghargaan, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Penghargaan atas capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan predikat Sangat Baik pada Semester I Tahun 2024 oleh KPPN Yogyakarta.



Gambar 5.6 Penghargaan IKPA Pengadilan Negeri Bantul

- b) Penghargaan sebagai Terbaik I Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta atas capaian dalam penyusunan SAKIP Tahun 2023.



Gambar 5.7 Penghargaan SAKIP Pengadilan Negeri Bantul

- c) Penghargaan bagi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul sebagai Role Model Kepemimpinan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.



Gambar 5.8 Penghargaan Role Model Kepemimpinan Pengadilan Negeri Bantul

3. Pengadilan Negeri Sleman

Selama Tahun 2024, Pengadilan Negeri Sleman berhasil meraih beberapa prestasi dan penghargaan, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Penghargaan atas capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan predikat Sangat Baik pada Semester I Tahun 2024 oleh KPPN Yogyakarta.



Gambar 5.9 Penghargaan IKPA Pengadilan Negeri Sleman

- b) Penghargaan sebagai Terbaik II dalam Penilaian Layanan Hukum Kategori Pos Bantuan Hukum oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.



**Gambar 5.10 Penghargaan Kategori Pos Bantuan Hukum
Pengadilan Negeri Sleman**

4. Pengadilan Negeri Wates

Selama Tahun 2024, Pengadilan Negeri Wates berhasil meraih beberapa prestasi dan penghargaan, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Penghargaan atas capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 dengan predikat Sangat Baik pada Semester I Tahun 2024 oleh KPPN Wates.



Gambar 5.11 Penghargaan IKPA 01 Pengadilan Negeri Wates

- b) Penghargaan atas capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 dengan predikat Sangat Baik pada Semester I Tahun 2024 oleh KPPN Wates.



Gambar 5.12 Penghargaan IKPA 03 Pengadilan Negeri Wates

- c) Terbaik III atas capaian nilai tertinggi pada Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) Tahun 2024 untuk kategori Pengadilan Negeri Kelas IB dengan perkara 1 s/d 500 oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.



Gambar 5.13. Penghargaan EIS Pengadilan Negeri Wates

- d) Penghargaan atas capaian Evaluasi II Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dengan Predikat B dengan Nilai 82,96%.



Gambar 5.14 Penghargaan SMAP Pengadilan Negeri Wates

5. Pengadilan Negeri Wonosari

Selama Tahun 2024, Pengadilan Negeri Wonosari berhasil meraih beberapa prestasi dan penghargaan, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Penghargaan atas capaian Terbaik I Penilaian Hukum Kategori Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.



Gambar 5.15 Penghargaan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) Pengadilan Negeri Wonosari

- b) Penghargaan atas capaian Terbaik VI Penilaian Keterbukaan Informasi Publik pada Pengadilan Negeri Kelas IB dan Kelas II oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.



Gambar 5.16 Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Pengadilan Negeri Wonosari

- c) Penghargaan atas capaian Terbaik V Penilaian Layanan Hukum Kategori Pos Bantuan Hukum Tahun 2024 oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.



Gambar 5.17 Penghargaan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Wonosari

- d) Penghargaan atas capaian Terbaik IX Capaian Nilai Tertinggi pada Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) Tahun 2024 untuk kategori Pengadilan Negeri Kelas II dengan perkara 1 s/d 500 oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.



Gambar 5.18 Penghargaan EIS Pengadilan Negeri Wonosari

- e) Penghargaan atas capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 dengan predikat Sangat Baik pada Semester I Tahun 2024 oleh KPPN Wonosari



Gambar 5.19 Penghargaan IKPA 01 Pengadilan Negeri Wonosari

- f) Penghargaan atas capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 dengan predikat Sangat Baik pada Semester I Tahun 2024 oleh KPPN Wonosari.



Gambar 5.20 Penghargaan IKPA 03 Pengadilan Negeri Wonosari

6. Pengadilan Negeri Yogyakarta

Selama Tahun 2024, Pengadilan Negeri Yogyakarta berhasil meraih beberapa prestasi dan penghargaan, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Terbaik 2 atas capaian nilai tertinggi pada Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) Tahun 2024 untuk kategori Pengadilan Negeri Kelas IA dengan perkara 1001 s/d 2000 oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum



Gambar 5.21 Piagam Penghargaan Evaluasi Implementasi SIPP (EIS)

- b. Terbaik 3 dalam penilaian Keterbukaan Informasi Publik pada Pengadilan Negeri Kelas IA oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.



Gambar 5.22 Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

- c. Terbaik 5 dalam penilaian Layanan Pengadilan (PTSP) pada Pengadilan Negeri Kelas IA oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum



Gambar 5.23 Piagam Penghargaan Layanan PTSP

- d. Peringkat I Penerima Anugerah sebagai Pengadilan Terbaik dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Kategori Pengadilan Negeri dengan beban perkara 1001-2000 oleh Mahkamah Agung



Gambar 5.24 Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

- e. Peringkat 1 penerima Anugerah sebagai Pengadilan Terbaik dalam Pelaksanaan Peradilan Elektronik Kategori Pengadilan Negeri dengan beban perkara 1001-2000 oleh Mahkamah Agung



Gambar 5.25 Piagam Penghargaan Peradilan Elektronik

- f. Peringkat 2 penerima Anugerah sebagai Pengadilan Terbaik dalam Pelaksanaan Mediasi Kategori Pengadilan Negeri dengan beban perkara 1001-2000 oleh Mahkamah Agung



Gambar 5.26 Piagam Penghargaan Mediasi

- g. Penghargaan Satuan Kerja dengan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Berpredikat sangat Baik Periode Semester I Tahun 2024
- h. Penghargaan sebagai Ketua Pengadilan Negeri dengan Disiplin Kinerja Terbaik pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Periode Juli – Desember Tahun 2024

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Memangkas birokrasi pelayanan sebagai upaya mencapai *good governance*/kepemerintahan yang baik.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.

Pelayanan Publik dalam setiap Instansi atau lembaga Pemerintah di Indonesia terus ditingkatkan dan dipermudah. Saat ini, Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan di bawahnya senantiasa berupaya menata, meningkatkan, dan menyederhanakan pelayanan publik dengan cara menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut “PTSP”. Melalui PTSP ini Mahkamah

Agung ingin memberikan pelayanan prima dalam hal pelayanan publik yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap awal sampai akhir/terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat sebagai wujud keseriusan Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan di bawahnya terhadap penerapan PTSP tersebut.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas.

Ruang lingkup PTSP di Pengadilan Tinggi Yogyakarta ini meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku, serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaharuan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Layanan PTSP dilaksanakan oleh :

1. Layanan Kepaniteraan oleh Kepaniteraan Muda Pidana/ Perdata / Tindak Pidana Korupsi/ Hukum.
 - a. Menerima permohonan pelantikan dan pengambilan sumpah sebagai advokat.
 - b. Melakukan penginputan advokat yang telah disumpah pada aplikasi E-Court.
 - c. Melaksanakan verifikasi terhadap akun pengguna terdaftar dan layanan lainnya pada aplikasi E-Court.
 - d. Layanan lainnya yang berhubungan dengan Kepaniteraan
2. Layanan Informasi dan Pengaduan oleh Kepaniteraan Muda Hukum
 - a. Layanan Informasi
 - 1) Menerima permohonan dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144 Tahun 2022.
 - 2) Menerima dan memilah permohonan Informasi baik secara manual maupun elektronik.

- 3) Mendokumentasikan permohonan Informasi dan keberatan atas permohonan Informasi secara manual maupun elektronik.
 - 4) Meneruskan permohonan Informasi kepada PPID pelaksana.
 - 5) Menginformasikan jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan.
- b. Layanan Pengaduan
- 1) Memasukkan laporan pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA RI dengan melampirkan dokumen pengaduan.
 - 2) Pemasukan laporan ke aplikasi SIWAS MA RI dilakukan selambat-lambatnya 1 hari setelah menerima pengaduan
 - 3) Memberikan nomor register pengaduan kepada pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan pengaduan
3. Layanan Kesekretariatan oleh Bagian Umum dan Keuangan
- a. Menerima berkas banding perkara pidana, perdata, dan tipikor dan menyerahkan ke masing-masing kepaniteraan.
 - b. Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi.

Penerapan PTSP sendiri tidak lain memiliki tujuan :

1. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Sejalan dengan hal tersebut, Pengadilan Tinggi Yogyakarta terus berupaya untuk membenahi sistem layanan yang berpedoman kepada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaharuan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Pelaksanaan PTSP pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta

1. Layanan Kepaniteraan (e court)

Pemberian Layanan Kepaniteraan menjadi Tanggung jawab Petugas Kepaniteraan (Loket 4). Jumlah Layanan Kepaniteraan (e court) pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Triwulan	Jumlah Layanan	Ket
1.	I	5	-
2.	II	5	-
3.	III	2	-
4.	IV	2	-

Tabel 5.2. Layanan E Court



Grafik 1. Jumlah Layanan Kepaniteraan

2. Layanan Informasi dan Pengaduan

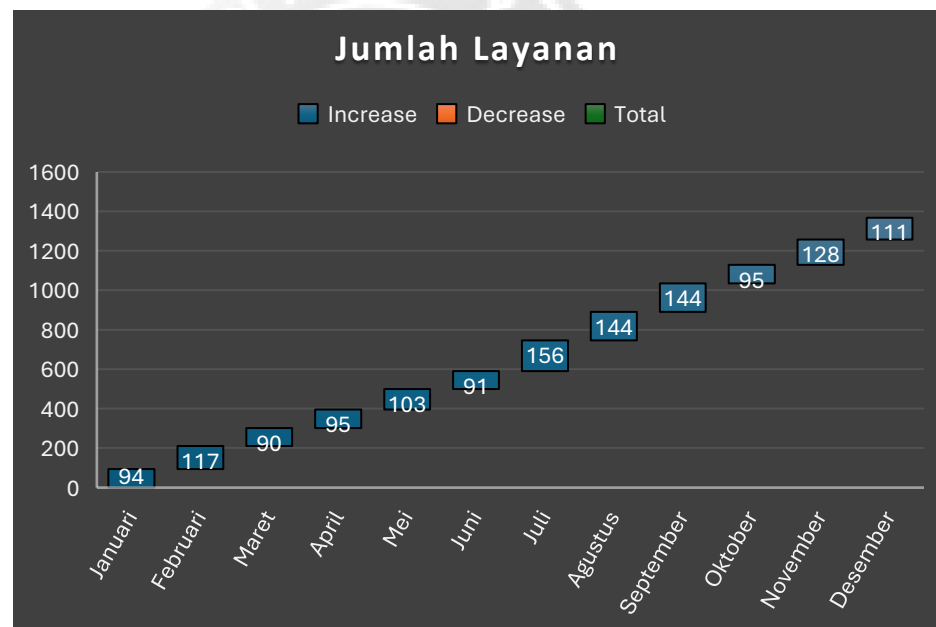
a. Layanan Informasi (Register Buku Tamu)

Pemberian Layanan Informasi menjadi tanggung jawab Petugas Kepaniteraan (Loket 1) Dan telah dimonitoring dan Evaluasi bagian Kepaniteraan. Jumlah layanan Informasi sesuai dengan Register buku tamu sebagai berikut :

No	Bulan	Jumlah Layanan	Ket
1.	Januari	94	-
2.	Februari	117	-

3.	Maret	90	-
4.	April	95	-
5.	Mei	103	-
6.	Juni	91	-
7.	Juli	156	-
8.	Agustus	144	-
9.	September	144	-
10.	Oktober	95	-
11.	November	128	-
12.	Desember	111	-

Tabel 5.3 Layanan Informasi



Grafik 5.2 Jumlah Layanan Tiap Bulan

b. Layanan Pengaduan

Pemberian Layanan Pengaduan menjadi tanggung jawab Petugas Kepaniteraan (Loket 2) Dan telah dimonitoring dan Evaluasi bagian Kepaniteraan

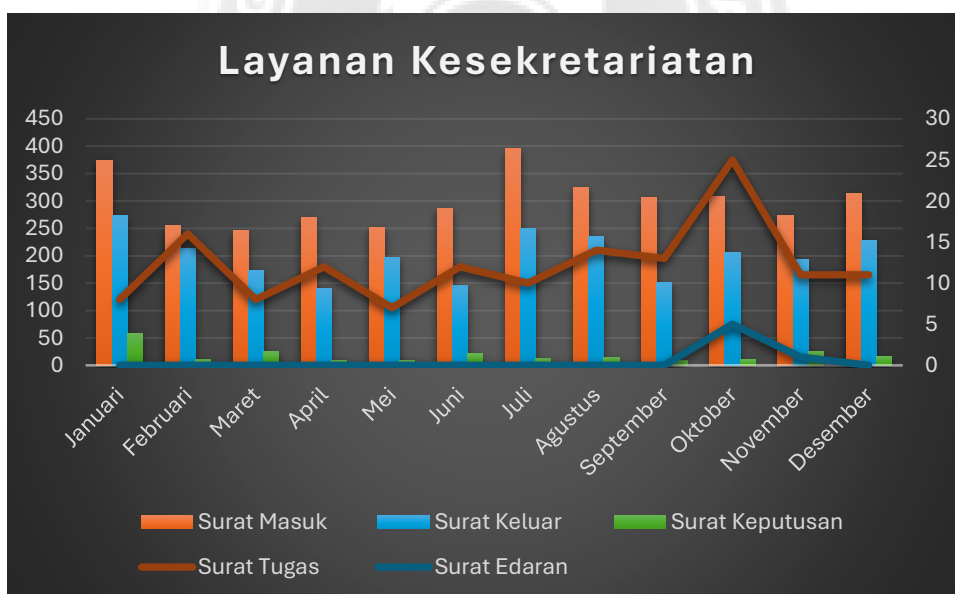
3. Layanan Kesekretariatan

Layanan Kesekretariatan, dilakukan oleh Petugas Kesekretariatan. Pemberian Layanan Kesekretariatan menjadi Tanggung jawab Petugas

Kesekretariatan. Jumlah Layanan Kesekretariatan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Bulan	Surat Masuk	Surat Keluar	Surat Keputusan	Surat Tugas	Surat Edaran
1	Januari	374	274	59	8	0
2	Februari	255	214	10	16	0
3	Maret	246	174	26	8	0
4	April	270	140	9	12	0
5	Mei	252	196	9	7	0
6	Juni	286	146	21	12	0
7	Juli	395	250	12	10	0
8	Agustus	324	236	14	14	0
9	September	306	151	8	13	0
10	Oktober	308	206	11	25	5
11	November	274	193	26	11	1
12	Desember	313	228	17	11	0
Jumlah		3.603	2.408	222	147	6

Tabel 5.4. Layanan Informasi

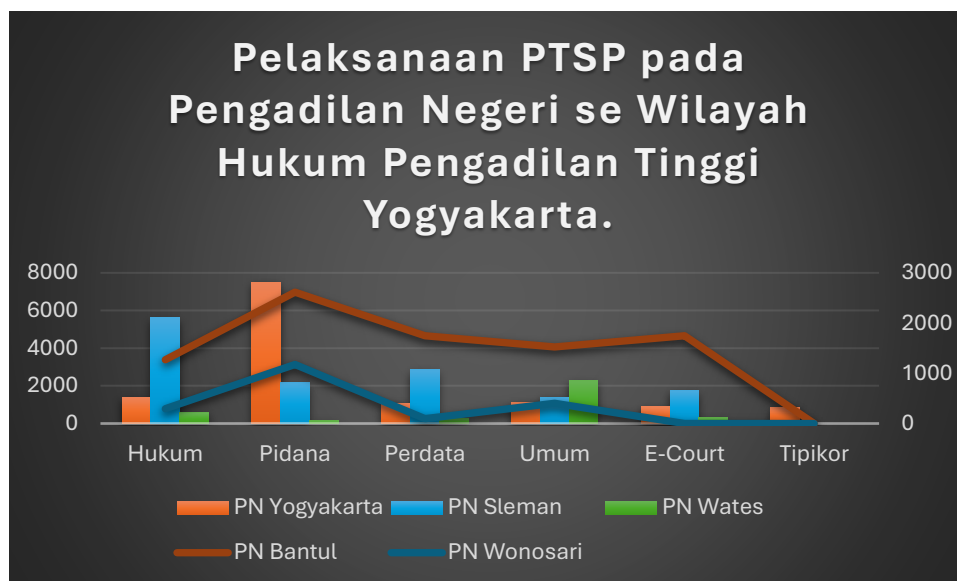


Grafik 5.3. Layanan Kesekretariatan

Pelaksanaan PTSP pada Pengadilan Negeri se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

	PN Yogyakarta	PN Sleman	PN Wates	PN Bantul	PN Wonosari
Hukum	1397	5616	573	1267	295
Pidana	7496	2168	163	2615	1175
Perdata	1087	2843	270	1749	98
Umum	1100	1381	2262	1522	403
E-Court	913	1737	320	1749	0
Tipikor	862	0	0	0	0

Tabel 5.5. Jumlah Pelaksanaan PTSP



Grafik 5.4. Layanan PTSP Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta

C. Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi sebagaimana telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Kegiatan ini merupakan salah satu kebijakan Mahkamah Agung yang harus dilaksanakan oleh seluruh pengadilan pada empat lingkungan peradilan, termasuk di lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Pembangunan Zona Integritas pada satuan kerja di lingkungan peradilan umum di wilayah D.I. Yogyakarta mengacu pada beberapa aturan diantaranya :

- Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- c. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas.

Pada tahun 2019, dari lingkungan peradilan umum di wilayah D.I. Yogyakarta terdapat 3 satker yang telah meraih predikat WBK dari Kemenpan & RB yaitu Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Wates. Untuk tahun 2020, dari lingkungan peradilan umum di wilayah D.I. Yogyakarta terdapat 1 satker yang memperoleh predikat WBK yaitu Pengadilan Negeri Wonosari dan 1 satker yang memperoleh predikat WBBM yaitu Pengadilan Negeri Wates. Pada Tahun 2021 terdapat satu (1) satker di wilayah D.I. Yogyakarta yang memperoleh predikat WBK yaitu Pengadilan Negeri Bantul.



Gambar 5.27 Sertifikat Predikat WBK dan WBBM 2 Peradilan Umum di Wilayah D.I. Yogyakarta

D. Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan baru dalam pelayanan publik yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Inovasi ini bisa berupa ide kreatif, adaptasi, atau modifikasi dari layanan publik yang sudah ada. Inovasi pelayanan publik dapat dilakukan dengan cara:

- Menciptakan ide-ide baru
- Mengembangkan ide, objek, dan praktik baru
- Mengadopsi perubahan baru
- Memanfaatkan teknologi digital

Inovasi pelayanan publik dapat memberikan manfaat, seperti: Memudahkan akses pelayanan, Meningkatkan kenyamanan masyarakat, Mempermudah penyesuaian dengan kebutuhan yang berubah, Membantu pemerintah menghadapi perubahan dan tantangan di masa mendatang.

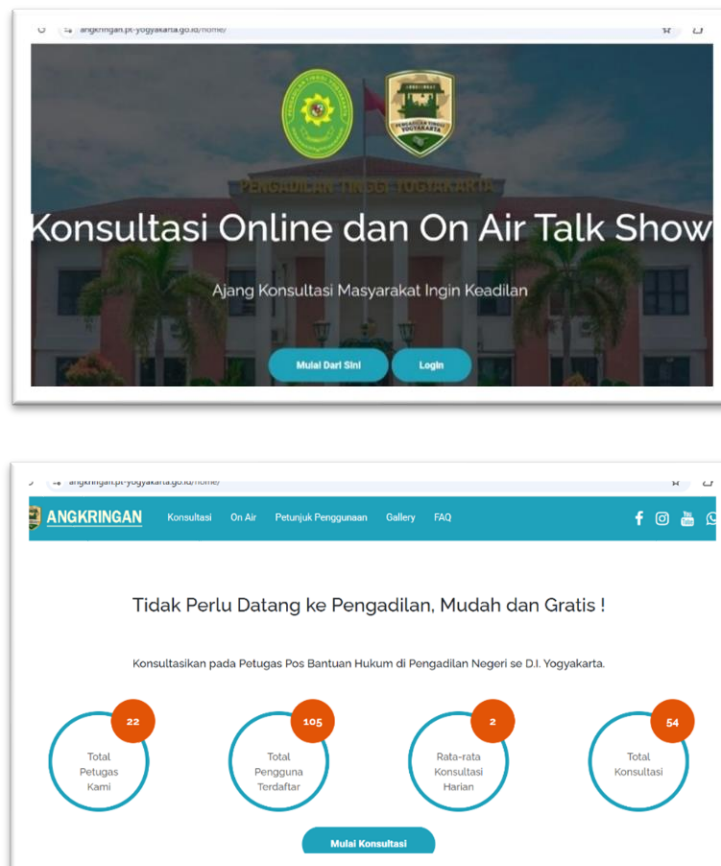
Satuan kerja di lingkungan peradilan umum di wilayah D.I. Yogyakarta memiliki masing-masing inovasi publik yang patut dimanfaatkan secara maksimal bagi para pencari serta pengguna layanan pengadilan. Inovasi-inovasi tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Beberapa inovasi publik yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah sebagai berikut :

a. Angkringan

Angkringan merupakan Portal layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang digunakan untuk melakukan Konsultasi Online, Edukasi, serta Talkshow Interaktif untuk menampung aspirasi masyarakat yang akan dilayani oleh Petugas Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang bertugas di seluruh Pengadilan Negeri di D.I. Yogyakarta pada Jam Pelayanan yang berlaku. Pengguna layanan ini tidak dikenakan biaya. Masyarakat tidak perlu datang ke Pengadilan, cukup dengan menggunakan smartphone masing-masing. Masyarakat dapat mengakses melalui <https://angkringan.pt-yogyakarta.go.id>



Gambar 5.28. Aplikasi Angkringan Pengadilan Tinggi Yogyakarta

b. e-Mosa

Elektronik Permohonan Sumpah Advokat merupakan Portal Layanan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang digunakan untuk pengajuan permohonan sumpah advokat secara online.

Dalam hal pengajuan permohonan sumpah advokat, saat ini dikhususkan untuk organisasi Advokat. Organisasi advokat melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu pada eMosa. Selanjutnya, admin Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan melakukan verifikasi. Apabila akun sudah terverifikasi, organisasi advokat bisa menggunakan akun tersebut untuk mengajukan permohonan sumpah secara online. Advokat bisa menggunakan portal ini untuk melakukan pengecekan status permohonan sumpah.

Pengguna layanan ini tidak dikenakan biaya, tidak perlu datang ke Pengadilan, cukup diakses melalui online melalui website Pengadilan Tinggi Yogyakarta atau melalui link ke <https://emosa.pt-yogyakarta.go.id/>.

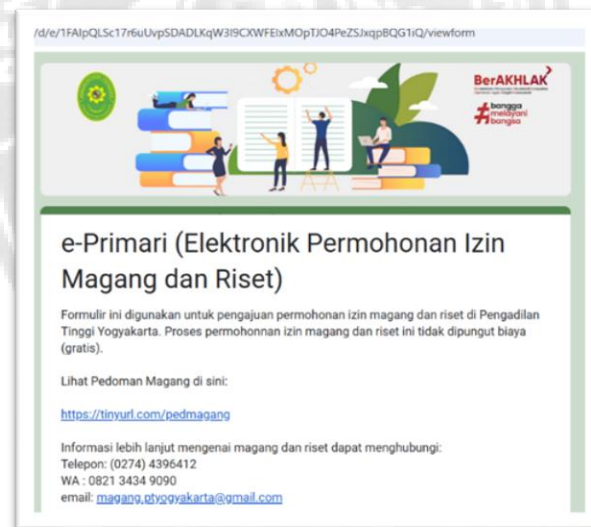


Gambar 5.29 Aplikasi E-Mosa Pengadilan Tinggi Yogyakarta

c. e-Primari

e-Primari (Elektronik Permohonan Izin Magang dan Riset) merupakan formulir digital yang digunakan untuk mengajukan permohonan izin magang dan riset di Pengadilan tinggi Yogyakarta.

Pengguna layanan ini tidak dikenakan biaya, tidak perlu datang ke Pengadilan, cukup diakses melalui online melalui website Pengadilan Tinggi Yogyakarta.



Gambar 5.30. Aplikasi Angkringan Pengadilan Tinggi Yogyakarta

d. Ruang Command Center

Command Center adalah sebuah ruangan khusus yang difungsikan sebagai Ruang Pusat Komando, Pembinaan, Pengawasan ataupun kegiatan lain yang dilakukan secara Daring. Tanpa harus berkunjung ke satuan kerja, Pimpinan Pengadilan Tinggi Yogyakarta bisa memantau langsung kinerja pegawai di setiap Pengadilan Negeri. Melalui tatap muka secara online,

pimpinan bisa memastikan kedisiplinan pegawai dan mengevaluasi apakah program-program yang sudah direncanakan sudah dijalankan dengan baik.

Disamping itu, masing-masing satuan kerja bisa memaparkan capaian yang telah dilakukan berikut kendala apa saja yang sedang dihadapi. Inventarisasi masalah tersebut nantinya menjadi data primer untuk pengambilan kebijakan bagi pimpinan tingkat wilayah ke depan.

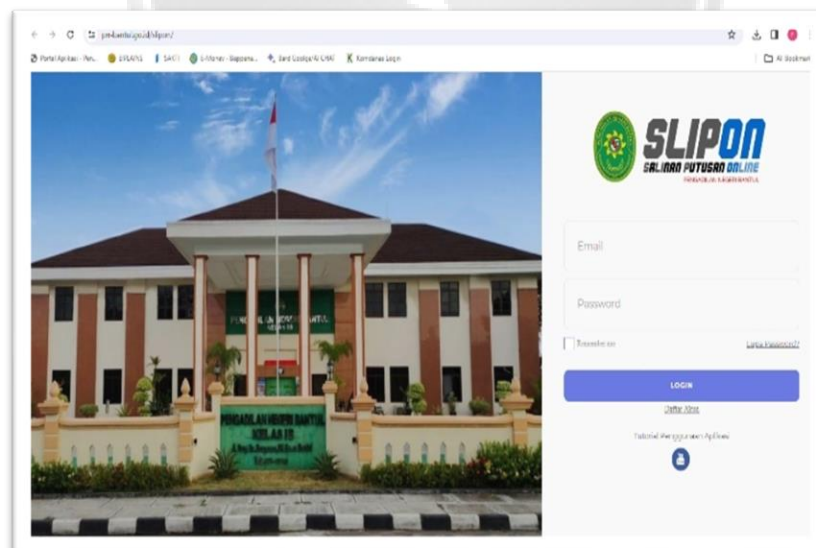
Dengan difungsikannya inovasi ini maka diharapkan tugas pokok Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai salah satu kawal depan Mahkamah Agung di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat terlaksana secara maksimal.

2. Pengadilan Negeri Bantul

Beberapa inovasi publik yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut :

a. Salinan Putusan Online (SLIP ON)

Aplikasi Salinan Putusan Online (SLIP ON) adalah Aplikasi formulir permohonan putusan berbasis website yang dikembangkan sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan sehingga masyarakat pencari keadilan yang telah putus perkaranya dapat langsung mengajukan permohonan Salinan putusan dari mana saja.



Gambar 5.31. Aplikasi SLIPON Pengadilan Negeri Bantul

b. Loker Konfirmasi dan Antrian Sidang

Adalah sebuah loket bagi para pihak yang terjadwal bersidang di hari tersebut untuk melakukan konfirmasi/ laporan kehadiran kepada petugas.

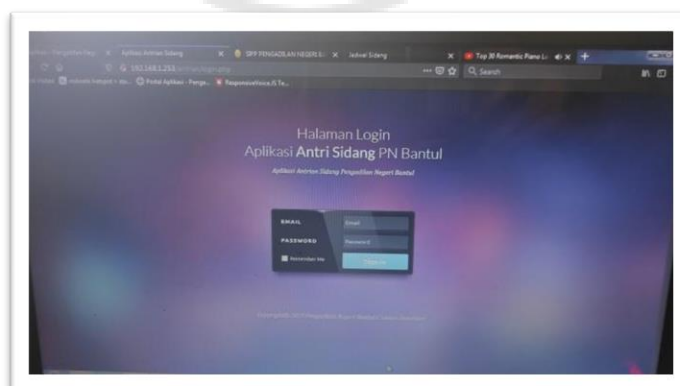
Fasilitas ini berguna untuk memudahkan, mempercepat dan menertibkan proses persidangan baik untuk pihak yang akan bersidang maupun untuk aparaturnya. Hal juga mendukung pengembangan zona integritas karena para pihak tidak akan bertemu langsung dengan panitera atau hakim secara langsung sebelum persidangan.

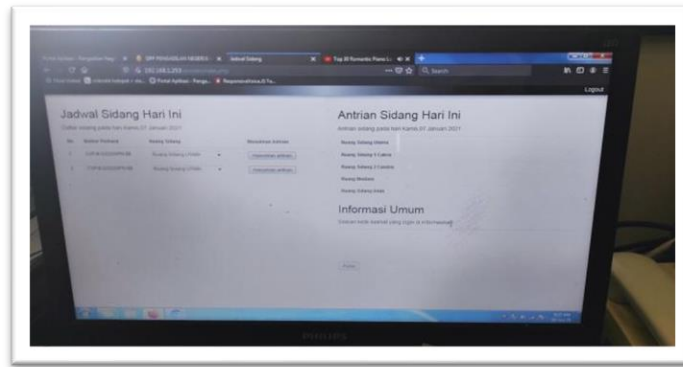
Manfaat dari adanya loket konfirmasi dan antrian sidang ini adalah:

- 1) Pembatasan akses para pihak untuk bertemu dengan Panitera/panitera pengganti secara langsung sebelum persidangan sangat berkurang
- 2) Para pihak dan/atau pengunjung persidangan lebih mendapatkan kepastian atas urutan persidangan.
- 3) Para pihak/pengunjung dapat mengetahui status kelengkapan pihak-pihak yang bersidang sehingga bisa segera bersidang.



Gambar 5.32. Loker Konfirmasi dan Antrian Sidang





c. Antrian PTSP

Layaknya sebuah meja layanan, maka dibutuhkan sistem antrian untuk memudahkan dan menertibkan masyarakat yang ingin menggunakan layanan hukum di pengadilan.

Manfaat sistem antrian PTSP :

- 1) Bagi institusi pengadilan, antrian ini memberikan manfaat pada keteraturan dan ketertiban dalam pelayanan kepada masyarakat, juga akan menambah tingkat kepercayaan masyarakat kepada pengadilan dengan.
- 2) Sedangkan bagi masyarakat, adanya sistem antrian ini akan memberikan jaminan bahwa masyarakat akan terlayani sesuai dengan loket dan nomor antrian yang telah didapatkan.

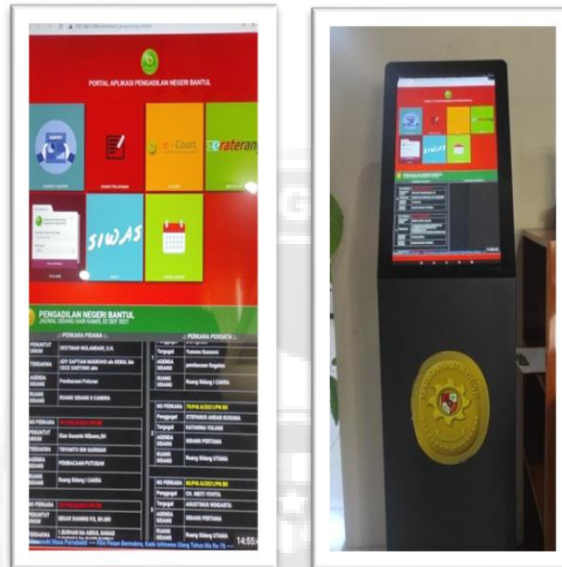


Gambar 5.33 Antrian PTSP Pengadilan Negeri Bantul

d. Anjungan Pelayanan Mandiri (APM)

Anjungan pelayanan mandiri adalah berupa perangkat kiosk touch screen yang berisi informasi dan layanan pengadilan Negeri Bantul. pengunjung dapat secara mandiri mengoperasikan berbagai layanan informasi yang ada di layar kios-ka tersebut. Diantara layanan-layanan tersebut adalah :

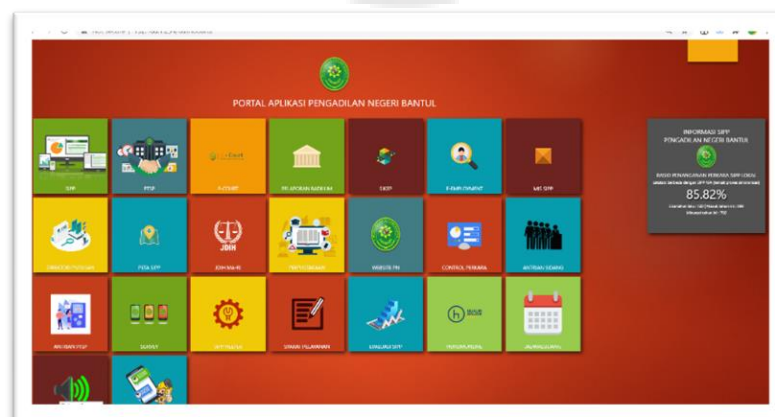
- 1) Layanan mandiri Survei IPK dan IKM secara elektronik
- 2) Aplikasi syarat layanan
- 3) Aplikasi e-court
- 4) Eraterang
- 5) E-Tilang
- 6) Aplikasi SIWAS
- 7) Jadwal sidang



Gambar 5.34 Anjungan Pelayanan Mandiri

e. Portal Aplikasi

Adalah aplikasi yang berguna sebagai portal atau “pintu” yang berisi kumpulan icon-icon untuk menuju aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam menjalankan tupoksi. Juga terdapat monitoring rasio penyelesaian perkara pada saat itu dalam bentuk persentase.



Gambar 5.35 Portal Aplikasi

f. BIMA

Adalah aplikasi inovasi pelayanan informasi berbasis pesan Whatsapp untuk menjawab permintaan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat akan dipandu untuk mengetik dengan format tertentu untuk dapat dijawab secara otomatis oleh sistem.

BIMA melayani informasi setiap hari selama 24 jam. Sehingga memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi kapan saja dan dimana saja tanpa harus datang langsung ke Kantor Pengadilan Negeri Bantul. Saat ini fitur BIMA telah dikembangkan menjadi assistant Hakim, Panitera dan Panitera Pengganti yang selalu mengingatkan jadwal sidang setiap hari.

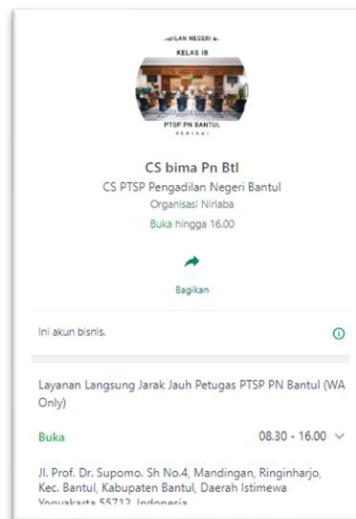


Gambar 5.36. Aplikasi BIMA pada website

Gambar 5.37 Tampilan percakapan dengan BIMA

g. Customer Service PTSP By BIMA

Customer Service PTSP adalah Layanan Langsung Jarak Jauh Petugas PTSP. CS PTSP ini merupakan pengembangan dari aplikasi whatsapp BIMA, apabila jawaban otomatis dari BIMA masih perlu konsultasi lebih lanjut dapat langsung terhubung dengan CS PTSP yang mana langsung mendapatkan jawaban dari petugas PTSP melalui whatsapp.



Gambar 5.38 CS PTSP BIMA

h. Layanan Antrian Difabel

Kebijakan untuk mendahulukan atau tidak ada antrian untuk para difabel. Sehingga para difabel akan langsung mendapatkan layanan dari petugas.



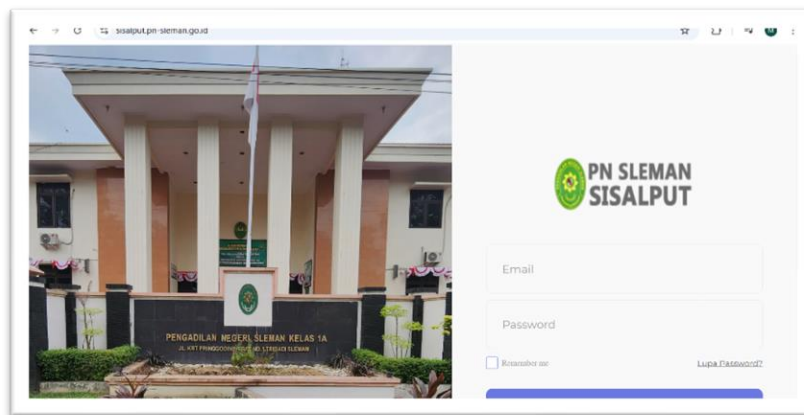
Gambar 5.39. Layanan Antrian Difabel

3. Pengadilan Negeri Sleman

Beberapa inovasi publik yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Sleman adalah sebagai berikut :

a. SISALPUT

SISALPut adalah aplikasi sistem informasi salinan putusan untuk mempermudah dan mempersingkat layanan permohonan salinan atau putusan melalui sistem aplikasi. Aplikasi SISALPut dapat diakses melalui link <https://sisalput.pn-sleman.go.id/>



Gambar 5.40 Aplikasi SISALPUT

b. Aplikasi Antrian Posbakum

Guna meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan di Pengadilan Negeri Sleman, khususnya peningkatan layanan hukum kepada masyarakat di Kabupaten Sleman, masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan Pos Bantuan Hukum/ POSBAKUM. Pengadilan Negeri Sleman membuat inovasi berupa aplikasi Antrian Posbakum pada Mesin Antrian. Yang semula antrian Posbakum hanya menggunakan kertas antrian yang dibagikan oleh petugas pelayanan, saat ini sudah bisa diakses mandiri oleh para pencari keadilan melalui mesin antrian.

c. Aplikasi Antrian Sidang

Antrian Sidang adalah layanan kepada pencari keadilan dimana para pihak yang berperkara akan dipanggil dan disebut nama pihak untuk memasuki ruang sidang dengan sistem yang sudah terkoneksi dengan Aplikasi Absensi Pihak (Roll Sidang) di Meja Informasi dan Terkoneksi dengan data perkara di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

d. Posbakum Masuk Desa

Salah satu Inovasi Layanan dari Pengadilan Negeri Sleman adalah Posbakum Masuk Desa. Program ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Daerah Kab. Sleman dengan Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Negeri Sleman. Dalam program tersebut akan dilaksanakan Sosialisasi dan Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu. Kegiatan ini dilakukan gratis/tidak dipungut biaya, masyarakat dapat memanfaatkan layanan berupa pemberian Informasi, Konsultasi/ Advis Hukum, Pembuatan Dokumen Permohonan penetapan kematian, perubahan akta lahir, gugatan, dll.



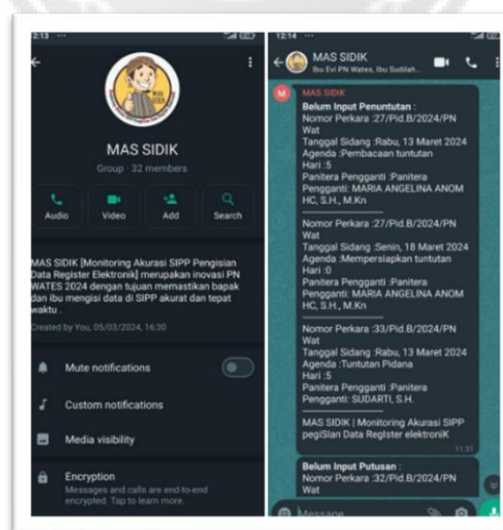
Gambar 5.41 Posbakum Masuk Desa

4. Pengadilan Negeri Wates

Beberapa inovasi publik yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Wates adalah sebagai berikut :

a. MAS SIDIK

Monitoring Akurasi SIPP Pengisian Data Register Elektronik (MAS SIDIK) merupakan salah satu inovasi Pengadilan Negeri Wates dengan memanfaatkan media whatsapp untuk mengingatkan terkait pengisian data pada SIPP agar sesuai dan akurat. Admin akan menyampaikan ketertiban dalam pengisian data SIPP pada pagi hari dan jam sebelum pulang kantor.



Gambar 5.42 MAS SIDIK

b. SERMO

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kemudahan akses informasi Pengadilan Negeri Wates membuat sebuah Inovasi Layanan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Inovasi ini diberi nama “SERMO” yaitu servis meja PTSP Online. Pada awal penggunaan aplikasi ini hanya menggunakan media Zoom Meeting yang belum memiliki fitur buku tamu untuk mengetahui jumlah pengguna layanan, namun saat ini sudah dilakukan update kedalam bentuk aplikasi web yang dapat diakses oleh siapapun, dari manapun, dan kapanpun ketika membutuhkan informasi terkait layanan yang ada di Pengadilan Negeri Wates. Saat ini aplikasi SERMO sudah memiliki fitur buku tamu sehingga dapat diketahui pengguna layanan. Selain itu aplikasi ini juga terkoneksi dengan aplikasi telegram sehingga ketika pengguna ada pengguna layanan, maka akan ada notifikasi yang masuk ke petugas PTSP. Aplikasi dapat diakses melalui link berikut : <https://sermo.pn-wates.go.id/>



Gambar 5.43 Aplikasi SERMO

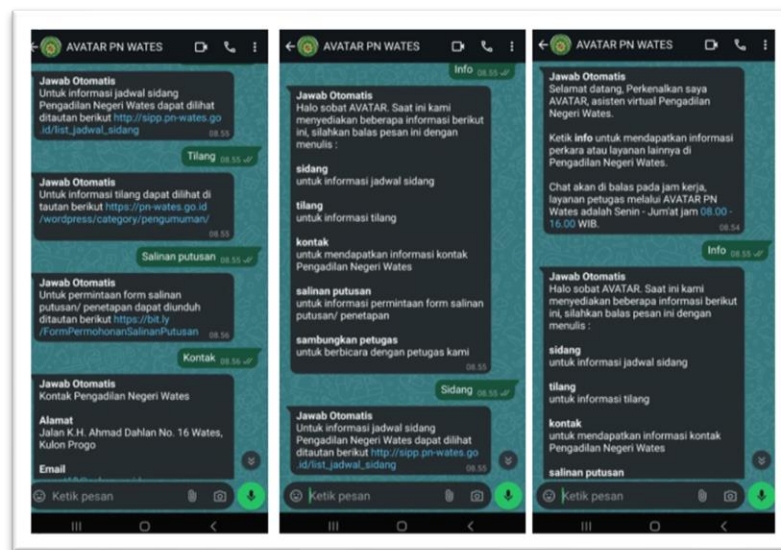
c. Aplikasi JUARA

Pada Pengadilan Negeri Wates ada beberapa proses bisnis yang masih dilakukan secara manual antara lain proses pengajuan cuti, pengajuan izin keluar kantor, dan permintaan nomor untuk surat keluar. Hal tersebut dirasa kurang efektif dan efisien. Untuk itu pada bulan Agustus Tahun 2024 Pengadilan Negeri Wates melaunching aplikasi JUARA. Untuk saat ini fitur-fitur yang ada pada aplikasi JUARA antara lain sebagai berikut : fitur pengajuan cuti tahunan, fitur pengajuan izin keluar kantor, fitur manajemen surat keputusan, fitur generate nomor surat keluar, fitur dokumen kontrol, dan fitur pengawasan bidang. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat proses bisnis yang diterapkan pada Pengadilan Negeri Wates, serta meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam

setiap tahap proses administrasi. Aplikasi ini berintegrasi dengan whatsapp untuk mengirim notifikasi. Aplikasi JUARA dapat diakses melalui link berikut : <https://juara.pn-wates.go.id/>

d. AVATAR

Inovasi ini memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi seputar pelayanan di Pengadilan Negeri Wates dengan cara chat langsung melalui aplikasi whatsapp, atau scan barcode yang nantinya langsung terhubung ke akun AVATAR. Kemudian pesan akan ditanggapi secara otomatis oleh chatbot.



Gambar 5.44. Layanan AVATAR

e. Brosur Braille

Brosur braille berisi standar pelayanan Pengadilan Negeri Wates yang disediakan khusus bagi penyandang disabilitas.



Gambar 5.45. Brosur Braille

f. Si Peri Manis

Inovasi ini digunakan untuk melakukan permohonan izin magang dan riset di Pengadilan Negeri Wates secara online.

5. Pengadilan Negeri Wonosari

Beberapa inovasi publik yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Wonosari adalah sebagai berikut :

a. SIVINA

SIVINA (Sistem Informasi Virtual Pengadilan) merupakan Pelayanan dan informasi Pengadilan Negeri Wonosari yang dapat diakses secara mudah melalui WhatsApp dengan nomor 081138000540. Layanan Sivina terdapat update fitur untuk internal pengadilan dengan menyajikan notifikasi MIS dan jadwal sidang. Untuk layanan eksternal juga disediakan, misalnya untuk melihat denda tilang bagi masyarakat, informasi perkara, dan informasi lainnya tentang Pengadilan Negeri Wonosari.

b. SIWALANG

SIWALANG (Siaran Wawasan Layanan Pengadilan) merupakan salah satu inovasi dari Pengadilan Negeri Wonosari untuk berbagi informasi layanan dan sistem pengadilan melalui kanal Youtube.

Siaran dilakukan secara rutin setiap hari Kamis minggu keempat setiap bulan. Telah dilakukan 15 edisi siaran radio bekerjasama dengan Radio Dhaksinarga Gunungkidul Dinas Kominfo Pemkab Gunungkidul sampai dengan bulan Desember 2024.



Gambar 5.46 SIWALANG

c. Mediator Desa

Peran Pengadilan Negeri Wonosari untuk masyarakat Kabupaten Gunungkidul yang dilakukan secara rutin adalah program mediator desa. Dengan kerjasama dengan Kantor Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik, Pengadilan Negeri Wonosari selalu dilibatkan menjadi narasumber kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Dalam kesempatan bertemu dengan warga inilah, Pengadilan Negeri Wonosari memberikan edukasi dan pemahaman antara lain tentang teknik mediasi, tentang hukum dan peradilan, serta menyampaikan inovasi-inovasi layanan, termasuk adanya program prodeo. Inovasi ini dilengkapi buku panduan mediator desa. Lomba inovasi Badilum tahun 2023 menempatkan inovasi Mediator Desa Pengadilan Negeri Wonosari sebagai juara III yang diberikan dalam acara penghargaan Abinaya Upangga Wisesa oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 11 Desember 2023 di Jember. Pada tahun 2024 ini program ini masih berlanjut dengan beberapa kali sosialisasi ke kelurahan bekerjasama dengan Pemkab Gunungkidul.

d. UMK CERDASKUM

Pengadilan Negeri Wonosari pada pertengahan tahun 2023 ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk menjadi salah satu *pilot project* pengadilan negeri pemberi layanan untuk pelaku UMKM di Kabupaten Gunungkidul, termasuk layanan pembebasan perkara (prodeo) dan layanan pos bantuan hukum untuk perkara yang dihadapi UMKM. Tahun 2024 Badilum masih memantau pelaksanaan UMK Cerdaskum ini meskipun masih sulit diimplementasikan.

e. Pusat Disabilitas

Pengadilan Negeri Wonosari sejak tahun 2016 telah mengembangkan Layanan Ramah Difabel (Peradilan Inklusif) bagi kaum rentan dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan layanan dan mencari informasi di Pengadilan Negeri Wonosari. Pengembangan Layanan Ramah Difabel ini dimulai dengan pemenuhan sarana dan prasarana khusus seperti : guiding block, buku tamu elektronik, handrail di lingkungan pengadilan, booklet pengadilan dan Alqur'an dengan huruf braille, video informasi dengan bahasa isyarat, tempat wudhu, toilet, kursi tunggu prioritas, tempat parkir serta jalur masuk khusus untuk penyandang disabilitas, kursi roda, blind stick dan alat bantu pendengaran. Selain itu Pengadilan Negeri Wonosari juga bekerja sama dengan SLB Bhakti Putra dalam memberikan pelatihan kepada Petugas PTSP

mengenai tatacara pelayanan kepada penyandang disabilitas, serta bekerja sama dengan SIGAB dalam memberikan pendampingan dan penerjemah terhadap penyandang difabel di persidangan.

f. SABILA

SABILA (Sahabat Disabilitas) merupakan inovasi Pengadilan Negeri Wonosari Untuk mewujudkan Kesamaan dihadapan hukum (*Equality Before the Law*) dan mendekatkan pelayanan kepada pencari keadilan tak terkecuali bagi penyandang disabilitas. SABILA mempunyai tugas dan kewenangan dalam pelayanan penyandang disabilitas pada Pengadilan Negeri Wonosari di semua bidang layanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara terukur dan tuntas sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pengguna layanan disabilitas akan terbantu dengan adanya SABILA (Sahabat Disabilitas) karena mereka akan dipandu dan dibantu dalam memperoleh layanan pengadilan dimulai dari Pendaftaran permohonan layanan sampai dengan penyerahan produk layanan yang mohonkan.

6. Pengadilan Negeri Yogyakarta

Beberapa inovasi publik yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah sebagai berikut :

a. Kerjasama Peningkatan Pelayanan Publik Di Kota Yogyakarta

Kerjasama ini sebagai landasan koordinasi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan pelayanan publik di Kota Yogyakarta. Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya para pihak dalam meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap hukum. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kerjasama di bidang hukum, integrasi data dan pelayanan terpadu. Kerjasama ini merupakan dasar untuk dijadikan sebagai dasar hukum untuk perjanjian kerjasama dengan SKPD di lingkungan Pemkot Yogyakarta.

b. Kerjasama Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)

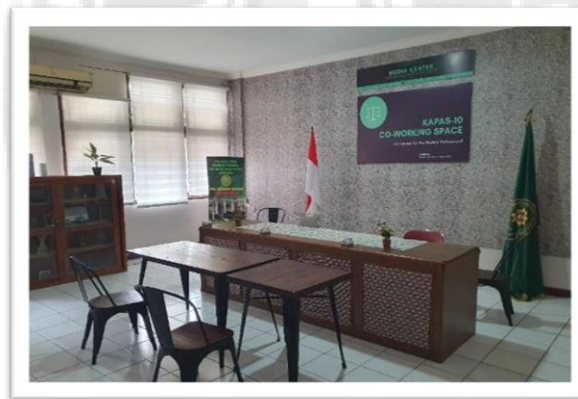
Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, Rumah Tahanan Kelas II Yogyakarta. Maksud dan tujuan kerjasama tersebut adalah meningkatkan kemampuan sumber daya manusia para pihak dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat, optimalisasi fungsi koordinasi antara Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dan Rumah

Tahanan Klas II Yogyakarta, menciptakan sistem peradilan pidana terpadu dalam memanfaatkan teknologi, serta mewujudkan masyarakat yang taat akan hukum yang berlaku. Ruang lingkup Kesepakatan Bersama meliputi kegiatan penyuluhan hukum, kerjasama di bidang hukum, pelayanan sidang terpadu dan sistem peradilan pidana terpadu agar masyarakat taat terhadap hukum yang berlaku.

c. Coworking Space dan Media Center Pengadilan Negeri Yogyakarta

Fasilitas ruang publik yang dapat dipergunakan untuk bekerja oleh mereka yang berkunjung ke pengadilan tersebut, dimana terdapat beberapa meja dan kursi layaknya di sebuah café. Fasilitas yang disediakan berupa stop kontak untuk mengisi daya listrik ke laptop maupun telepon genggam, free wifi.

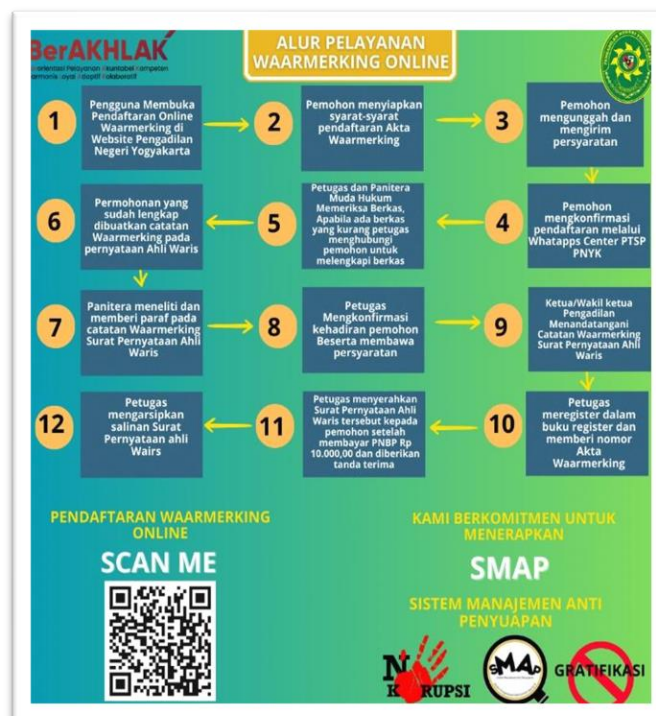
Ruangan tersebut bukan hanya untuk bekerja para mitra pengadilan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai media center dan ruang pertemuan. Bilamana terdapat perkara-perkara yang menarik perhatian publik, bagian Humas Pengadilan akan mempersiapkan *press release* dan memberikan keterangan pers di ruangan tersebut.



Gambar 5.47 Co working space & Media Center

d. Pendaftaran Waarmerking Online

Waarmerking merupakan pengesahan Akta dibawah tangan yang digunakan khusus untuk mengambil Uang/Tabungan/Deposito/Safe Deposit Box di bank oleh ahli waris. Dengan adanya layanan pendaftaran waarmerking secara Online, pemohon dapat mendaftar dan melengkapi berkas dengan mengakses pendaftaran Online dari mana saja, sehingga hanya perlu satu kali kunjungan dan proses layanan dapat selesai lebih cepat.



Gambar 5.48 Prosedur Waarmeking

e. Pencatatan Permohonan dan Upaya Hukum Perkara Pidana

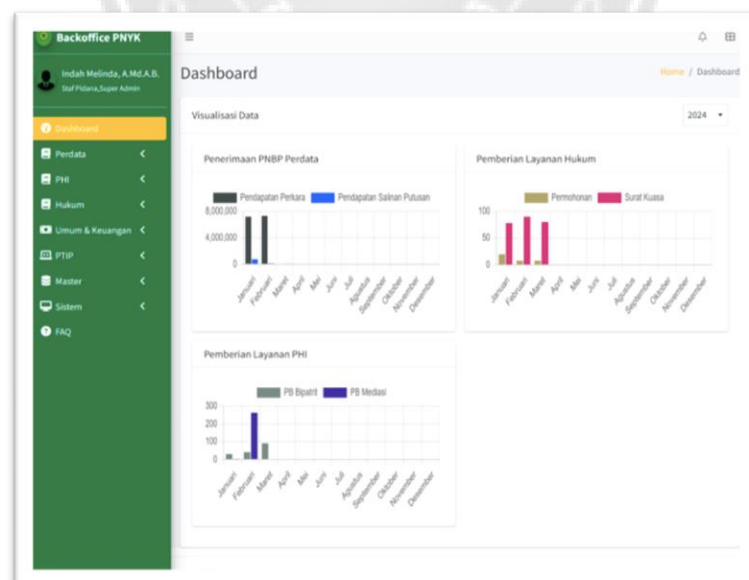
Upaya Hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pengadilan Negeri Yogyakarta menyediakan Formulir Digital e-UPAKUM PIDANA yang dapat diakses pada website Pengadilan Negeri Yogyakarta. e-UPAKUM PIDANA merupakan formulir digital yang dapat di gunakan para pihak pencari keadilan untuk melakukan pencatatan permohonan dan pengajuan upaya hukum perkara pidana di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Upaya Hukum Perkara Pidana yang dapat diajukan berupa Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi.



Gambar 5.49 Prosedur Upakum

f. Back Office

Aplikasi Back Office merupakan inovasi yang terintegrasi antara Petugas PTSP dengan back office sehingga pelayanan dapat diproses secara real time dan membantu dalam pencatatan administrasi pengadilan secara digital menggantikan proses pencatatan pada buku manual. Fitur yang tersedia meliputi : Register PNPB, Register Eksekusi, Register Bipatrit, Register Surat Kuasa, Register Permohonan Salinan Putusan.



Gambar 5.50 Backoffice



PENGAWASAN

BAB VI

A. Internal

Pengawasan pada dasarnya merupakan pengendalian (controlling) yang bertujuan menghentikan atau menghilangkan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan dan mengurangi hambatan-hambatan. Melalui pengawasan ini organisasi berusaha untuk mengevaluasi apakah tujuan dapat dicapai, dan apabila tidak dapat dicapai dicari faktor penyebabnya melalui tindakan perbaikan. Pelaksanaan pengawasan regular dalam rangka pembinaan pada tahun 2024 telah dilaksanakan selama 2 (dua) kali yaitu pada bulan Mei 2024 (Semester I) dan November 2024 (Semester II).

1. Ruang Lingkup Pengawasan

a. Pengawasan Bidang

Pengawasan Bidang pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dilaksanakan sesuai Lampiran I Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/8R/VIII/2006 Tanggal 24 Agustus 2006 yaitu melakukan pengawasan secara rutin terhadap jalannya peradilan sesuai dengan kewenangannya. Fungsi dari Pengawasan Bidang ini adalah :

- 1) Menjaga agar pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi sesuai dengan rencana dan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku;
- 2) Mengendalikan administrasi peradilan tetap terkelola dengan tertib dan dilakukan dengan sebaik-baiknya;
- 3) Menjamin terwujudnya penyelenggaraan peradilan dan pelayanan publik yang baik.

Hakim Tinggi Pengawas Bidang telah melaksanakan pengawasan ke masing-masing bidang dan telah membuat laporan hasil pengawasan dimaksud secara rutin setiap bulan. Hasil pengawasan telah dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku koordinator pengawasan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Sebagai dasar pelaksanaan pengawasan bidang adalah :

- 1) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan Peradilan;

- 2) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tentang tanggung Jawab Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Pengawasan;
- 3) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 100/KPT.W13-U/SK.KP3.4.2/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Bidang, Humas dan Protokol pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- 4) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 99/KPT.W13-U/SK.KP3.4.2/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- 5) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 22/KPT.W13-U/SK.KP3.4.2/II/2024 tanggal 19 Januari 2024 Perihal Tim Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Tim Satgas SIPP) Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

Hasil dari pengawasan tersebut berupa evaluasi apakah kondisi yang ada telah sesuai atau terdapat ketidaksesuaian. Kondisi yang ada akan diproyeksikan kepada regulasi yang ada dan SOP yang berlaku. Hasil pengawasan/ evaluasi tersebut dituangkan dalam buku pengawasan bidang yang terdiri dari Kondisi, Kriteria, Sebab-Akibat, Rekomendasi dan Tindak Lanjut.

b. Pengawasan Daerah

Pengadilan Tingkat Banding selaku Voorpost Mahkamah Agung RI harus dapat memastikan implementasi fungsi pengawasan dan pembinaan sebagai atasan langsung terhadap bawahannya sebagaimana termuat dalam Paket Kebijakan tentang Pengawasan dan Pembinaan dalam PERMA Nomor 7,8 dan 9 Tahun 2016. Untuk mengefektifkan jalannya pengawasan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah, Pengadilan Tinggi Yogyakarta melaksanakan Pengawasan Daerah secara rutin langsung ke Satuan Kerja dan Pengawasan Daerah secara online melalui zoom meeting.

Pada tahun 2024, Pemeriksaan dan Pengawasan ke Pengadilan Tingkat Pertama telah dilaksanakan oleh Tim Pengawas dan Pemeriksa Pengadilan Tinggi Yogyakarta sesuai dengan Surat

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 99/KPT.W13-U/SK.KP3.4.2/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Hakim Pengawas Daerah melakukan pengawasan rutin/ regular. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Hakim Tinggi dengan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan. Substansi pengawasan tersebut mengacu kepada Tata Laksana Pengawasan Peradilan (Buku IV).

Hakim Tinggi Pengawas Daerah melakukan pengawasan terhadap Pengadilan Negeri meliputi seluruh proses pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi pengadilan. Selain mengacu kepada Buku IV, para Hakim Tinggi Pengawas Daerah juga mempedomani Standar Checklist Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI. Hasil dari pengawasan tersebut dituangkan pada Laporan Hasil Pengawasan (LHP) kemudian Pengadilan Negeri akan menyusun Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP). Kemudian hasil dari Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) akan dibuat Monitoring dan Evaluasinya oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah.

Berikut adalah matriks Pengawasan Daerah yang telah dilaksanakan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada Semester I:

No.	Satuan Kerja	Waktu Pelaksanaan	Tim Pengawas
1	PN Yogyakarta	7 Mei s/d 8 Mei 2024	Dr. Ifa Sudewi, S.H, M.Hum
			Achmad Yusak, S.H, M.H
			Eddy Risdianto, S.H, M.H.
			Zulfahmi Anwar, S.H.,M.H.
			Rosyidatus Syarifeini, S.Psi
			Hendra Baju Broto K, S.H
			Toni Subagyo, A.Md, S.H
			Budi Surono
			Anggi Reky Hertanti, S.M
2	PN Bantul	13 Mei s/d 14 Mei 2024	Dr. Ifa Sudewi, S.H, M.Hum
			Sutadi Widayatno, S.H, M.Hum



			Harini, S.H, M.H.
			Suramin, S.H.,M.H.
			Erwan Hermawan, S.Kom
			Ratna Dewanti, S.H
			Nanda Aprilia Suri, A.Md, Ak
			Budi Surono
			Anggi Reky Hertanti, S.M
3	PN Wonosari	14 Mei s/d 15 Mei 2024	Dr. Ifa Sudewi, S.H, M.Hum
			Sutanto, S.H, M.H.
			Sugiyanto, S.H, M.Hum.
			Sutoto, S.H
			Rina Widiastuti, S.E, M.B.A
			Cordula Catur Rini W, S.H, M.H
			Mega Mayangsari, S.I.P
			Budi Surono
			Iswanto
4	PN Sleman	15 Mei s/d 16 Mei 2024	Dr. Ifa Sudewi, S.H, M.Hum
			Tatik Hadiyanti, S.H, M.H
			Permadi W., S.H, M.Hum.
			Suhardi, S.H
			Nur Hasanah, S.H, M.B.A.
			Heru Prayitno, S.H
			Tri Kusumaningrum R, S.M
			Budi Surono
			Anggi Reky Hertanti, S.M
5	PN Wates	16 Mei s/d 17 Mei 2024	Dr. Ifa Sudewi, S.H, M.Hum
			Nurdiyatmi, S.H
			Suprabowo, S.H, M.H.
			Sumarmin, S.H.,M.H.
			Sugito, S.H

			Nanik Mulyani Sri Utami, S.H
			Mega Annisa, S.Kom
			Budi Surono
			Iswanto

Berikut adalah matriks Pengawasan Daerah yang telah dilaksanakan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada Semester II:

No	Satuan Kerja	Waktu Pelaksanaan	Tim Pengawas
1	PN Yogyakarta	14 November s/d 15 November 2024	Dr. Pujiastuti Handayani, S.H, M.H.
			Unggul Ahmadi, S.H, M.H
			Harini, S.H, M.H.
			Sumarmin, S.H
			Sri Hartaty, S.H, M.Si.
			Nur Yusuf Irawan, S.T, S.H
			Krisna Hadi Yuda R, S.E
			Budi Surono
			Iswanto
2	PN Bantul	11 November s/d 12 November 2024	Dr. Pujiastuti Handayani, S.H, M.H.
			Teguh Sri Rahardjo, S.H, M.Hum
			Ekowati Hari Wahyuni, S.H
			Suramin, S.H, M.H
			Yulita Sri Widayati, S.H
			RR. Nurahayu M., S.H
			Susriyani, S.H
			Budi Surono
			Iswanto
3	PN Wonosari		Dr. Pujiastuti Handayani, S.H, M.H.

		25 November s/d 26 November 2024	Dr. Bambang Krisnawan, S.H, M.H.
			Retno Purwandari Y., S.H, M.H.
			Suhardi, S.H
			Jaka Purwanto, S.H
			Wiratno, S.H
			Muhammad Sholeh N. A.Md
			Budi Surono
			Sugeng Ariyanto
4	PN Sleman	6 November s/d 7 November 2024	Dr. Pujiastuti Handayani, S.H, M.H.
			Tamto, S.H, M.H
			Dwi Sudaryono, S.H, M.H.
			Hariyanta, S.H, M.H.
			Katno, S.H
			Waljiyanto, S.T, M.M.
			Deby Aryanto Syahputra, S.Psi
			Budi Surono
5	PN Wates	4 November s/d 5 November 2024	Iswanto
			Dr. Pujiastuti Handayani, S.H, M.H.
			Djoko Indiarito, S.H, M.H
			Annastacia Tyas Endah E.N., S.H
			Nanik Mulyani Sri Utami, S.H
			Narti Hartati, S.H
			Juli Astuti, S.E
			Zeno Dwi Kuncoro, S.T
			Budi Surono
			Sugeng Ariyanto

c. Pembinaan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan pada saat Pengawasan Daerah secara langsung ke Satuan Kerja maupun secara online melalui zoom meeting akan menjadi bahan Pembinaan oleh Pimpinan. Berikut adalah matriks pembinaan Teknis dan Administrasi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk Pengadilan Tingkat Pertama se-wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah dilaksanakan pada :

No	Satuan Kerja	Waktu	Pembina
1	Pengadilan Negeri Yogyakarta	24/9/2024	Setyawan Hartono, S.H., M.H.
2	Pengadilan Negeri Sleman	23/9/2024	Setyawan Hartono, S.H., M.H.
3	Pengadilan Negeri Wates	15/10/2024	Setyawan Hartono, S.H., M.H.
4	Pengadilan Negeri Wonosari	10/10/2024	Setyawan Hartono, S.H., M.H.
5	Pengadilan Negeri Bantul	11/10/2024	Setyawan Hartono, S.H., M.H.

a) Penanganan Pengaduan

Pengaduan yang diajukan pada lembaga peradilan dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain:

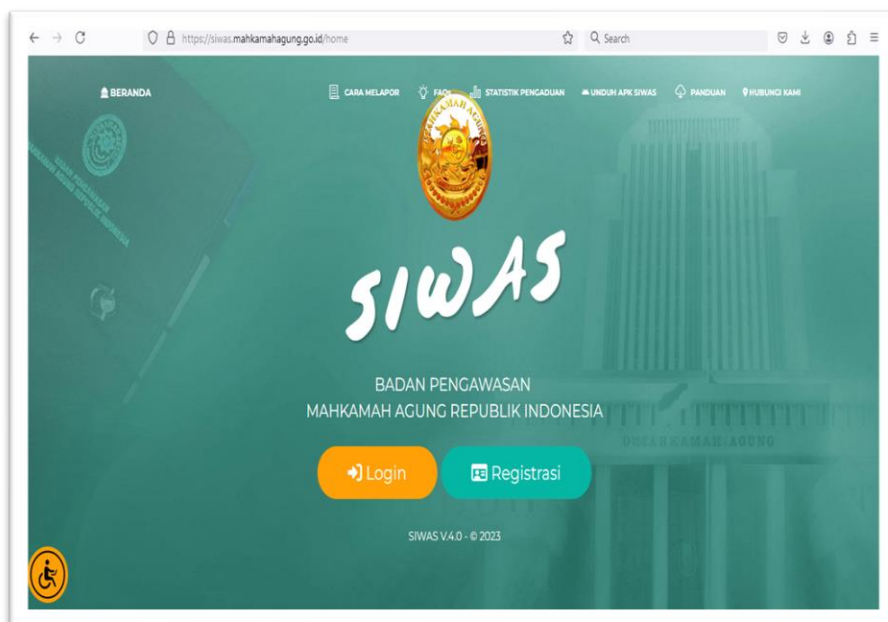
- Pengaduan masyarakat, meliputi pengaduan-pengaduan yang ditujukan terhadap Aparat Peradilan atau mutu pelayanan publik pengadilan. Pengaduan ini umumnya diajukan oleh para pencari keadilan, Pengacara, dan Lembaga Bantuan Hukum yang langsung diajukan kepada Mahkamah Agung atau Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama. Ada kalanya pengaduan tersebut disampaikan oleh masyarakat umum melalui Lembaga Swadaya Masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden atau Wakil Presiden, Komisi Yudisial, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Hukum Nasional, Komisi Ombudsman Nasional dan lain-lain.
- Pengaduan Internal, yaitu pengaduan yang ditujukan terhadap Aparat Peradilan dan diajukan oleh warga Pengadilan

sendiri (termasuk keluarganya).

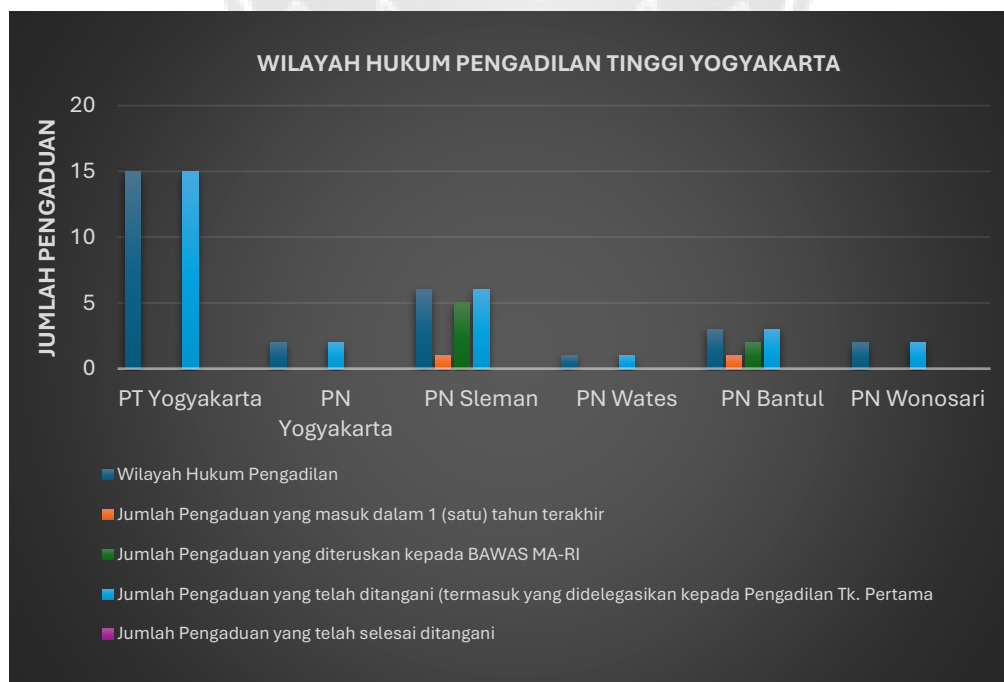
- c) Laporan Kedinasan yang merupakan laporan resmi dari Pimpinan Pengadilan mengenai Aparat Pengadilan yang dipimpinnya.
- d) Informasi yang diperoleh dari instansi lain, atau berita melalui media massa, atau dari isu-isu yang berkembang.
- e) Berbagai pengaduan di atas pada umumnya meliputi hal-hal antara lain :
 - i. Penyalahgunaan wewenang / jabatan.
 - ii. Pelanggaran sumpah jabatan.
 - iii. Dugaan melakukan tindak pidana.
 - iv. Mal-administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, atau kekeliruan, atau kelalaian yang bersifat administratif
 - v. Pelanggaran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja, maupun karena kelalaian dan ketidak pahaman.
 - vi. Pelayanan publik yang tidak memuaskan, yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya mengenai aspek waktu, biaya, dan atau perilaku.
 - vii. Pelanggaran terhadap kode etik dan code of conduct Hakim.
 - viii. Perbuatan tercela, yaitu berupa perbuatan-perbuatan amoral, asusila, atau perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan maupun selaku anggota masyarakat.
 - ix. Tindakan indiscipliner.
 - x. Tindakan arogansi.
- f) Pengaduan secara Online

Dalam upaya melaksanakan keterbukaan informasi, Pengadilan Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah membuka aplikasi pengaduan secara online, dengan alamat website: siwas.mahkamahagung.go.id. Dimana dengan adanya aplikasi pengaduan secara online tersebut maka setiap orang yang ingin melaporkan dan mengadukan sesuatu cukup mengakses situs

tersebut, bisa mengisi sendiri, minta bantuan meja informasi dan pengaduan pengadilan terdekat, ataupun dengan mengirimkan pengaduannya melalui surat ataupun email ke pengadilan yang dituju.



Gambar 6.1. Tampilan Aplikasi Pengaduan secara online (siwas)



Grafik 6.1. Pengaduan Yang Masuk Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta

No.	Wilayah Hukum Pengadilan	Jumlah Pengaduan yang masuk dalam 1 (satu) tahun terakhir	Jumlah Pengaduan yang diteruskan kepada BAWAS MA-RI	Jumlah Pengaduan yang telah ditangani (termasuk yang didelegasikan kepada Pengadilan Tk. Pertama	Jumlah Pengaduan yang telah selesai ditangani	Jumlah sisa Pengaduan pada waktu berjalan	Jumlah Hakim dan Pegawai Non-Hakim yang dijatuhi hukuman disiplin dengan menyebutkan nama, pangkat, dan satuan kerja yang bersangkutan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PT Yogyakarta	15	0	0	15	0	0
2	PN Yogyakarta	2	0	0	2	0	0
3	PN Sleman	6	1	5	6	0	0
4	PN Wates	1	0	0	1	0	0
5	PN Bantul	3	1	2	3	0	0
6	PN Wonosari	2	0	0	2	0	0

**Tabel 6.1. Pengaduan Yang Masuk Dalam Wilayah Hukum
Pengadilan Tinggi Yogyakarta**

2. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2024

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali (per triwulan). Adapun hasil survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Tinggi Yogyakarta dari triwulan I sampai dengan triwulan IV adalah sebagai berikut:

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali (per triwulan). Adapun hasil survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Tinggi Yogyakarta dari triwulan I sampai dengan triwulan IV adalah sebagai berikut:

a. Triwulan I



Gambar 6.2 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan I

b. Triwulan II



Gambar 6.3 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan II

c. Triwulan III

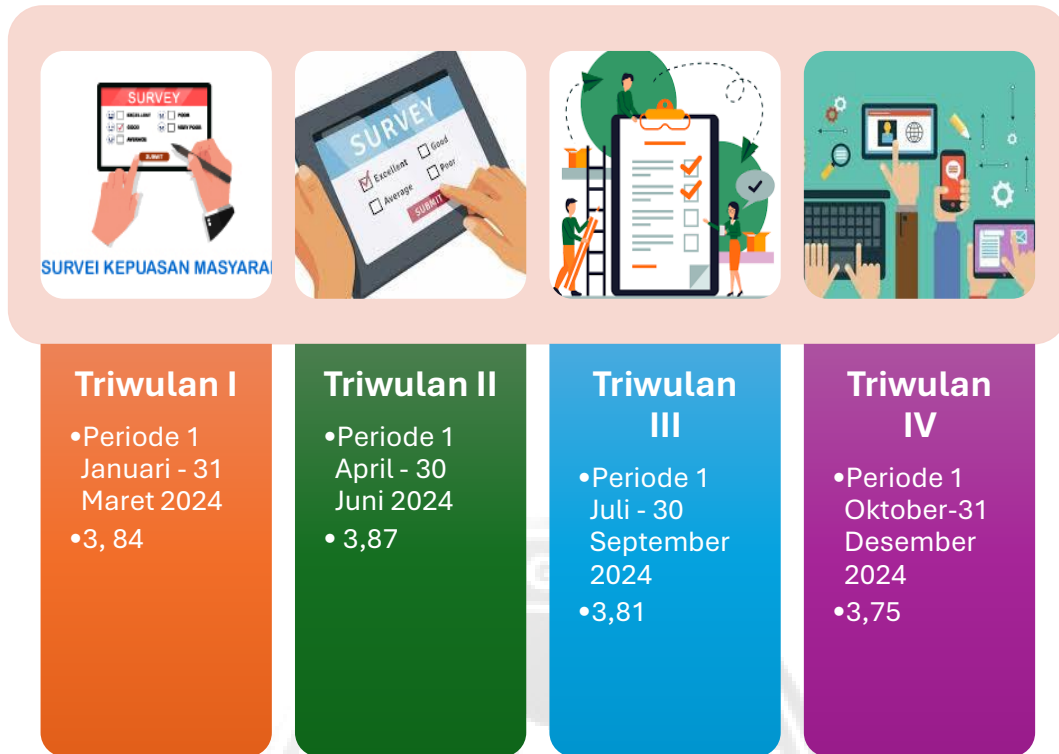


Gambar 6.4 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan III

d. Triwulan IV



Gambar 6.5 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan IV



Tabel 6.2 Rekapitulasi Nilai SKM Tahun 2024

Berikut Rekapitulasi 3 (Tiga) Nilai terendah dari Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024. Untuk kelengkapan data tindak lanjutnya sudah dilaporkan dalam laporan tindak lanjut survei tahun 2024.

3 (Tiga) Nilai Terendah Untuk SKM Tahun 2024		
3.725	3.795	3.798
• Waktu Pelayanan	• Persyaratan	• Prosedur

3. Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Tahun 2024

Survei Persepsi Anti Korupsi dilaksanakan setiap 3 bulan sekali (per triwulan). Adapun hasil survei Indeks Persepsi Anti Korupsi Tinggi Yogyakarta dari triwulan I sampai dengan triwulan IV adalah sebagai berikut:

a. Triwulan I



Gambar 6.6 Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan I

b. Triwulan II



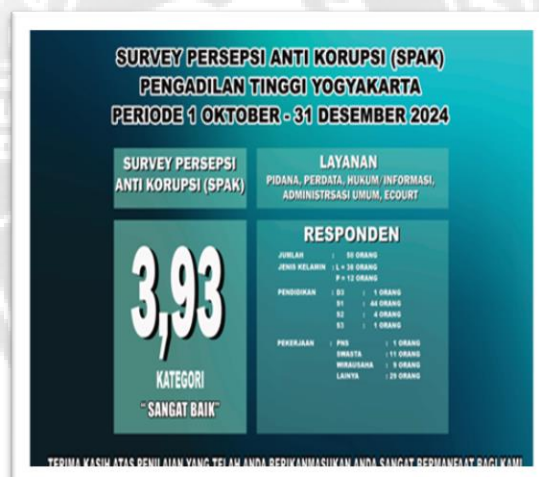
Gambar 6.7 Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan II

c. Triwulan III



Gambar 6.8 Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan III

d. Triwulan IV

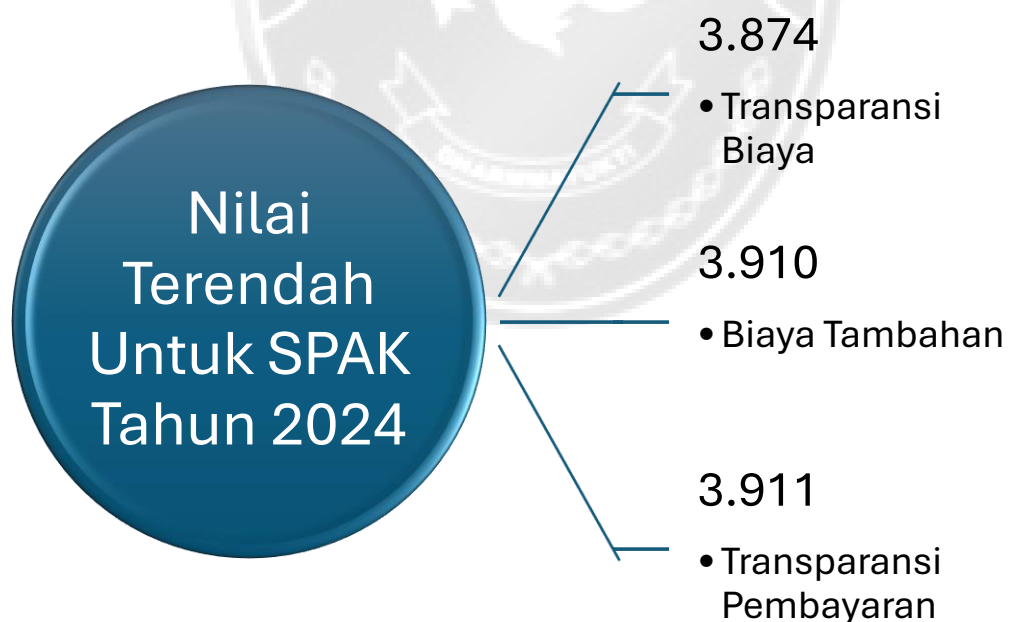


Gambar 6.9 Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan IV

 Triwulan I •Periode 1 Januari - 31 Maret 2024 •3,93	 Triwulan II •Periode 1 April - 30 Juni 2024 •3,98
 Triwulan III •Periode 1 Juli - 30 September 2024 •3,94	 Triwulan IV •Periode 1 Oktober - 31 Desember 2024 •3,93

Tabel 6.3 Rekapitulasi Nilai SPAK Tahun 2024

Berikut Rekapitulasi 3 (Tiga) Nilai terendah dari Survei Persepsi Anti Korupsi Tahun 2024. Untuk kelengkapan data tindak lanjutnya sudah dilaporkan dalam laporan tindak lanjut survei tahun 2024.



B. Evaluasi

1. Evaluasi Berjenjang

Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum D.I.Yogyakarta mengadakan rapat berjenjang untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi tiap bagian agar semua tugas dan fungsi masing-masing bagian berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi yang sama.

Rapat berjenjang dimulai dari :

- a. Rapat tiap panmud/subbagian;
- b. Rapat tiap panmud/subbagian bersama hakim pengawas bidang;
- c. Rapat kepaniteraan/kesekretariatan;
- d. Rapat bulanan yang dihadiri oleh seluruh pegawai.

Rapat berjenjang ini masing-masing dilaksanakan minimal 1 (satu) bulan sekali. Rapat berjenjang merupakan bagian dalam sistem akreditasi penjaminan mutu yang mensyaratkan untuk setiap satker pada Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya untuk melaksanakan sistem tersebut, yang nantinya hasil rapat berjenjang tersebut akan dibahas ke dalam rapat rutin bulanan/briefing.

Rapat rutin bulanan/briefing membahas berbagai persoalan serta mengevaluasi hasil temuan dari Hakim Pengawas Bidang, permasalahan di tingkat kepaniteraan/kesekretariatan, dan lain-lain. Rapat ini diharapkan bisa menjadi tolak ukur dalam menghadapi rapat bulanan yang dilaksanakan pada bulan berjalan. Hasil evaluasi tersebut, kemudian dilakukan perbaikan secara komprehensif dan menyeluruh oleh masing-masing bidang. Temuan-temuan atau ketidaksesuaian dari hasil pengawasan regular oleh Tim Pengawas dan Pemeriksa Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sudah ditindaklanjuti oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan dilakukan evaluasi oleh Tim Pengawas dan Pemeriksa Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

2. Evaluasi Pengawasan Bidang

- a. Pengawasan bidang oleh hakim pengawas bidang baik di Pengadilan Tinggi Yogyakarta maupun di Pengadilan Negeri se Daerah Istimewa Yogyakarta telah berjalan tertib dijalankan 1 (satu) kali dalam sebulan;

- b. Temuan-temuan yang berupa ketidaksesuaian akan dicatat dalam buku pengawasan;
- c. Hakim pengawas bidang secara tertib membuat laporan hasil pengawasan bidang setiap bulan dan hal tersebut akan dimonitor dan dievaluasi oleh Ketua Pengadilan;
- d. Melalui pengawasan bidang ini maka permasalahan yang terjadi di tiap bidang dapat ditelusuri secara dini dan akan mendapat jalan keluar sesuai rekomendasi dari hakim pengawas bidang;
- e. Terhadap temuan-temuan tersebut telah dibuat tindak lanjutnya.

3. Evaluasi Asesmen Evaluasi Kinerja Internal Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Asesmen internal merupakan bagian dalam Evaluasi Kinerja Penjaminan Mutu. Melalui asesmen Internal yang diselenggarakan 2 (dua) kali dalam satu tahun, dapat diketahui kesesuaian maupun ketidaksesuaian kinerja dari pengadilan. Tahapan-tahapan dalam asesmen internal didahului dengan rencana pelaksanaan dan penyusunan daftar pertanggal, maka akan lebih mengefektifkan pengawasan. Pelaksanaannya Asesmen Internal Evaluasi Kinerja Penjaminan Mutu dilakukan secara silang di antara hakim pengawas bidang.

4. Evaluasi Pengawasan Daerah dan Asesmen Evaluasi Kinerja ke Pengadilan Negeri se-Daerah Istimewa Yogyakarta

Pengawasan daerah yang dilakukan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah, 2 (dua) kali dalam setahun meliputi seluruh proses pelayanan yang menjadi tugas pokok pengadilan. Dengan pengawasan daerah maka administrasi pengadilan yang terdiri dari manajemen peradilan, administrasi perkara, administrasi persidangan dan administrasi umum akan berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

Selain itu pengawasan daerah juga berbarengan dengan pelaksanaan Asesmen Evaluasi Kinerja ke Pengadilan Negeri se wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Checklist Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Dalam kegiatan Pengawasan Daerah dan Asesmen Evaluasi Kinerja terdapat kewajiban bagi satuan kerja untuk menindaklanjuti temuan-temuan. Hal tersebut tentu berdampak positif terhadap penyelenggaraan peradilan demi tercapainya sasaran strategis terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

**PENUTUP****BAB VII****A. Kesimpulan**

Dari uraian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 sebagaimana disampaikan di depan dapat diambil kesimpulan antara lain:

1. Penyelesaian perkara di tingkat banding maupun tingkat pertama telah dilaksanakan secara optimal dengan didukung aplikasi SIPP, E-Berpadu dan E-Court untuk pelaksanaan pengelolaan perkara, aplikasi MIS dan EIS untuk monitoring dan evaluasi.
2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia dilaksanakan dengan baik dengan didukung teknologi informasi, kebutuhan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia bagi hakim dan pegawai masih diperlukan, agar dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan prima.
3. Realisasi DIPA seluruh satker di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta cukup tinggi mencapai angka diatas 97% - 99,89%, dengan didukung sarana dan prasarana serta Teknologi Informasi yang memadahi tugas pokok dan fungsi berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat kekurangan anggaran operasional dan sarana/ prasarana pendukung.
4. Pelayanan publik telah dilaksanakan dengan inovasi-inovasi yang telah dikembangkan dan diterapkan pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan seluruh Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta, masing-masing pengadilan sudah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
5. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Kepaniteraan Muda dan sub Bagian pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se D.I. Yogyakarta telah diawasi secara rutin oleh Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas Daerah yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta.'

B. Rekomendasi

Kedepan agar dapat meningkatkan kinerja kami merekomendasikan :

1. Aplikasi pengelolaan perkara dan aplikasi monitoring dan evaluasi agar selalu diupdate menyesuaikan perkembangan Teknologi Informasi dan kebijakan terbaru
2. Kebutuhan diklat untuk meningkatkan kompetensi bagi hakim dan ASN agar dapat dipenuhi peningkatan koordinasi antar satker dalam pelaksanaan mutasi Hakim dan ASN agar tidak terjadi pagu minus belanja pegawai.
3. Kekurangan anggaran operasional dan sarana/prasarana serta teknologi informasi pada satker agar dapat dipenuhi untuk menunjang peningkatan kinerja dan pelayanan prima
4. Perlu dianggarkan pemeliharaan asset tak berwujud (aplikasi) dan asset tetap guna meningkatkan pelayanan publik.
6. Perlu disusun petunjuk teknis baku pengawasan seuruh satker Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri se wilayah D.I Yogyakarta untuk keseragaman laporan dan peningkatan kualitas pengawasan.
7. Pengadilan Tingkat Pertama harus memperhatikan batas waktu maksimal dalam penanganan perkara.

